

EMPAT PILAR MPR RI BUAH PERJUANGAN REFORMASI MAHASISWA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS



EDISI NO.02/TH.XIII/FEBRUARI 2019



Pemilu Tahun 2019

Jangan Golput, Satu Suara Sangat Menentukan



26 Nasional
Menyegarkan Rasa Cinta Terhadap NKRI

39 Selangan
Peringatan Hari Pers Nasional

57 Sosialisasi
Budaya Demokrasi Tidak Bisa Dibentuk Instan

ISSN 0854-6371
9 770854 637158



EMPAT PILAR MPR RI

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara





MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MAJELIS

MAJALAH INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



INDONESIA
 INI BARU
 DARI MPR RI UNTUK NKRI



MPR
 RUMAH KEBANGSAAN
 PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
 DAN KEDAULATAN RAKYAT

Daftar Isi

EDISI NO.02/TH.XIII/FEBRUARI 2019



10 BERITA UTAMA

Jangan Golput, Satu Suara Sangat Menentukan

Golongan Putih (Golput) sah secara hukum karena dijamin konstitusi tentang HAM. Tapi Pemilu akan semakin sah dan legitimit kalau angka Golput-nya kecil.



24 Nasional
Oesman Sapta Lantik Tujuh Anggota MPR PAW



53 Sosialisasi
Mahyudin: Negara Ini Rusak Karena Korupsi

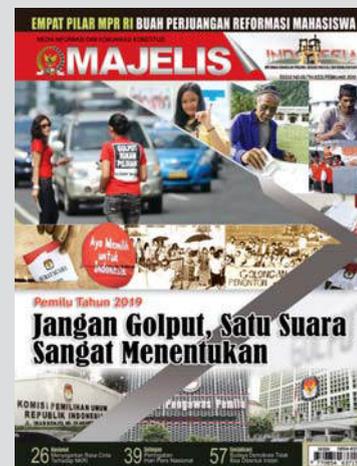


39 SELINGAN
Hari Pers Nasional



78 Profil
Syarif Abdullah Alkadrie

Pengantar Redaksi	04
Opini	06
Kolom	08
Wawancara Khusus	20
Diskusi Majelis	34
Gema Pancasila	36
Bicara Buku	38
Aspirasi Masyarakat	47
Varia MPR	70
Wawancara	72
Figur	74
Ragam	76
Catatan Tepi	82



COVER

Edisi No.02/TH.XIII/Februari 2019
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Koordinator Reportase

Pengantar Redaksi



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

Selfi Zaini

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, M. Rizal,

Suryani, Tugiyana, Heri Herawan,

Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Muhamad Jaya

KOORDINATOR REPORTASE

Budi Muliawan

REDAKTUR FOTO

Sucipto, Supriyanto,

Euis Karmilah

REPORTER

Ana Suzana, Mery S. Magdalena,

Yenita Revi, Sugeng Cahyono

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,

A. Ariyana, Agus Darto

PENANGGUNG JAWAB

DISTRIBUSI

Elen Magdalena

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayatni

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana, Kiki Tri Murjono,

Armansyah, Dhita Fitasari

Junaid

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Layanan

Informasi, Biro Humas,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238

Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

Potensi Golput dalam Pemilu 2019

PEMILIHAN Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden untuk pertama kali dilakukan secara serentak pada 17 April 2019. Menjelang pelaksanaan Pemilu itu suara-suara Golput atau orang yang tidak memilih—dikenal dengan Golongan Putih (Golput)—masih santer terdengar. Ketika pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2019 diumumkan, misalnya, sudah muncul ungkapan kekecewaan yang bisa memicu kembali gagasan mengenai Golput.

Fenomena Golput memang kerap terjadi menjelang penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Golput biasanya terjadi akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik baik dalam bentuk partai politik maupun kandidat pemimpin yang akan bersaing. Hingga kini, isu meningkatnya (potensi) angka Golput masih menghantui ajang demokrasi Pemilu 2019, terutama di kalangan pemilih pemula atau milenial. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada sekitar 20 – 30% adalah suara pemilih pemula yang diperebutkan pada Pemilu 2019.

Beberapa lembaga survei menyebutkan, jumlah Golput atau mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 ini meningkat sedikit dibanding Pemilu sebelumnya. Hicon Law & Policy Strategic memperkirakan, angka Golput di kisaran 29–30%. Sementara itu, survei lembaga Indikator menyebutkan adanya tren kenaikan Golput dalam Pemilu 2019. Tren kenaikan ini sejalan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Pada survei yang dirilis Desember 2018, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi memperkirakan, ada lebih dari 20% masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau Golput pada Pemilu 2019. Pada Pemilu Legislatif 2004, jumlah Golput mencapai 15,9%. Angka ini meningkat pada Pemilu Presiden putaran pertama dan kedua. Angka Golput pada saat putaran pertama Pilpres 2004

mencapai 21,8% dan pada putaran kedua sebesar 23,4%.

Pada Pemilu Legislatif 2009, jumlah Golput meningkat hingga 29,1%. Sedangkan pada Pemilu Presiden tahun yang sama, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 28,3%. Keberadaan Golput berlanjut pada Pemilu 2014. Pada Pemilu Legislatif 2014, angka Golput mencapai 24,89%. Sedangkan pada saat Pemilu Presiden 2014, angka Golput mencapai titik tertinggi, yakni 30% lebih dari jumlah pemilih.

Golput yang dimaksud di sini adalah mereka yang mempunyai hak pilih tetapi secara sadar memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya itu. Karena itu, Golput bisa dilihat dari tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara. Meningkatnya angka Golput berarti partisipasi pemilih semakin menurun. Selain itu, partisipasi yang menurun ini juga mengindikasikan tingkat kepercayaan pada proses demokrasi yang menurun.

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam berbagai kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR selalu mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan tidak Golput. Pimpinan MPR berulang kali menyebutkan pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Artinya, rakyat-lah yang berdaulat dan menggunakan kedaulatan dalam Pemilu.

"Satu suara sangat menentukan perjalanan bangsa". Seruan ini sudah disampaikan Pimpinan MPR jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak pada 17 April 2019. Seruan itu untuk menekan kemungkinan angka Golput yang tetap tinggi pada Pemilu 2019 ini. Ayo...jangan Golput. □



Kuis...

Untuk Pembaca Majalah Majelis



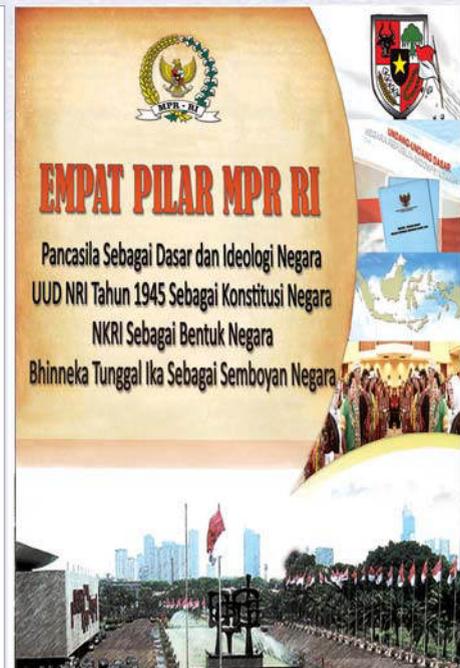
Pertanyaan:
Apa Visi Lembaga MPR?



Kirimkan Jawaban ke Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id
Sepuluh pengirim pertama akan mendapatkan hadiah Tumbler MPR RI.



ILUSTRASI: SUSTHANTO



Polemik Debat Capres 2019

DEBAT perdana Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang bakal maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 pada 17 April mendatang telah usai. Debat yang diselenggarakan oleh KPU itu berlangsung Kamis malam (17/1/2019) di Hotel Bidakara, Jakarta. Materi debat adalah masalah Hukum, HAM dan Terorisme. Meski dinilai sukses dan lancar, namun banyak kritik terhadap pelaksanaan debat ini, baik dari segi teknis pelaksanaan maupun materi debat itu sendiri.

Juga menjadi sorotan mengenai performa dan gesture dari dua pasangan calon, yaitu pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin, dan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. Mengenai siapa yang unggul dalam debat capres/cawapres yang pertama ini tergantung dari siapa dan ke pasangan mana keberpihakan si pemberi komentar. Namun, di atas semua itu, rakyatlah yang menentukan.

Tapi, yang menarik diulas adalah mengenai format dari debat Capres/Cawapres ini. Sebelum debat perdana ini berlangsung terjadi pro kontra di tengah masyarakat tentang urgensi, manfaat, serta risikonya bagi pasangan calon (paslon) dan rakyat pemilih. Dari berbagai ranah diskusi, banyak yang mengkhawatirkan debat menjadi ajang saling mempermalukan buat pasangan calon, dan ini preseden buruk buat demokrasi Indonesia.

Kekhawatiran itu wajar. Sebab, kalau itu terjadi, efek dominonya luar biasa. Bisa merugikan seluruh bangsa Indonesia, baik fisik, materi, maupun psikologis. Kebencian begitu besar bisa bermetamorfosis menjadi konflik riil, terutama di akar rumput. Efek

psikologisnya, bagaimana bangsa ini mempertanggungjawabkan kepada para pahlawan dan pendiri bangsa yang telah bersusah payah mendirikan bangsa dan negara, dengan mengorbankan harta dan nyawa.

Setelah debat itu berlangsung, ternyata kekhawatiran itu tidak terjadi. Ketua KPK Agus Rahardjo, salah seorang panelis debat, menyatakan, Debat Capres 2019 ini menepis kekhawatiran bahwa debat ini menjadi ajang saling mempermalukan. Secara umum, lanjut Agus Rahardjo, rakyat akan menjadikan debat Capres/Cawapres ini sebagai bahan untuk mempelajari pasangan calon yang saling ada visi dan misi ini.

Pemaparan visi misi dan penguasaan materi yang disampaikan masing-masing paslon dalam debat Capres/Cawapres juga sebagai indikator obyektif untuk menilai tentang pemahaman paslon dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa Indonesia. Untuk debat berikutnya, katanya, materi debat diramu masyarakat pemilih, dan ini akan menjadi salah satu faktor buat masyarakat menentukan pilihannya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Dr. Mahfud MD., dalam komentarnya, meminta masyarakat Indonesia agar kritis mencermati visi dan misi dua paslon Capres/Cawapres tersebut. Baik debat perdana yang telah usai maupun debat-debat berikutnya. "Masyarakat harus kritis, mana yang paling bagus dan paling cocok, karena keduanya menyampaikan materi yang bagus-bagus," harap Mahfud, MD. □

ISTIMEWA

DER



Fenomena Prostitusi Online Artis

MEDIA sosial beberapa waktu lalu – dan mungkin masih berlanjut sampai sekarang – banyak menampilkan “meme” tentang Rp 80 juta. Gambar-gambar lucu dengan berbagai varian disertai kata-kata lucu pula menghiasi laman media sosial. Meme tersebut erat kaitannya dengan terciduknya artis VA – yang kemudian diketahui inisial dari Venessa Angel — bersama seorang artis lainnya di sebuah hotel di Surabaya beberapa waktu silam.

Kasus ini menjadi begitu heboh, bukan karena tarifnya yang membelalakkan mata, Rp 80 juta, melainkan peristiwa ini membongkar

jaringan prostitusi online di Tanah Air. Dengan terkuaknya kasus VA ini maka terbongkarlah sejumlah artis ternama di Indonesia “jual dirinya” melalui jagad maya. Kasus artis terlibat prostitusi online ini sebenarnya bukan hal baru, tapi kasus VA ini menyegarkan kembali ingatan bahwa prostitusi online masih ada.

Kepolisian Daerah (Polda) Jatim yang menangani kasus ini terus membongkar siapa-siapa yang berperan dalam jaringan prostitusi online. Sejumlah mucikari sudah ditangkap, dan sederet artis Indonesia pun telah diketahui masuk dalam jaringan prostitusi online ini.



ISTIMEWA

Beberapa artis diketahui adalah pemain lama. Bahkan tarif untuk mem-*booking* artis-artis itu pun diketahui. Mulai puluhan hingga ratusan juta, tergantung tenar atau tidaknya artis itu.

VA sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dipersangkakan melanggar UU ITE pasal 27 ayat 1. Dalam kasus ini, VA juga berstatus korban, dan pelakunya, kabarnya, pria pengusaha yang identitasnya sampai sekarang tak pernah diungkapkan. Juga ikut menjadi tersangka adalah dua mucikari yang berperan dalam prostitusi online ini. Anehnya, si “pemakai” – lelaki hidung belang itu—tak pernah disebut-sebut sebagai tersangka.

Kasus prostitusi online ini adalah sebuah fenomena di era modern yang serba digital. Di mana transaksi seks tidak lagi terjadi di kamar-kamar lokalisasi, tapi melalui transaksi online, dan perbuatan mesum itu bisa terjadi di kamar-kamar hotel atau di mana saja. Artinya, prostitusi ini memang diatasi, apalagi dihilangkan. Ini akibat dari kebutuhan hidup tinggi, sedang

penghasilan yang halal tak selalu ada, akhirnya terpaksa menempuh jalan instan, melacurkan diri.

Komnas Perempuan memiliki pandangan lain tentang kasus VA ini. Kasus artis terlibat prostitusi online tidak bisa dilihat sesederhana itu. Meski sang artis sadar dan memasang tarif, tapi permasalahan di belakangnya tidak sesimpel itu, harus dilihat dari berbagai sisi dengan spektrum yang luas. Komnas Perempuan berpendapat, prostitusi online hendaknya dilihat sebagai jeratan kekerasan, di mana perempuan ditipu dan diperjualbelikan.

Dengan mengesampingkan kasus VA, menurut Komnas Perempuan, banyak kasus perempuan terlibat prostitusi *online* yang perlu perhatian lebih dan harus diberi perlindungan hukum. Tepatnya, mereka yang merupakan korban tindak perdagangan manusia, perempuan dalam kemiskinan, korban eksploitasi orang-orang dekat, serta perempuan dalam jeratan mucikari, dan bahkan menjadi bagian dari gratifikasi seksual. □

DER

Ancaman Bom Terhadap Pimpinan KPK

JAGAD pemberitaan nasional pada Rabu (9/1/2019) heboh dengan kejadian aksi teror bom yang diarahkan ke kediaman pribadi dua Pimpinan KPK, yakni: Ketua KPK Agus Rahardjo di daerah Bekasi, Jawa Barat, dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan.

Juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengungkapkan bahwa dari hasil penelusuran polisi, bom ditemukan di rumah Ketua KPK berjenis *high explosive* disusun di dalam tas ransel, dan diletakkan atau digantung di pagar rumah, namun tak sempat meledak.

Sedangkan di rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif ditemukan bahan peledak berjenis bom molotov berisi bahan bakar cair. Menurut penelusuran Polri, sekitar dua buah bom molotov diduga dilemparkan oleh pelaku teror dari sebuah sepeda motor langsung menasar ke rumah Laode. Satu bom sempat meledak dan satu lagi tidak meledak.

Walaupun tidak sampai menimbulkan korban, aksi teror tersebut diinterpretasikan masyarakat bahwa peristiwa tersebut erat kaitannya dengan kasus yang ditangani oleh lembaga anti rasuah itu. Lebih spesifik lagi ada yang menghubungkannya dengan kasus penyidik KPK Novel Baswedan yang sampai sekarang tak kunjung terungkap.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad juga mengungkapkan bahwa aksi teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tak kunjung terungkap akan berimbas pada teror-teror selanjutnya. “Ketika teror

kepada penyidik KPK tak terungkap dan tak kunjung tertangkap maka para peneror akan semakin berani, penegak hukum jadi diremehkan,” kata Abraham Samad.

“Saya tidak terkejut kalau Pimpinan KPK menjadi sasaran teror dan saya tahu betul bahwa para pimpinan KPK tidak akan gentar dan takut,” ucapnya. Para pimpinan KPK, kata Samad, sudah siap dan sudah memaklumi segala risiko yang dihadapi sebelum menerima jabatan sebagai pimpinan KPK.

Ketua KPK mengatakan bahwa teror yang ditujukan kepada pimpinan KPK adalah hal yang sudah jauh-jauh hari dimaklumi, sebab jabatannya sebagai Pimpinan KPK. “Intinya, kita serahkan saja kasus ini kepada aparat hukum, yakni Polri. Tapi, yang penting, ancaman teror tidak akan menyurutkan kami,” tegasnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, 28 Januari 2019, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta agar DPR menyuarakan perlindungan kepada para pekerja lembaga KPK. Soalnya, pihak-pihak yang melakukan teror bom kepada Pimpinan KPK sudah secara terang-terangan mengirimkan sinyal perang kepada upaya pemberantasan korupsi.

Untuk itu KPK bersama rakyat juga harus mengirimkan sinyal bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan pernah berhenti sampai korupsi habis dari negeri Indonesia. □

DER



ISTIMEWA



Baharuddin Aritonang

Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

Pemilu dan Golput

STILAH Golput atau Golongan Putih mengacu pada sikap warganegara yang tidak mau menggunakan hak pilih pada pemilihan umum (Pemilu). Penyebabnya tentu beragam. Apa karena berhalangan, tidak adanya pilihan yang berkenan di hati, tidak ingin ikut bertanggungjawab atas kepemimpinan mendatang, atau karena penyebab lainnya.

Langkah seperti itu sesungguhnya bukanlah suatu langkah yang bijak. Karena melalui penggunaan hak pilih akan menjadi awal mula dari pengelolaan negara. Dengan tidak ikut dalam menggunakan hak pilih alias golput seolah menghindari dari keikutsertaan dalam mengelola negara.

Dengan keikutsertaan memberikan suara akan ikut membangun kehidupan berdemokrasi (pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat). Ikut memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan menyusun dan melaksanakan program pembangunan lima tahun ke depan. Demikian pula memilih wakil-wakil rakyat, baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Di Pasal 22 E ayat (2) UUD Tahun 1945 dirumuskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Artinya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan bersamaan dengan memilih wakil rakyat. Terasa aneh ketika pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden (Pilpres) dilaksanakan secara terpisah. UUD merumuskannya secara serentak.

Penulis ingin sedikit mengulang cerita perubahan UUD Tahun 1945, khususnya yang terkait dengan

pemilihan umum (Bab VIIB). Penetapannya dilakukan melalui diskusi yang mendalam di kalangan anggota PAH I BP MPR dan Sidang Umum MPR sendiri. Ketika membahas materi Pemilu ini juga demikian halnya. Bahkan dilakukan simulasi, yang menggambarkan seorang pemilih akan berhadapan dengan 5 kotak suara (masing-masing suara untuk Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota).

Itulah sebabnya Perubahan UUD Tahun 1945 berlangsung sepanjang tahun 1999 sampai tahun 2002 oleh MPR periode 1999-2004. Langkahnya dilakukan dengan 4 (empat) tahap, dalam suatu proses berkesinambungan. Yang belum disepakati, dibahas kembali di tahun berikutnya, sampai didapat kata sepakat untuk diputuskan.

Secara langsung, konstitusi atau UUD Tahun 1945 memang tidak mengatur tentang partai politik. Akan tetapi penyelenggaraan negara amat terkait dengan partai politik. Pasal 6A ayat (2) merumuskan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik. Demikian pula di Pasal 22E ayat (3) bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik (rumusan inilah yang menunjukkan bila DPD memiliki garis pisah yang tegas dengan partai politik).

Sebagaimana diketahui politik itu memiliki pengertian yang beragam. Walau ada kamus yang merumuskan arti politik bersifat negatif, diantaranya sebagai tipu daya, pada dasarnya pengertian politik bersifat positif, diantaranya "pengetahuan tentang ketatanegaraan", "segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara" (lihat KBBI, 2005). Jika yang sepaham, sejasas, sehaluan, dan setujuan dalam berpolitik berhimpun, maka jadilah partai politik. Partai politik

inilah yang mengajukan pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik pula yang menjadi peserta pemilihan umum anggota DPR dan anggota DPRD.

Dengan demikian, parpol menjadi tumpuan di dalam penyelenggaraan negara. Karena itu, setiap warganegara memiliki tanggung jawab memelihara, membina, dan membangun partai politik yang baik dan berkualitas, yang mampu menyalurkan aspirasi politik setiap warganegara dengan baik.

Rumusan di konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 dijabarkan lebih lanjut di undang undang. Dan, itu sejalan dengan rumusan lain, khususnya yang menyangkut Hak Asasi Manusia. Di Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 dirumuskan "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang. Pasal 28 D ayat (3) memperkuatnya: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Partai politik diatur di UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan undang undang lain yang memiliki keterkaitan. Pemilihan Umum diatur di Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pemilu 2019 ini tercatat 20 Partai Politik (ditingkat Nasional) dan 4 Partai Politik lokal (di Aceh) yang menjadi peserta Pemilu. Keduapuluh partai politik peserta pemilu ini adalah 16 parpol lama, serta 4 parpol baru, yakni Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda.

Banyaknya partai politik memberi banyak pilihan. Masing-masing partai politik memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai dasar mengatur kehidupan partai politik. Setiap orang diberi kebebasan memilih parpol tempatnya berhimpun. Jika dianggap kurang berkualitas, tugas warga negara yang berhimpun di situlah yang memperbaikinya.

Proses pemilihan umum tahun 2019 kini sedang berlangsung. Tidak kurang dari Rp 24 triliun dana disediakan negara untuk menyelenggarakannya. Belum terhitung dana yang dikeluarkan partai politik serta setiap paslon Presiden/Wakil Presiden, serta calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Jumlahnya tentu bisa menjadi lebih

besar. Suatu angka yang lumayan. Karena itu harus dimanfaatkan dengan baik. Agar dana besar itu tidak percuma dan mubazir.

Pendaftaran sudah selesai. Kampanye para calon dan parpol sedang berlangsung. Begitu juga pemilihan anggota DPD di 34 provinsi, yang kelak akan melahirkan 4 wakil DPD dari setiap provinsi. Tentang calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat dilihat dalam daftar resmi yang telah dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun dari spanduk atau poster yang ditempel di pinggir jalan. Perhatian memang lebih banyak diarahkan pada calon Presiden dan Wakil Presiden. Tercatat 2 pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, yakni Joko Widodo/Makruf Amin dan Prabowo Subianto/Sandiago Uno. Proses Pemilihan Presiden/Wakil Presiden juga sudah dimulai.

Debat pertama sudah dilalui. Penulis tidak berniat menganalisisnya. Beragam pendapat yang muncul. Ada yang melihatnya positif, ada pula yang pesimistis. Sebagian pemilih sudah menetapkan pilihannya sejak awal. Mereka mungkin tidak terpengaruh oleh debat. Sebuah penelitian menunjukkan bila sekitar separuh pemilih telah menetapkan pilihannya. Tidak mengherankan bila sejumlah itu pula yang hanya kadang-kadang mengikuti perkembangan pemilu. Tercatat sekitar sepertiga belum menentukan pilihannya.

Tapi bagaimanapun pendapat Anda, baik kecewa maupun senang melihat penampilan kedua paslon di saat berdebat, janganlah terlalu pesimistis. Tetaplah optimistis. Dengan begitu akan lebih tenteram menggunakan hak pilih. Jangan golput atau tidak memilih. Negeri ini adalah negeri kita sendiri. Jika orang baik berdiam diri maka orang yang kurang baik yang mengatur kehidupan bernegara, ungkap seseorang. Jika Anda kecewa dengan wakil-wakil rakyat yang hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya sedikit yang mau melaporkan harta kekayaannya, yang malas ikut bersidang, yang lebih banyak melakukan studi banding keluar negeri, dan beragam kekecewaan lainnya, maka inilah saatnya memilih yang lebih berkualitas.

Lebih daripada itu, Pemilu jangan sampai membuat rakyat terpecah. Siapapun menjadi pemenang harus diakui dan dihormati seluruh rakyat. Yang menang adalah rakyat Indonesia. Mengeritik boleh saja, asal disampaikan secara baik. □

Pemilu 2019

Jangan Golput, **Satu Suara Sangat** Menentukan

Golongan Putih (Golput) sah secara hukum karena dijamin konstitusi tentang HAM. Tapi Pemilu akan semakin sah dan legitimit kalau angka Golput-nya kecil.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SERUAN untuk tidak memilih atau lebih populer dengan istilah Golongan Putih (Golput) dalam Pemilu 2019 mulai menyeruak. Bahkan seruan ini disuarakan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Di tengah masa kampanye Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019, sejumlah LSM justru menggelar konferensi pers bertajuk “Golput dan kampanye Golput bukan Pidana” di Gedung YLBHI pada Rabu, 23 Januari 2019. Mereka mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Sipil. Di dalam koalisi ini tergabung ICJR, KontraS, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lokataru, PBHI, dan YLBHI.

Intinya, koalisi ini menyatakan sikap tidak memilih atau menjadi Golput pada saat Pemilu 2019. Menurut koalisi ini, Golput adalah hak dan bukan tindak pidana. Mereka menganggap Golput atau tidak memilih merupakan satu pilihan politik.

Suara-suara Golput memang sudah terdengar menjelang pelaksanaan Pemilu serentak (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak) pada 17 April 2019. Golput adalah fenomena umum yang mewarnai setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, baik pemilu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi saat ini.

Istilah Golput sendiri berawal dari gerakan Golongan Putih yang diinisiasi oleh aktivis Arief Budiman dan kawan-kawan. Gerakan ini

merupakan gerakan protes atas penyelenggaraan Pemilu di awal Orde Baru pada 1971. Golput pada waktu itu dianggap sebagai gerakan politik dan bukan bentuk dari apatisisme politik (lihat bagian kedua, “Fenomena Golput dalam Pemilu di Indonesia”). Mereka tetap datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) namun mencoblos bagian putih di antara tanda gambar sehingga dianggap sebagai suara tidak sah.

Namun, belakangan Golput sudah berubah makna. Kini, mereka yang mempunyai hak pilih namun secara sadar memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya disebut Golput. Dari makna seperti ini, tentu saja, Golput pasti ada dan selalu ada dalam setiap Pemilu. Sebab, Golput bisa dilihat dari partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Dilihat dari partisipasi pemilih maka angka Golput setiap pemilu memperlihatkan kenaikan.

Kita bisa ambil contoh fenomena Golput pada pemilihan presiden secara langsung yang dimulai pada 2004. Pada Pilpres 2004, Golput pada putaran pertama sebesar 21,8%. Lalu pada Pilpres putaran kedua angka Golput naik menjadi 23,4%. Pada Pilpres 2009, angka Golput naik lagi menjadi 28,3%. Angka Golput semakin naik pada Pilpres 2014, yaitu sebesar 29,01%.



Jika dilihat dari partisipasi pemilih dalam Pilpres, data yang dilansir Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan, pada Pilpres 2004 diikuti sebanyak 69,58% pemilih dari seluruh total pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada Pilpres 2009, partisipasi pemilih mencapai 71,17%. Sedangkan pada Pilpres 2014, partisipasi pemilih mencapai 69,58%.

Potensi Golput Pemilu 2019

Lalu bagaimana untuk Pemilu serentak tahun 2019 ini di tengah gencarnya ajakan Golput? Survei Indikator Politik Indonesia memperkirakan potensi Golput pada Pemilu 2019 sedikitnya (minimal) sebesar 20% dari total pemilik suara. Sementara itu HICON Law & Policy Strategic memprediksi jumlah Golput atau mereka yang tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019 akan sedikit mening-



E.E. Mangindaan

kat di banding pemilu sebelumnya. HICON Law & Policy Strategic memperkirakan angka Golput tidak jauh berbeda dengan

Pilpres 2014, berkisar antara 29 – 30%.

Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan tidak percaya angka Golput akan naik pada Pemilu serentak tahun 2019 ini. "Saya tidak berani mengatakan bahwa dalam Pemilu serentak 2019 ini Golput akan meningkat. Meningkatnya jumlah Golput dalam Pemilu 2019 ini hanya kata para pengamat saja," katanya kepada *Majelis*.

Mangindaan beralasan, KPU sudah melaksanakan sosialisasi Pemilu sejak jauh-jauh hari. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai banyak orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan sosialisasi pemilu itu, seperti informasi tentang tahapan-tahapan pemilu, KPU berharap masyarakat memahami dan memiliki kesadaran atas hak demokrasinya. Sosialisasi KPU itu tampak dalam iklan-iklan di media massa.

“Masyarakat secara sadar didorong untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Ini penting agar rakyat juga ikut memiliki tanggungjawab menyukseskan Pemilu 2019. Saya yakin Golput tidak semakin besar,” kata anggota Komisi II DPR ini. Jika melihat data yang ada, partisipasi pemilu di Indonesia pada kisaran 70% jauh lebih baik dari partisipasi pemilu di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan Prancis.

Sejalan dengan pendapat E.E. Mangindan, anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera termasuk orang yang tidak percaya angka Golput akan naik pada Pemilu 2019 ini. “Kami yakin bisa menangani soal partisipasi pemilih ini sehingga bisa menekan jumlah Golput,” ujarnya kepada *Majelis*.

Pendapat berbeda disampaikan Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali. Meski mengakui partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia jauh lebih baik dibanding negara-negara lain, namun dia mengkhawatirkan adanya potensi Golput dalam Pemilu 2019 ini. Potensi Golput itu terjadi karena pemilu (Pileg dan Pilpres) dilakukan secara serentak. Ini merupakan pengalaman pertama Indonesia melaksanakan pemilu secara serentak. “Mungkin ini bisa membuat berkurangnya partisipasi pemilih,” katanya kepada *Majelis*.

Zainuddin menduga potensi Golput dalam Pemilu 2019 ini karena adanya anggapan bahwa satu suara saja tidak akan berpengaruh. Akibat adanya anggapan itu, maka orang (pemilih) lebih memilih untuk pergi berlibur daripada menggunakan hak pilihnya. “Kenapa hari pemungutan suara dibuat menjadi hari libur? Ini menimbulkan efek kurang baik. Mereka (pemilih) malah menggunakan hari itu untuk berlibur,” kata politisi Partai Golkar ini.

Angka Golput, lanjut Zainuddin, tidak berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. “Partisipasi politik dalam pemilu hanyalah salah satu aspek dari demokrasi,” katanya.

Untuk meningkatkan partisipasi politik itu, dia menyarankan agar pemilu tidak diadakan secara serentak. Artinya, pemilihan legislatif dilaksanakan lebih dulu baru kemudian pemilihan presiden. Apalagi Pemilu pada tahun 2024 akan menggabungkan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan



Zainuddin Amali

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kepala daerah, secara bersamaan. “Kerumitan ini bisa membuat orang enggan datang ke TPS,” ujarnya.

Milenial dan Pemilih Pemula

Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Prof. Hamdi Muluk menjelaskan, pada era saat ini fenomena tidak memilih apapun dalam pemilu secara ilmiah disebut non voting. Keberadaan non voting ini sangat wajar dalam era saat ini. Ada dua kategori dalam non voting. *Pertama*, karena berbagai sebab orang tidak terdaftar dalam DPT atau sebab non politik, seperti dalam perjalanan, ada pekerjaan, dan lainnya, sehingga tidak sempat datang ke TPS.

Kedua, non voting karena apatisisme. Dalam

kategori ini pemilih merasa bahwa percuma memilih karena suaranya tidak akan berpengaruh pada hasil pemilu atau mereka merasa pemilu tidak terlalu penting. Masuk juga dalam kategori ini adalah mereka yang secara sadar merasa kandidat yang ada tidak sesuai dengan ekspektasinya.

Hamdi tak memungkiri adanya potensi non voting di kalangan milenial. Selain alasan di atas, edukasi politik kepada generasi milenial juga kurang. Meski KPU sudah menyosialisasikan Pemilu 2019 dan mengajak untuk menggunakan hak pilih, tak urung ada kekhawatiran potensi Golput di kalangan milenial. Pemilih pemula dalam Pemilu serentak 2019 ini merupakan 30% dari total pemilih.

Mangindan juga punya kekhawatiran



Hamdi Muluk



Mardani Ali Sera



Jazilul Fawaid

yang sama terhadap potensi Golput di kalangan pemilih milenial atau pemilih pemula. Meski demikian, politisi partai Demokrat ini yakin, anak-anak muda Indonesia akan menggunakan hak demokrasi. “Kita perlu juga mewaspadai adanya Golput di kalangan pemilih pemula. Tapi saya punya keyakinan bahwa anak-anak muda Indonesia akan menggunakan hak demokrasi,” ujarnya.

Menurut Mangindaan, anak-anak muda dan pemilih milenial ini akan mencari tahu dan ingin merasakan bagaimana menggunakan hak pilihnya. Apalagi anak-anak muda sekarang sudah banyak mengetahui tentang pemilu. KPU juga mengadakan sosialisasi tentang pemilu di kalangan pemilih pemula. “Saya kira ini sudah bagus,” ucapnya.

Kekhawatiran yang sama juga dirasakan Ketua Fraksi PKB MPR, Jazilul Fawaid. Dia mengkhawatirkan potensi Golput di kalangan milenial. Dalam hal ini dia menekankan pentingnya edukasi. Selama ini edukasi dan pencerahan politik serta demokrasi di kalangan milenial sangat kurang. Seharusnya penyelenggara pemilu dan partai politik peserta pemilu, serta calon legislatif memberi pemahaman kepada generasi milenial tentang politik dan demokrasi demi keberlangsungan perjalanan sebuah bangsa.

“Saya masih melihat kurangnya edukasi politik ini. Saya belum melihat sosialisasi dan edukasi politik ini kepada kaum milenial,” ujar kepada *Majelis*. Edukasi dan pendidikan politik kepada generasi pemilih pemula (milenial) seharusnya menjadi fokus dan tanggungjawab penyelenggara pemilu dan

partai politik untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Misalnya, dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, *café-café*, mengundang artis atau *public figure*, musisi, dengan menyisipkan pesan atau kampanye untuk memilih dalam pemilu.

Mangindaan juga sepakat mengenai pentingnya pendidikan politik untuk masyarakat, terutama pemilih pemula. “Penyelenggara pemilu maupun partai politik, termasuk tokoh masyarakat, harus menjalankan pendidikan politik. Mereka harus memberi contoh agar pendidikan politik bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Tak jauh berbeda, Zainuddin mengungkapkan, harus ada *treatment* tersendiri untuk pemilih pemula atau kelompok milenial ini agar menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Lagi-lagi pendidikan politik tentang ketatanegaraan, demokrasi, partai politik, perlu disampaikan kepada pemilih pemula. Sehingga pemilih pemula memiliki pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Mardani Ali Sera mempunyai pendapat berbeda. Dia meyakini kelompok milenial atau pemilih pemula akan ikut pesta demokrasi ini. Sebab, mereka menginginkan adanya perubahan di tengah kondisi hidup semakin sulit sekarang ini, seperti harga kebutuhan pokok yang naik, sulit mencari pekerjaan, dan lainnya. “Mereka akan ikut dalam perubahan dengan memilih pemimpin ke depan,” tutur Mardani yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR.

Untuk menarik minat kelompok milenial ini, Mardani menyarankan KPU memanfaatkan

para selebgram untuk meng-endorse kelompok itu. Para selebgram mempunyai jutaan followers. Kelompok milenial ini menggemari media sosial, seperti *twitter*, *instagram*, *youtube*, dan lainnya. Mereka juga mengidolakan para selebgram.

Untuk menekan Golput, Mardani meminta KPU untuk memastikan semua pemilih terdaftar di DPT dan mendapat form untuk memilih. Para calon presiden dan wakil presiden juga perlu mengajak masyarakat agar datang ke TPS. “Saya yakin mereka yang sebelumnya tidak punya perhatian pada pemilu akan datang dengan ke TPS,” katanya.

Bagi Hamdi Muluk, pilihan non voting (Golput) tidak akan membuat Indonesia lebih baik. Karena itu, meskipun kecewa terhadap pilihan yang ada, Hamdi menyarankan agar jangan non voting. “Non voting juga tidak akan mengubah keadaan bangsa ini. Dan, jangan menyuarakan agar yang lain juga non voting. Apalagi mengajak orang lain non voting. Sebab, mengajak orang lain non voting itu sangat tidak bijak,” urainya.

Menurut Hamdi, jika non voting dalam pemilu terlalu besar, misalnya mencapai 30, 40, bahkan 50% maka akan membahayakan legitimasi pemenang pemilu. Biaya untuk pemilu yang mencapai triliunan rupiah terbuang percuma karena menghasilkan pemimpin yang legitimasinya kurang. Padahal pemilu di Indonesia sering mendapat pujian dari negara-negara lain karena berlangsung demokratis, memenuhi asas luber dan jurdil, serta tidak ada kekerasan.

“Kalau hanya alasan kandidat yang tidak sesuai sehingga memilih non voting (Golput), itu adalah alasan konyol. Apakah kita berharap ada dua malaikat turun dari surga untuk menjadi kandidat pemilu. Manusia tentu banyak kekurangannya,” katanya.

“Untuk para kandidat pemilu berusahalah memenuhi ekspektasi masyarakat. Berikanlah harapan. Jagalah perilaku karena akan menjadi sorotan masyarakat,” harap Hamdi.

Golput memang sah secara hukum karena dijamin dalam konstitusi tentang HAM. Meski demikian, pemilih sebaiknya menggunakan hak pilihnya. Semakin banyak masyarakat menggunakan hak pilihnya maka legitimasi pemilu akan semakin baik. Karena itu, jangan Golput. Satu suara Anda, sangat menentukan. □

Tim Majelis

Fenomena Golput dalam Pemilu di Indonesia

Golput ini selalu ada dalam setiap periode penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Angka Golput justru terlihat semakin besar pasca reformasi.

FENOMENA golongan putih atau Golput selalu terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Pada umumnya, istilah Golput disematkan kepada mereka yang memiliki hak pilih, namun secara sadar memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Banyak alasan dan sebab mengapa seseorang menjadi Golput. Biasanya Golput terjadi akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik, baik ketidakpercayaan pada partai politik maupun pada kandidat pemimpin (calon presiden) yang maju dalam pemilihan presiden.

gerakan Golput yang dilakukan aktivis Arief Budiman pada 1971. Golput ini adalah sebuah gerakan protes atas penyelenggaraan Pemilu 1971 pada masa Orde Baru. Golput semacam itu bisa dikatakan sebagai sebuah gerakan politik dan bukan bentuk dari apatisisme politik.

Contoh lain, sikap Golput dari mantan presiden KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sikap Gus Dur itu ditujukan untuk mengkritik sistem yang dianggap lalim. Kritik itu adalah untuk memperbaiki sistem demokrasi pasca reformasi. Dengan alasan inilah Gus Dur memperlihatkan secara terbuka

1977 hingga 1997, angka Golput secara perlahan memperlihatkan kenaikan. Tapi, secara umum, angka Golput pada Pemilu dalam rentang waktu 1955–1997 berkisar 3 hingga 6%, atau cenderung lebih rendah dibanding pada era reformasi.

Pada era reformasi, angka Golput sangat memprihatinkan. Bahkan, angka Golput mencapai puncaknya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 yang mencapai lebih dari 30%. Padahal, pada awal reformasi atau penyelenggaraan Pemilu pertama tahun 1999 di era reformasi, tingkat partisipasi pemilih mencapai lebih dari 90%. Tetapi setelah



Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Sri Yuniarti, dalam penelitiannya yang berjudul “Golput dan Pemilu di Indonesia,” menyebutkan bahwa Golput disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Golput terjadi karena ketidakpuasan terhadap partai politik yang dianggap hanya berorientasi pada kekuasaan. Kedua, Golput karena persoalan administratif atau masalah teknis, seperti nama pemilih tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Orang yang memiliki hak untuk memilih namun tidak menggunakan haknya maka bisa disebut sebagai bentuk apatisisme politik, karena ketidakpeduliannya pada situasi politik yang terjadi. Tentu, Golput seperti ini sangat merugikan proses demokrasi. Tetapi ada juga orang yang tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan ideologis. Misalnya,

sikap Golput pada Pemilu 2004.

Dalam tulisan ini, Golput yang dimaksud adalah mereka yang memiliki hak pilih tetapi secara sadar memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan pengertian itu maka Golput bisa dilihat dari tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari “H” pemungutan suara. Dari data yang ada, Golput selalu ada dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Angka Golput justru terlihat semakin besar pasca reformasi.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka Golput menunjukkan tren yang menaik. Pada Pemilu pertama pada 1955, angka Golput hanya sebesar 8,6%. Angka Golput justru menurun pada Pemilu 1971, yaitu 3,4%. Artinya, ada pengurangan angka Golput sebesar 5,2%. Pada Pemilu



Sri Yuniarti

Pemilu 1999, angka Golput selalu melebihi 15% dari jumlah pemilih, baik pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden.

Pada Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2004, misalnya, angka Golput mencapai 15,9%. Lebih buruk lagi, angka Golput pada Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2004. Pada putaran pertama Pilpres 2004, angka Golput mencapai 21,8%. Sedangkan pada Pilpres putaran kedua, angka Golput mencapai 23,4%.

Pada Pileg 2009, angka Golput naik menjadi 29,1%. Sedangkan pada Pilpres tahun yang sama, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 28,3%. Eksistensi Golput ini berlanjut pada Pemilu tahun 2014. Angka Golput pada Pileg 2014 mencapai 24,89%. Pada saat Pilpres 2014, angka Golput mencapai titik tertinggi, yakni lebih dari 30% dari jumlah pemilih.



Arief Budiman

Angka Golput telah naik dari satu digit pada Pemilu pertama di era reformasi tahun 1999 menjadi dua digit selama tiga pemilu sesudahnya. Munculnya Golput bisa karena alasan politis dan apolitis. Namun, secara tersirat, meningkatnya angka Golput menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah dan lembaga negara.

Sejarah Golput

Istilah Golput sendiri baru muncul menjelang Pemilu pertama pada masa Orde Baru tahun 1971. Pemilu diselenggarakan pada 5 Juli 1971 diikuti sembilan partai politik dan satu Golongan Karya (Golkar). Partai politik itu, antara lain Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI), Persatuan Tarbiah Islamiyah (Perti), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Golongan Karya (Golkar)—tidak disebut sebagai partai politik—untuk pertama kalinya ikut sebagai

peserta Pemilu.

Menurut majalah *Ekspres* pada edisi 14 Juni 1971, Golput adalah sebuah gerakan untuk datang ke TPS dan menusuk kertas putih di sekitar tanda gambar, bukan gambarnya. Ini menyebabkan suara menjadi tidak sah dan tidak dihitung. Jadi, pada waktu itu, para pemilih tetap datang ke bilik suara dan mencoblos kertas putih di sekitar gambar parpol.

Adalah para pemuda dan mahasiswa yang berada di balik gerakan ini sebagai protes terhadap penyelenggaraan Pemilu 1971. Mereka mendeklarasikan gerakan ini pada awal Juni 1971, sebulan sebelum Pemilu pertama Orba dilaksanakan. Golput ini muncul dari kelompok aksi para pemuda dan mahasiswa, seperti Mahasiswa Menggugat (MM), Komite Anti Korupsi (KAK), Wartawan Generasi Muda, dan Komite Penegak Kedaulatan Rakyat (KPKR).

Sebenarnya cikal bakal gerakan Golput sudah dimulai pada Maret dan awal April 1971. Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) Max Wajong mendeklarasikan “menjadi penonton

yang baik” jelang Pemilu 1971. Lalu, istilah golongan putih muncul melalui tulisan Imam Walujo Sumali, bekas Ketua Ikatan Mahasiswa Kebayoran, berjudul “Partai Kesebelas untuk Generasi Muda” di harian KAMI edisi 12 Mei 1971. Partai itu dinamakan sebagai Partai Putih dengan gambar putih polos atau mencoblos bagian putih di sela-sela atau di antara tanda gambar parpol dan Golkar. Imam bisa dikatakan sebagai pencetus golongan putih.

Gerakan ini semakin membesar. Sekelompok pemuda yang menamakan diri Kelompok Oposisi, seperti Arief Budiman, Imam Walujo, Husin Umar, Marsilam Simandjuntak, Asmara Nababan, dan Julius Usman, mulai bergerak. Partai Putih yang semula tanpa tanda gambar kemudian bermeta-morfosis menjadi golongan putih dengan simbol gambar segilima hitam di atas dasar putih polos.

Arief Budiman menjadi tokoh sentral Golput. Kala itu, Arief adalah anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Arief sendiri mengemukakan beberapa alasan untuk Golput. Dia menyebut, pemerintah melanggar demokrasi dengan membatasi jumlah partai politik. Selain itu, pemerintah melakukan intervensi dengan menyeleksi calon pimpinan PNI dan menunjuk langsung pimpinan Parmusi. Arief juga menyebut Golkar sebagai partai buatan pemerintah. “Pegawai negeri (dan keluarganya) dipaksa masuk Golkar. Kalau tidak mereka akan dipecat dengan tuduhan tidak loyal kepada pemerintah,” sebut Arief.

Golput memang tidak berhasil menjadi gelombang kekuatan politik. Ini terbukti jumlah Golput pada Pemilu 1971 tidak terlalu besar karena adanya mobilisasi pemilih. □



Pemilu 1971

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BSC



E.E. Mangindaan, Wakil Ketua MPR RI

“Saya Yakin, Anak Muda Akan Gunakan Hak Demokrasinya”

MENJELANG pelaksanaan Pemilu secara serentak (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) pada 17 April 2019 masih terdengar suara-suara Golongan Putih (Golput) atau orang yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Memang, setiap penyelenggaraan Pemilu selalu terjadi fenomena Golput. Salah satu penyebab Golput adalah munculnya ketidakpercayaan masyarakat, baik terhadap partai politik maupun calon presiden dan wakil presiden yang diusung. Tak berlebihan apabila Golput masih membayangi Pemilu 2019.

Apalagi Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Pertama kali pemilih harus memilih secara langsung anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD provinsi, DPR pusat, DPD, dan memilih presiden dan wakil presiden, atau dikenal dengan pemilu lima kotak. Golput juga dikhawatirkan terjadi pada pemilih pemula atau milenial.

Ada sekitar 20 sampai 30% pemilih adalah pemilih pemula. Singkatnya, ada potensi Golput dalam Pemilu 2019 ini. Benarkah?

Untuk membahas persoalan ini Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR EE Mangindaan. Berikut wawancara dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota Komisi II DPR. Petikannya.

Menjelang Pemilu lima kotak (memilih kotak suara untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD provinsi, DPR pusat, anggota DPD, serta memilih presiden dan wakil presiden) pada 17 April 2019 ada kekhawatiran meningkatnya Golongan Putih atau Golput. Apa tanggapan Bapak mengenai hal ini?

Saya tidak berani mengatakan bahwa dalam Pemilu serentak 2019 ini Golput akan meningkat. Meningkatnya jumlah Golput dalam Pemilu 2019 ini hanya kata para pengamat saja. Tetapi apakah kita tidak mempertimbangkan berbagai upaya yang

sudah dilakukan penyelenggara Pemilu agar tidak terjadi Golput. KPU sudah melaksanakan sosialisasi Pemilu serentak ini sejak tahun lalu. UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu sampai pada aturan KPU atau PKPU serta Bawaslu mendorong agar tidak terjadi Golput. Karena itu semua pihak diminta agar menyosialisasikan Pemilu serentak ini kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mencegah agar jangan sampai banyak orang yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Itu (sosialisasi dari KPU) yang menjadi pegangan saya. Menurut saya, KPU sebagai penyelenggara Pemilu, termasuk pemerintah daerah, sudah mengikuti semua tahapan Pemilu itu. Maka dengan sosialisasi tahapan Pemilu itu masyarakat diharapkan paham dan sadar dengan hak demokrasinya. Masyarakat secara sadar didorong untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar.

Sejauh ini bagaimana sosialisasi yang dijalankan KPU sebagai penyelenggara Pemilu? Mengapa masih

santer terdengar suara-suara untuk Golput?

Kalau melihat data yang ada memang ada sekitar 20% dari pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau Golput. Sebenarnya angka ini jauh lebih kecil dibanding angka Golput di negara-negara lain. Tetapi kita tidak boleh hanya melihat prosentase itu. Lebih penting lagi adalah bagaimana mencegah agar tidak terjadi Golput. Pesan untuk menggunakan hak pilih ini sudah disampaikan secara masif.

Memang Pemilu sekarang dilaksanakan secara serentak, yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilaksanakan bersamaan. Ini juga perlu mendapat perhatian. Sebab, pemilih mungkin saja lebih tertarik pada pemilihan presiden dibanding pemilihan legislatif. Ini juga harus dipikirkan agar pemilih jangan hanya mengutamakan pemilihan presiden, atau pemilihan legislatifnya saja. Karena Pemilu dilakukan secara serentak maka perlu ditekankan agar jangan sampai terjadi banyak Golput.

Apakah sosialisasi yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah membuahkan hasil yang diharapkan bisa menekan angka Golput?

Saya kira sudah. Saya di Komisi II DPR sering mengadakan rapat dengan KPU. Dalam rapat kita mengimbau agar KPU gencar melakukan sosialisasi. Ini sudah diwujudkan dalam PKPU. Kita lihat sudah banyak iklan-iklan di media massa dalam rangka sosialisasi Pemilu 2019. Ini penting agar rakyat juga ikut memiliki tanggung jawab menyukseskan Pemilu 2019. Apalagi ada pemilihan presiden. Saya yakin Golput tidak

semakin besar, bahkan sebaliknya semakin kecil.

Sekitar 20 sampai 30% pemilih pada Pemilu 2019 adalah pemilih pemula atau mileneal. Ada kekhawatiran Golput ini terjadi pada pemilih pemula atau mileneal. Apa pendapat Bapak?

Itu persoalan lain. Tapi percayalah, kita juga pernah muda. Pada zaman dulu, waktu kita muda, kita juga ikut pemilu. Lama-lama di kalangan anak-anak muda juga muncul kesadaran pentingnya pemilu. Karena itu partisipasi pemuda dalam pemilu meningkat. Awalnya mereka tidak tahu sehingga ingin mencari tahu dan merasakan menggunakan hak pilih. Sekarang, anak-anak muda sudah banyak yang mengetahui tentang pemilu. Apalagi di kalangan pemilih pemula sudah sering diadakan sosialisasi pemilu. Saya kira ini bagus.

Memang, kita perlu juga mewaspadai adanya Golput di kalangan pemilih pemula atau mileneal. Tapi saya punya keyakinan bahwa anak-anak muda Indonesia akan menggunakan hak demokrasi.

Saat ini secara administratif, banyak juga pemilih yang terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Ini disebabkan persoalan administratif karena tidak memiliki e-KTP sehingga tidak terdaftar di DPT. Apakah persoalan ini juga bisa berpotensi Golput?

Sampai sekarang menurut Kemendagri pembuatan e-KTP sudah mencapai 90%. KPU juga mempertimbangkan pemilih yang sakit (di rumah sakit) atau di penjara (Lapas). Sesuai UU, memang harus dengan e-KTP. Tapi kelemahan sudah diperbaiki dengan



peraturan KPU. Misalnya, bagaimana jika seseorang satu minggu sebelum tanggal 17 April sudah berusia 17 tahun. Secara administratif dia akan sulit mendapatkan e-KTP. KPU sudah mengantisipasi hal ini.

Menurut Bapak, apa sesungguhnya persoalan sehingga masih terjadi Golput?

Persoalan pendidikan politik masih perlu diberikan kepada masyarakat, terutama pemilih pemula. Penyelenggara pemilu maupun partai politik, termasuk tokoh masyarakat, harus menjalankan pendidikan politik. Mereka harus memberi contoh agar pendidikan politik bisa berjalan dengan baik.

Apakah upaya itu sudah cukup untuk menekan angka Golput?

Sudah cukup saya rasa. Kita sudah banyak membahas di Komisi II. Karena itu saya berani untuk mengatakan bahwa banyak perubahan yang sudah dilakukan KPU maupun Bawaslu. Dengan peraturan KPU (PKPU) lebih banyak memberi kemudahan bagi seseorang menggunakan hak pilihnya.

Apa imbauan Bapak kepada masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019?

Saya meminta masyarakat untuk mengikuti apa yang telah disiapkan penyelenggara pemilu dan pemerintah. Ikuti tahapan-tahapan pemilu yang sudah ditentukan dan gunakan hak pilih sebagai hak warga negara agar pesta demokrasi ini benar-benar dihayati. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



Lelaki Yang Menentang Badai

HARI ini, 31 Desember, di penghujung tahun 1942, di sebuah rumah sederhana di Gang Abu (sekarang masuk kawasan sekitar Harmoni Jakarta) lahir anak pertama pasangan Tjik Agus Kiemas dan Hamzaton Rusjda. Sang putra itu diberi nama Taufiq Kiemas.

Di masa awal pendudukan Jepang itu keadaan serba susah. Tjik Agus Kiemas yang saat itu bekerja di Persatuan Warung Kebangsaan Indonesia (Perwabi)— organisasi yang berafiliasi dengan Partai Masjumi— harus bekerja membanting tulang demi menghidupi keluarganya. Sedangkan Hamzaton, yang pernah mengenyam pendidikan bidan, fokus mengurus kebutuhan Taufiq dan adik-adiknya yang lahir kemudian.

Tak lama setelah proklamasi kemerdekaan, Tjik Agus Kiemas— yang sudah perwira TNI hasil lulusan pendidikan perwira PETA di Bogor— memboyong keluarganya di Yogyakarta. Mereka mengikuti para pejabat pemerintah yang memutuskan memindahkan ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta.

Baru setelah penyerahan kedaulatan, Taufiq dan keluarganya kembali ke Jakarta. Ketika ayahnya ditugaskan sebagai pejabat di Djawatan Perdagangan di Makassar, Taufiq tidak ikut serta. Oleh ayahnya, yang simpatisan militan Masjumi, ia justru dimasukkan ke SMP Katolik Mardiyuana di Sukabumi.

Setamat SMP, barulah Taufiq bergabung kembali dengan keluarganya yang sudah bermukim di Palembang, kampung halaman sang ayah.

Saat remaja di Palembang, Taufiq tumbuh menjadi seorang Soekarno yang militan. Militansi itu berawal dari kekaguman saat ia mendengar pidato Bung Karno di radio. Seakan ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mengetahui lebih jauh sosok dan pemikiran Bung Karno.

Berbagai hal pun dilakukan Taufiq untuk memuaskan rasa ingin tahunya tersebut, mulai dari meminjam buku-buku karya Bung Karno atau yang membicarakan pemikiran sang proklamator, juga ia terus berupaya agar selalu bisa menyimak pidato Bung Karno di radio.

Dari seorang remaja yang semula hobi hura-hura dengan geng Don Quixote, pelahan tapi pasti, Taufiq bertransformasi menjadi seorang aktivis mahasiswa.

Tak lama setelah ia masuk Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Taufiq memutuskan bergabung dengan GMNI. Meski untuk itu, ia harus bertengkar hebat dengan ayahnya, yang ingin anak sulungnya itu berkecimpung di organisasi mahasiswa Islam.

Karena militansinya dan kepandaiannya bergaul, dalam waktu singkat Taufiq dipercaya menjadi Ketua GMNI Palembang. Pergaulan politiknya pun tidak lagi sebatas anak-anak GMNI, juga dengan tokoh-tokoh politik di Palembang. Bahkan dengan sejumlah tokoh muda nasional, seperti Guntur Soekarnoputra.

Peristiwa Gestok 1965 membalikkan suasana. Kekuasaan Bung

Karno surut. Para Soekarno yang sejati, termasuk Taufiq, harus mendekam di penjara rezim Orde Baru. Dua kali ia dipenjarakan: di Markas CPM Palembang dan RTM Budi Utomo Jakarta.

Tapi, penjara tidak membuat Taufiq patah semangat, justru memberikan pelajaran berharga baginya. Pelajaran dari penjara itu terus diingat oleh Taufiq. Bukan sekadar menjadi pengetahuan penghina kepala belaka, tapi juga ia praktikkan dalam kehidupan kesehariannya.

Seiring perjalanan politiknya, romansa asmaranya dengan Megawati Soekarnoputri pun tumbuh. Saat mendekam di penjara di Palembang, angan-angan atau firasat Taufiq untuk menyunting Megawati Soekarnoputri sudah bersemi.

Firasat itu rupanya membekas di garis tangan. Di awal tahun 1971, setelah Megawati menjanda karena suaminya, Letnan (Penerbang) Surindro Suprijarso, wafat akibat kecelakaan pesawat di sekitar Pulau Biak, ia diperkenalkan dengan Taufiq oleh Guntur Soekarnoputra. Perkenalan itu berlanjut menjadi jalinan asmara, hingga akhirnya pasangan ini menikah Maret 1973.

Sambil mengarang biduk rumah tangga— pasangan ini memiliki tiga anak: Muhammad Rizki Pratama, Muhammad Prananda Prabowo, dan Puan Maharani— Taufiq dan Megawati kemudian terjun ke dunia politik. Mereka berkiprah di Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Di masa-masa kritis, terutama setelah KLB PDI di Surabaya akhir tahun 1993 di mana Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI, Taufiq terus mendampingi sang istri. Ia lebih banyak bergerak di belakang layar.

Di masa reformasi, Taufiq merupakan motor utama pendirian PDI Perjuangan. Ia pula yang berperan besar mengantarkan Megawati Soekarnoputri menjadi Wakil Presiden RI, dan kemudian Presiden RI.

Puncak karir politik Taufiq Kiemas sendiri adalah saat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MPR RI di tahun 2009. Di tengah masa kepemimpinannya, 8 Juni 2013, beliau berpulang ke haribaan Allah SWT.

Kini Taufiq Kiemas, lelaki yang menentang badai itu, sudah lima tahun lebih wafat. Sudah menjadi tugas kita merawat kenangan, serta meneruskan warisan keteladanannya dalam berpolitik yang beradab.

Dirgahayu Pak Taufiq Kiemas
31 Desember 1942-2018

Alfatihah....

Ahmad Basarah
Wakil Ketua MPR RI/ Ketua Fraksi PDIP MPR RI

Dr. Ma'ruf Cahyono. SH., MH.
Sekretaris Jenderal MPR RI

Sederet Agenda Penting

Ketatanegaraan MPR pada 2019



DOKUMENTASI: JAZ

TAHUN ini MPR akan melaksanakan agenda ketatanegaraan yang sangat penting, yaitu Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2014 – 2019, Sidang Awal Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2019 – 2024, sidang paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu Presiden tahun 2019.

Pada tahun 2019 ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sejumlah agenda penting ketatanegaraan. Selain Sidang Tahunan MPR yang rutin dilaksanakan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan, MPR juga akan melaksanakan agenda ketatanegaraan yang sangat penting, yaitu Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2014 – 2019, Sidang Awal Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2019 – 2024, sidang paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2019. Di tahun ini pula, seperti tahun-tahun sebelumnya, MPR juga menyelenggarakan peringatan Hari Konstitusi (18 Agustus) dan HUT MPR (29 Agustus).

"MPR akan mempersiapkan seluruh agenda ketatanegaraan yang harus dilaksanakan pada tahun 2019 ini," kata Sekretaris Jenderal MPR, Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., dalam wawancara khusus dengan Majalah *Majelis* di Ruang Kerjanya, Lantai 7 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen. Wawancara ini sengaja memilih topik seputar

program dan rencana kegiatan MPR pada tahun 2019 ini.

Tahun 2019 merupakan tahun politik. Pada tahun ini diadakan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif secara serentak pada 17 April 2019. Dengan Pemilu serentak ini rakyat memilih secara langsung para wakil yang akan duduk di lembaga legislatif (DPRD Kabupaten/Kota, DPR pusat, dan DPD), serta memilih presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Agenda ketatanegaraan dilakukan MPR menyesuaikan tahapan penyelenggaraan Pemilu, terutama pelantikan presiden dan wakil presiden.

Ma'ruf memperkirakan MPR akan menyelenggarakan Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2014 – 2019 pada akhir September atau menjelang 1 Oktober 2019. Jadwal ini mengikuti tahapan Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU menjadwalkan peresmian keanggotaan legislatif terpilih hasil Pemilu pada Juli – September 2019 dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Agustus – Oktober 2019. Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR menyebutkan, untuk mengakhiri masa jabatan, MPR menyelenggarakan Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2014 – 2019. "Agenda sidang adalah laporan kinerja Pimpinan MPR periode 2014 – 2019 dan laporan Panitia Ad Hoc I dan II," ujar Ma'ruf.

Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2014 – 2019



juga akan mengesahkan putusan MPR tentang rekomendasi-rekomendasi MPR Periode 2014–2019. Rekomendasi MPR itu merupakan kajian dari badan-badan sebagai alat kelengkapan MPR. Kajian-kajian itulah yang akan direkomendasikan sebagai masukan bagi anggota MPR periode berikutnya (2019–2024).

Setelah Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2014–2019 berakhir,

selanjutnya Anggota MPR hasil Pileg 2019 menyelenggarakan Sidang Awal Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2019–2024. Sidang paripurna pertama mengagendakan pengambilan sumpah jabatan anggota MPR periode 2019–2024. Jumlah anggota MPR periode 2019–2024 sebanyak 701 orang, terdiri dari 565 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Agenda lain dalam Sidang Awal Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2019–2024

adalah pembentukan fraksi dan kelompok DPD MPR RI. Setelah pembentukan fraksi dan kelompok DPD, MPR menggelar pemilihan pimpinan MPR.

Sesuai revisi terakhir terhadap UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pimpinan MPR sebanyak delapan orang. Tetapi, revisi UU MD3 juga menyebutkan bahwa pada periode 2019–2024 komposisi pimpinan MPR kembali menjadi lima orang. “Jadi nanti



DOKUMENTASI: JAZ

Tata Tertib MPR juga harus disesuaikan,” tutur Ma’ruf. Sidang Awal Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2019 – 2024 juga akan mengesahkan Tata Tertib MPR.

Selanjutnya, MPR akan mengadakan Rapat Gabungan untuk membagi tugas pimpinan MPR dan menetapkan pimpinan badan sebagai alat kelengkapan MPR. Dengan pimpinan MPR yang baru maka akan ada pimpinan baru pada badan-badan sebagai alat kelengkapan MPR, seperti Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran. Karena itu, ada rapat gabungan untuk memilih pimpinan badan dan anggota badan sebagai alat kelengkapan MPR.

Berikutnya, MPR akan menggelar agenda penting ketatanegaraan, yaitu pelantikan presiden dan wakil presiden. MPR menjalan-

kan amanah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 9 yang menyebutkan, “sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat”. Tata Tertib MPR juga mengatur setelah pengucapan sumpah, Presiden akan menyampaikan pidato awal masa jabatan.

“Jadi, bisa dibayangkan, dalam tahun 2019 ini, MPR memiliki agenda ketatanegaraan yang sangat padat. Ada Sidang Tahunan MPR pada bulan Agustus. Kemudian Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2014 – 2019 pada akhir September. Lalu, Sidang Awal Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2019 – 2024 pada awal Oktober 2019. Dan, sidang paripurna pelantikan presiden dan

wakil presiden, juga di bulan Oktober. Itu adalah agenda-agenda utama MPR pada tahun ini. Agenda-agenda ketatanegaraan itu, belum termasuk agenda rutin MPR lainnya, seperti peringatan Hari Konstitusi, peringatan HUT MPR,” papar Ma’ruf Cahyono.

Tahun ini MPR menjalankan agenda-agenda penting ketatanegaraan yang cukup fundamental. Karena itu perhatian publik pada 2019 ini tertuju pada agenda-agenda yang digelar MPR, terutama pelantikan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, peran publikasi menjadi sentral sebagai media pembelajaran masyarakat. Publikasi mengenai agenda-agenda penting MPR itu bisa memberi pengaruh besar, paling tidak untuk pendidikan kewarganegaraan terkait dengan ideologi, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan.

“Jika kita mampu mendesain substansi dan aspek publikasi maka saya kira akan muncul pemahaman mengenai kebijakan politik dan kebijakan negara. Dari pemahaman itulah maka muncul pendidikan politik yang kuat,” kata Ma’ruf.

Rencana Strategis

Dalam tahun 2019 ini MPR juga menjalankan tugas-tugas rutin yang diamanatkan oleh UU MD3. UU Nomor 17 Tahun 2014 memberi tugas kepada MPR untuk (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR; (b) memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan konsep Bhinneka Tunggal Ika; (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaannya; serta (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

“Pada tahun ini, kegiatan rutin itu harus diperkuat,” ujar Ma’ruf. Dia berharap, pelaksanaan sosialisasi dan pengkajian bisa berjalan semakin efektif serta membuahkan hasil yang maksimal dan memberikan kontribusi. Misalnya, rekomendasi-rekomendasi untuk kepentingan tata negara, penyempurnaan konstitusi, dan implementasi dari konstitusi.



Untuk menjalankan mandat UUD dan UU, MPR memiliki rencana strategis. Seperti pada periode 2014–2019, MPR juga akan membuat rencana strategis 2019 – 2024. Rencana strategis ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, target-target, dan program-program. Rencana strategis MPR 2019 – 2024 disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dari rencana strategis itulah nanti akan muncul program dan rencana kerja tahunan MPR. “Sekretariat Jenderal MPR memiliki rencana kerja untuk mendukung tugas-tugas MPR,” ucap Ma’ruf.

Dia memberi contoh, selama lima tahun ke depan, MPR memiliki agenda-agenda terkait dengan rekomendasi-rekomendasi penting dari MPR periode 2014 – 2019. MPR periode 2014 – 2019 sudah menjalankan rekomendasi dari MPR periode 2009 – 2014. Saat ini, MPR periode 2014 – 2019 sudah masuk pada tataran pengambilan keputusan. “Panitia Ad Hoc (PAH) sudah terbentuk tahun lalu. Artinya, PAH inilah yang menjadi bahan pengambilan kebijakan MPR. Pelaksanaan dari kebijakan itu bisa tahun ini, juga bisa tahun depan,” terangnya. MPR Periode 2019 – 2024 akan menindaklanjuti rekomendasi dari MPR periode 2014 – 2019.

Sejauh ini, PAH masih dalam tahap melengkapi keanggotaan dan masih berproses di antara fraksi dan kelompok DPD. Pimpinan dan anggota PAH bisa merepresentasikan tugas-tugas PAH sehingga mampu menghasilkan hasil kerja dan karya terkait dengan domain tugas di PAH masing-masing. Hasil kerja dan karya PAH

(rekomendasi) ini menjadi bahan laporan, baik untuk Sidang Tahunan maupun Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2014 – 2019.

Jika rekomendasi itu nanti menyangkut perubahan sistem tata negara, lanjut Ma’ruf, maka perlu diimplementasikan Pasal 3 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, yaitu perubahan UUD. Pasal 3 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD.

Dari internal birokrasi Sekretariat Jenderal MPR, Ma’ruf menambahkan, MPR bertekad mewujudkan *supporting system* yang ideal sesuai kebutuhan lembaga. Untuk itu, Setjen MPR sudah mengajukan perubahan struktur ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB). MPR melakukan perubahan struktur organisasi untuk penyesuaian dan memaksimalkan fungsi-fungsi. Misalnya, dengan membentuk ke deputian agar lebih fokus pada fungsi dan tugas pokoknya sehingga memudahkan koordinasi dan komunikasi.

Perubahan struktur organisasi itu sudah diajukan dan sedang menunggu Peraturan Presiden. “Insya Allah tahun ini bisa terwujud. Kita berharap dengan struktur organisasi yang baru itu kita bisa melaksanakan tugas-tugas MPR sesuai kebutuhan dan mandat dari UUD dan UU sehingga kita bisa memenuhi standar layanan untuk kinerja MPR,” harapnya. □

BSC



Kompleks Parlemen, Jakarta

Oesman Sapta

Lantik **Tujuh Anggota** MPR PAW



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dari tujuh anggota MPR PAW yang dilantik, enam di antaranya berasal dari Fraksi Partai Hanura.

MENJELANG tutup tahun, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta melantik dan mengambil sumpah tujuh orang anggota MPR pengganti antar waktu (PAW) di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/12/2018). Dari tujuh anggota MPR PAW yang dilantik, enam di antaranya berasal dari Fraksi Partai Hanura.

Mereka yang dilantik dan diambil sumpahnya sebagai anggota MPR PAW adalah Lukman Hakim Hasibuan dari Fraksi PPP Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara III menggantikan Fadly Nurzal; Erick Adrata Ritonga dari Fraksi Hanura Dapil Sumatera I menggantikan Rufinus Hotmaulana Hutahuruk; Ferdinand Sampurna Jaya dari Fraksi Hanura Dapil Lampung I menggantikan Frans Agung Mula Putra.

Kemudian, Timbul Manurung dari Fraksi Hanura Dapil Jawa Barat I menggantikan Moh Arief Suditomo; Erislan dari Fraksi Hanura Dapil

Jawa Barat II menggantikan Dadang Rusdiana; Pendeta Tetty Pinangkaan menggantikan Syarifuddin Sudding, dan Jalaludin Akbar menggantikan Mukhtar Tompo, keduanya juga dari Fraksi Hanura.

Dalam sambutannya, Oesman Sapta mengajak anggota MPR PAW yang baru dilantik untuk menjalankan tugas dan wewenang konstitusional MPR dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab sehingga memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“MPR sebagai lembaga permusyawaratan adalah lembaga perwakilan sekaligus lembaga demokrasi yang mengemban aspirasi rakyat. Sebagai salah satu pelaksana kedaulatan rakyat, MPR mempunyai tanggungjawab untuk mewujudkan substansi demokrasi yang sesungguhnya,” katanya.

Menurut Oso, demokrasi konstitusional yang kita ingin wujudkan secara tegas dan ideal, yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. “Namun, sampai hari ini, cita-cita ideal itu belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua sebagai anggota MPR dan wakil rakyat mencurahkan seluruh perhatian untuk



mengawal demokrasi ini agar berjalan dan bekerja menuju demokrasi konstitusional sesuai dengan tugas dan kewenangan majelis,” jelasnya.

“Selaras dengan semangat MPR untuk memperkokoh ideologi, mewujudkan demokrasi konstitusional yang sejalan dengan visi

MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat,” imbuhnya.

Usai pelantikan, secara khusus Oesman Sapta berpesan kepada anggota MPR PAW dari Fraksi Partai Hanura untuk melaksanakan tugas di parlemen dengan penuh tanggung

jawab. “Mereka harus melaksanakan tugas dan kewajiban yang diatur dalam AD/ART partai dan UUD NRI Tahun 1945. Mereka harus rajin masuk dan mengikuti sidang-sidang di parlemen. Mereka tidak boleh melanggar aturan,” tegas OSO. □

BSC

Kunjungan HNW ke ANRI

Menyegarkan Rasa Cinta Terhadap NKRI

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyimpan jutaan bukti sejarah perjalanan bangsa Indonesia, sejak pra merdeka hingga sekarang.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI SIANG hari nan terik pada Kamis (3/1), Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) melakukan kunjungan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta Selatan. Politisi PKS itu tiba di ANRI pukul 14.00, mengenakan baju koko berwarna kuning kecoklatan dipadupadankan celana kain hitam, beserta peci hitam yang jarang lepas dari kepalanya. Kedatangan Hidayat di kantor ANRI disambut Kepala ANRI Dr. Mustari

Irawan beserta jajarannya.

Kepada Hidayat, Dr. Mustari Irawan menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas kunjungan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Dia berharap, kunjungan tersebut menjadi contoh bagi masyarakat agar gemar mengunjungi museum, khususnya ANRI. Karena ANRI menyimpan arsip sejarah dan pengetahuan yang sangat banyak, khususnya menyangkut bukti-bukti otentik sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

“Lebih dari dua juta foto, film, dan gambar tersimpan di ANRI. Tetapi masih banyak atau belum seluruh arsip dapat dikumpulkan di sini, karena berbagai persoalan. Mudah-mudahan kunjungan Wakil Ketua MPR dapat menambah semangat kami dalam mengusahakan terkumpulnya arsip lain, dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk gemar mengunjungi ANRI,” harap Mustari.

Selain persoalan anggaran, jelas Mustari, pihaknya juga kerap kesulitan mengumpul-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kan arsip-arsip asli sejarah perjalanan bangsa, karena berbagai persoalan. Seperti, minimnya kesadaran masyarakat untuk menyimpan arsip-arsip penting, karena dianggap tidak berguna. Juga belum adanya kesadaran terkait untuk menyerahkan arsip tersebut kepada ANRI. Atau karena arsip yang dibutuhkan tidak diketahui keberadaannya.

Pada kunjungan tersebut, HNW berkesempatan melihat sebagian koleksi arsip di ANRI. Seperti, naskah asli Proklamasi yang dituliskan tangan oleh Soekarno. Foto-foto tokoh

pergerakan nasional dan sejumlah konferensi perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Termasuk arsip-arsip MPR yang sudah tersimpan di ANRI. Selain itu, Hidayat juga melihat diorama sejarah perjalanan Indonesia yang dimiliki ANRI.

Kepada pimpinan ANRI, Hidayat Nur Wahid berharap, pihak ANRI bisa mengumpulkan bukti-bukti sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang hingga kini masih tercecer. Antara lain, arsip mengenai Resolusi Jihad yang dikobarkan Hasyim Asy'ari. Juga Mosi

Integral yang digagas oleh Moh. Natsir. Serta arsip tentang Penetapan 18 Agustus sebagai hari Konstitusi, dan sejarah keberadaan Jamiatul Khair yang merupakan organisasi pergerakan tertua dan pertama di Indonesia.

"Semua itu adalah rangkaian sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dan, memiliki makna yang sangat besar untuk memberikan pelajaran kepada generasi muda, bahwa umat Islam telah berkontribusi banyak bagi berdiri tegak dan kuatnya NKRI", ujar Hidayat.

Di akhir kunjungannya, Hidayat menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pimpinan ANRI yang telah menerima kedatangannya, sekaligus memberi pencerahan terkait sejarah Indonesia. Dia berharap, ANRI tak bosan-bosan menggali dan mencari arsip-arsip nasional yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.

"Kecintaan saya terhadap NKRI terasa disegarkan kembali, setelah melihat koleksi ANRI. Karena itu, mari kita senantiasa mengunjungi ANRI agar kecintaan kita pada bangsa Indonesia terus terjaga. Sebagaimana kecintaan para pahlawan kepada bangsa dan negara ini", katanya. □

MBO



Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono:

Desain Ketatanegaraan Harus Sesuai Dengan Ideologi Pancasila

Desain sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Apakah ideologi Pancasila sudah diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan?



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar seminar nasional dengan tema "MPR dalam Mekanisme Demokrasi Pancasila" di Depok, Jawa Barat, Kamis (6/12/2018). Dalam seminar itu, Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma'ruf Cahyono mengatakan, desain sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Disain ketatanegaraan Indonesia seharusnya tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pertanyaannya adalah

apakah ideologi Pancasila sudah diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan," katanya dalam seminar yang diselenggarakan oleh MPR bekerja sama dengan Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Pancasila.

Ma'ruf menjelaskan, lembaga MPR merupakan salah satu organ dalam sistem ketatanegaraan. Karena itu, dalam seminar ini dibahas apakah MPR sebagai organ ketatanegaraan sudah sesuai dengan ideologi Pancasila, khususnya demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila, lanjut Ma'ruf, mengan-

dung unsur-unsur penting yang berbeda dengan demokrasi bangsa-bangsa lain. Ada empat unsur penting dalam demokrasi Pancasila, yaitu unsur kebulatan pendapat atau mufakat, unsur musyawarah, unsur perwakilan, dan unsur hikmat kebijaksanaan.

"Unsur-unsur itu tidak kita temukan dalam demokrasi di negara-negara lain. Sejauhmana kekhasan demokrasi Pancasila itu mampu diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan," paparnya.

Bukan hanya dalam tataran sistem ketatanegaraan, unsur demokrasi Pancasila itu juga diimplementasikan di tataran dimensi lain. Misalnya dalam politik, dalam ekonomi (demokrasi ekonomi Pancasila), sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Semua dimensi itu harus mengerucut pada demokrasi Pancasila.

"Apabila bangunan sistem ketatanegaraan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan lainnya sudah sesuai dengan ideologi Pancasila maka cita-cita bangsa seperti dalam Pembukaan UUD bisa diwujudkan," imbuh Ma'ruf.

Atas dasar itu, Ma'ruf mengharapkan, seminar ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan apakah sistem ketatanegaraan kita sudah sesuai dengan demokrasi Pancasila.

"Pasca perubahan UUD 1945 terdapat pertanyaan mendasar, yakni apakah disain ketatanegaraan Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila? Kelembagaan utama ketatanegaraan Indonesia pasca UUD 1945 mengalami perubahan dan menempatkan setiap lembaga negara sama kedudukannya," paparnya.

Narasumber dalam seminar ini adalah Dr. Hendra Nurtjahjo, SH., M.Hum (staf pengajar UI dan Universitas Pancasila); Prof. Dr. Drs. Astim Riyanto, SH., MH., (Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi FH Universitas Pancasila); Prof. Bagir Manan (mantan Ketua Dewan Pers); dan Prof. Lily Romli (LIPI). □

BSC



Talkshow

Haluan Negara Kiblat Pembangunan Nasional

Kalau sudah ada menjadi kiblat pembangunan nasional maka haluan negara itu menjadi panduan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

SAAT ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih membahas reformulasi sistem pembangunan nasional model GBHN sebagai haluan negara. Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma'ruf Cahyono mengungkapkan, haluan negara untuk memperbaiki sistem perencanaan pembangunan nasional diharapkan bisa menjadi panduan pembangunan ke depan. Haluan negara menjadi *guideline*, sebagai kiblat pembangunan semua penyelenggara negara.

sinambungan. Oleh karena itu, Pimpinan MPR periode 2009 – 2014 mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. MPR periode 2014 – 2019 menjalankan rekomendasi itu.

“Reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN memerlukan kajian-kajian melibatkan berbagai pihak, seperti aspirasi masyarakat, lembaga penyelenggara, dan perguruan tinggi,” jelasnya.

perwakilan masyarakat. Semua harus terwakili,” katanya.

Menurut Ma'ruf, haluan negara adalah untuk memperbaiki sistem perencanaan pembangunan nasional. Haluan negara ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan pembangunan nasional Indonesia ke depan. Haluan negara menjadi *guideline* dan kiblat perencanaan pembangunan para penyelenggara negara. Dalam haluan negara ada target pencapaian pembangunan yang bisa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“Di situlah (saat ada haluan negara), Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar mempunyai target-target pencapaian pembangunan yang bisa diakselerasi, karena semua penyelenggara negara mempunyai fokus yang sama,” kata Ma'ruf Cahyono dalam *talkshow Kompas TV* yang disiarkan secara live, Rabu siang (5/12/2018). Tema talkshow itu adalah Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Model GBHN.

Mengawali talkshow, Ma'ruf Cahyono menjelaskan, MPR sudah mengkaji pemikiran untuk menghadirkan kembali haluan negara (Garis-Garis Besar Haluan Negara). Salah satu alasannya adalah tidak adanya haluan negara menyebabkan pembangunan berlangsung secara parsial dan tidak berke-

Penyusunan haluan negara, lanjut Ma'ruf, masih berproses di MPR. Proses itu pun tidak mudah. Jika haluan negara dimasukkan dalam UUD, maka perlu perubahan (aman-demen) UUD yang membutuhkan persyaratan-persyaratan. “Tapi yang lebih penting adalah adanya konsensus di antara *stakeholder*. Jika konsensus tercapai maka akan memudahkan tahapan berikutnya,” katanya.

Ma'ruf memberi gambaran haluan negara itu harus mampu menampung dimensi-dimensi strategis bangsa. Tidak hanya terkait manajemen perencanaan pembangunan nasional, tapi juga terkait aspek ideologi, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain secara garis besar. “Dalam penyusunannya, haluan negara harus mampu merepresentasikan kehendak seluruh

diakselerasi karena penyelenggara negara memiliki fokus yang sama.

“Kalau sudah ada *guideline* di tingkat nasional dan *guideline* ini merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat, maka haluan negara itu menjadi panduan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah,” papar Ma'ruf.

Dengan demikian, tambahnya, dengan rujukan atau *guideline* itu maka pembangunan yang dilaksanakan sudah memiliki kerangka yang jelas untuk kepentingan nasional secara keseluruhan, bukan kepentingan daerah, sektoral atau lainnya. “Karena itu kita memang harus segera menata sistem perencanaan pembangunan nasional itu,” ucapnya. □

BSC

Temu Tokoh di Samarinda

MPR Dorong Mahasiswa Melakukan Riset

Kampus melalui Tridharma Perguruan Tinggi khususnya harus bisa mengubah cara berfikir mahasiswa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mulawarman menggelar temu tokoh/kebangsaan di GOR Universitas Mulawarman, Samarinda, Selasa (11/12/2018). Temu tokoh/kebangsaan diikuti staf pengajar, guru PPKn, dan sekitar 1000 mahasiswa dari perguruan tinggi di Samarinda. Dalam acara ini, Wakil Ketua MPR Dr. Mahyudin, ST., MM., menyampaikan presentasi berjudul: "Kontribusi Generasi Muda Menyambut Tahun Emas 2045".

Mengawali paparannya, Mahyudin menyebutkan, tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, memajukan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. "Maka visi Indonesia adalah berdaulat, maju, adil dan makmur. Itu tercantum dalam Pembukaan UUD," katanya.

Apakah tujuan bernegara itu tercapai? Mengacu pada data-data perhitungan

kemajuan ekonomi, Mahyudin mengungkapkan, pada 2045 (visi 100 tahun Indonesia merdeka) Indonesia menjadi salah satu negara dengan PDB terbesar di dunia. Saat itu PDB Indonesia berada urutan empat terbesar di dunia. "Kita berharap, Indonesia saat itu sudah menjadi negara maju," ujarnya.

Mahyudin juga mengungkapkan, pendapatan per kapita Indonesia saat ini berkisar 3.500 dolar AS atau Rp 45 juta per tahun. Indonesia masuk dalam *medium income*. Tapi pendapatan per kapita Indonesia tidak beranjak naik. Karena itu Indonesia dikatakan masuk dalam jebakan negara berpen-



dapatan menengah. “Ini yang sedang diperjuangkan agar pendapatan per kapita naik menjadi 11.000 dolar AS,” katanya.

Pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 15 dunia. Indonesia diramalkan masuk pada peringkat 9 dunia pada 2030. “Pada 2045, Indonesia masuk pada peringkat empat besar. Saat itu PDB Indonesia mencapai 9.313 miliar dolar. Jadi, peluang Indonesia sangat bagus,” ucap Mahyudin.

Indonesia juga mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif dua kali lipat dari usia non produktif. “Tapi kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi bumerang. Periode ini berlangsung sampai 2035. Ini peluang bagi Indonesia,” imbuhnya.

Melihat peluang itu, Mahyudin mengharapkan, universitas atau perguruan tinggi

diberdayakan. MPR mendorong kampus untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang riset, dan mengubah cara berfikir mahasiswa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. “Seperti riset pengolahan sumber daya alam di Kaltim. Ini juga bisa membuat mahasiswa tertarik melakukan riset sehingga muncul kreativitas-kreativitas,” katanya.

Misalnya, perguruan tinggi lebih giat melakukan kajian dan riset sehingga Universitas Mulawarman juga bergerak dengan melakukan riset-riset. “Supaya mahasiswa juga tertarik melakukan riset. Agar mereka juga punya kreativitas,” harapnya

Menurut Mahyudin, mahasiswa perlu menciptakan lahan usaha baru tidak hanya mengincar pekerjaan sebagai PNS. “Pen-

duduk Kaltim jangan terlena dengan keunggulan sumber daya alam yang dimiliki. Tapi perbaiki sumber daya manusianya,” pintanya.

Untuk itu, Mahyudin mendorong perguruan tinggi melakukan riset dan mendorong mahasiswa menguasai Iptek. “Kita dorong kampus untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama berorientasi riset dan mengubah cara berpikir mahasiswa untuk menguasai Iptek dan wawasan riset,” tandasnya.

Mahyudin mengharapkan mahasiswa untuk tetap semangat membangun Indonesia. “Mahasiswa, khususnya mahasiswa Kaltim, ikut bersama membangun Indonesia yang kita cintai ini,” tutupnya. □

BSC

Doa Bersama Guru PAUD

HNW Akan Perjuangkan Nasib Guru PAUD

Wakil Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid hadir dalam acara doa bersama dengan ratusan guru pendidikan anak usia dini (PAUD). Pada kesempatan itu, HNW menampung keluhan para Guru PAUD tersebut.

DI SELA acara doa bersama dengan ratusan guru pendidikan anak usia dini (Guru PAUD), yang diselenggarakan di Masjid Al Falah, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 15 Januari 2019, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menjangkau aspirasi dan keluhan mereka.

Sebagaimana diketahui, Guru PAUD yang terhimpun dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) saat ini tengah mengajukan *judicial review* UU. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. *Judicial review* diajukan, karena mereka merasa ada ketidaksetaraan antara Guru PAUD formal dan non-formal.

Akibat belum adanya kesetaraan maka hak-hak Guru PAUD non-formal terabaikan. Kondisi demikian membuat Guru PAUD non-formal tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan amanat undang-undang, seperti memperoleh penghasilan di atas kebutuhan



hidup minimum, jaminan kesejahteraan sosial, dan tidak pernah memperoleh kesempatan untuk mengembangkan, serta meningkatkan kualifikasi akademik serta kompetensi.

Untuk itulah, dalam uji materi yang mereka ajukan, menghendaki agar pengertian guru harus mencakup pendidikan PAUD formal dan PAUD non-formal.

Menyikapi aspirasi yang disampaikan

organisasi yang mempunyai anggota sebanyak 385.000 orang itu, HNW berharap, agar Mahkamah Konstitusi (MK) menerima judicial review yang diajukan oleh HIMPAUDI. “Ini tuntutan yang sederhana, keadilan dan kesetaraan hak guru-guru PAUD formal dan non-formal”, ujarnya.

Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Gontor itu berdoa semoga mata hati hakim MK dibukakan Allah untuk mengambil keputusan yang adil.

Pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu mengingatkan apabila persoalan ini tidak tuntas di periode pemerintahan saat ini, dia berjanji memperjuangkan aspirasi para Guru PAUD

non-formal di periode yang akan datang.

Kepada mereka, HNW akan memastikan pada tahun 2020, UU Tentang Sisdiknas akan dimasukkan dalam prioritas Prolegnas untuk dikoreksi, guna memasukkan dan menyetarakan Guru PAUD formal dan non-formal sama-sama dilindungi negara.

HNW menegaskan, agar kita jangan mendiskriminasi antara Guru PAUD formal dan non-formal, karena posisi keduanya sebenarnya setara. Dia menyatakan keheranannya, mengapa dalam undang-undang turunannya tentang guru dan dosen tidak masuk dalam definisi, setara, sehingga terjadi ketidakadilan. “Saya pikir sudah tepat

diajukan ke MK,” paparnya.

Dia mengingatkan, anak-anak usia dini saat ini berada dalam dua kondisi. Mereka yang dari keluarga tidak mampu berada dalam kondisi tumbuh kembang tidak normal, seperti *stunting*. Sementara yang dari keluarga mampu, anak-anaknya ‘dirampok’ oleh internet dan gadget.

Hal demikian, menurut HNW, memerlukan hadirnya pihak yang betul-betul bisa memberikan alternatif pendidikan yang baik, seperti PAUD. Dan, PAUD ini membutuhkan guru-guru yang berdedikasi. “Para guru inilah yang saat ini menuntut penyetaraan haknya,” ujarnya. □

Audiensi BEM STID Al Hikmah

HNW: Aktivistis Dakwah Harus Berprestasi

Prestasi organisasi dan berdakwah harus berbanding lurus dengan prestasi akademik. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR ketika menerima delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STID Al Hikmah Jakarta, 18 Januari 2019.

GENERASI muda Indonesia, terutama yang berasal dari dunia kampus, tentu tak lepas dari kegiatan organisasi dan aktifitas sosial, dan juga dakwah bagi mahasiswa muslim. Dunia organisasi mahasiswa sejak era Orde Lama sudah sangat mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia, hingga masuk era reformasi yang sangat fenomenal di 1998.

Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A (HNW) mengatakan hal itu ketika menerima delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Dakwah (STID) Al Hikmah, Jakarta, di Ruang Rapim MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Lebih lanjut, HNW menyatakan, kegiatan berorganisasi dan berdakwah mahasiswa sebagai aktivis di berbagai organisasi merupakan kegiatan positif. Kegiatan itu merupakan medan pelatihan berorganisasi bagi mahasiswa, dan sebagai medium mendekatkan diri kepada masyarakat. Namun, HNW mengingatkan, jangan sampai karena ‘keasyikan’ dalam berorganisasi membuat prestasi akademik menjadi mundur.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“Ingat prestasi berorganisasi harus berbanding lurus dengan prestasi akademik, tidak ada alasan menjadi aktivis kampus atau dakwah membuat prestasi akademik mundur. Malah sebaliknya, semestinya kegiatan berorganisasi menjadi pendorong prestasi akademik,” katanya.

HNW mengungkapkan bahwa dahulu dia juga aktif di berbagai organisasi dan juga dalam dakwah Islam. Namun, lanjut HNW,

kegiatan yang dia lakukan itu tidak mengganggu kegiatan akademik, bahkan prestasi akademik berhasil diraih dengan bagus.

Kepada delegasi BEM STID Al Hikmah, HNW juga mengingatkan bahwa sebagai aktivis organisasi sekaligus aktivis dakwah Islam di era kekinian, anggota BEM STID harus memahami bahwa aktivis dakwah Islam sekarang meneruskan segala sesuatu yang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sudah diperjuangkan oleh aktivis Islam di masa lalu, yakni di masa perjuangan pergerakan Indonesia merdeka.

“Sebut saja peran besar para aktivis Masyumi, aktivis Islam seperti Mohammad Natsir dengan Mosi Integralnya yang dapat menyatukan kembali Indonesia dalam NKRI, dan masih banyak lagi. “Semestinya peran aktivis dakwah Islam di era sekarang harus lebih baik dari mereka,” ungkap HNW.

Menjawab pertanyaan barbagai masalah seputar adanya dikotomi antara dakwah dan politik, HNW menyatakan, sejarah perjuangan umat Islam atau aktivis Islam di masa perjuangan tersebut, menurut HNW,

bangunan berfikir umat Islam seharusnya tidak mempertentangkan antara Islam yang aktif dalam dunia dakwah dan Islam yang aktif dalam dunia politik. “Berpolitik adalah bagian dari dakwah dan dakwah adalah bagian dari politik,” jelas HNW.

Politik PKS ini menegaskan, dalam konteks Keislaman baik pemahaman Alquran, Hadist, sejarah Rasulullah, dan sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia, tidak menganut adanya pembelahan yang bersifat ekstrim. Artinya, kalau Anda berdakwah tidak boleh berp politik dan berp politik tidak boleh ber dakwah maka yang dipentingkan adalah bagaimana membuat dakwah dan politik itu

menjadi dua posisi yang sesungguhnya saling menguatkan, menguntungkan, membela dan saling memaksimalkan potensi.

“Yang sangat perlu dipahami adalah dakwah memiliki nilai yang sangat penting untuk disampaikan pada berbagai pihak termasuk politik ,” terang HNW seraya menjelaskan bahwa dalam ber dakwah harus memerhatikan lingkungan tempat nanti akan berkiprah. “Dalam ber dakwah dan menyiarkan Islam tidak dibenturkan dengan kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat, selama tidak melanggar syariat dan aqidah,” tandasnya. □

DER

Sejauh Mana **Penting dan Pengaruh Acara** Debat Presiden

DEBAT calon Presiden merupakan gelaran resmi diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang Pemilu Presiden. Bahkan acara seperti ini sudah dilakukan pada 1999 di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, dengan peserta Amien Rais, Yusril Ihza Mahendra, Sri Bintang Pamungkas, dan Didin Hafidhuddin. Tujuan acara ini adalah untuk mengetahui kemampuan calon yang ada dari segi orasi, penguasaan tema, dan pemberian solusi pada masalah bangsa dan negara.

Meski sudah diatur dalam undang-undang, namun keberadaan acara debat ini selalu menimbulkan pro dan kontra. Masalahnya, karena acara ini diprediksi dapat menaikkan elektabilitas calon Presiden bila mampu memukau pemirsa. Tetapi, bila calon yang ada kurang memahami masalah dan grogi di panggung maka elektabilitasnya bisa anjlok. Nah di sinilah yang membuat masalah perdebatan Capres ini selalu mengundang perdebatan.

Nah, untuk mengupas masalah itu, berikut pendapat dua anggota MPR:

Mardani Ali Sera Anggota MPR Fraksi PKS

Pengaruh Debat Melebihi Medsos



MENJELANG Pemilu Presiden (Pilpres) biasa diadakan secara resmi dan disiarkan oleh media televisi, serta media yang lain, acara debat calon Presiden-Wakil Presiden. Dalam debat ini pasangan capres/cawapres mendapat kesempatan membacakan, menguraikan, dan menjelaskan visi dan misi yang dijanjikan kepada masyarakat dan akan dilaksanakan bila mereka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Debat calon Presiden yang dirintis sejak

1999 di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, menurut anggota MPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, merupakan acara penting. Menurut alumni Universitas Indonesia itu, debat calon Presiden merupakan kegiatan yang diamanatkan oleh undang-undang, dan juga dapat menjadi sarana atau mengarahkan kampanye pada kampanye yang substansial. Kampanye yang ideal lewat debat inilah bisa terwujud.

Mardani mengakui, sebelum debat dilaksanakan, politikus, pengamat, dan

masyarakat bising dengan tema-tema yang sifatnya tidak substansi. Untuk itulah dalam debat, dalam kegiatan ini harus memaksa pasangan yang ada untuk mendiskusikan substansi di hadapan penonton yang ada di manapun berada.

Kegiatan semacam ini, menurut pria berdarah Betawi, itu bisa meningkatkan elektabilitas calon Presiden-Wakil Presiden. Dia mencontohkan Pilkada Jakarta pada 2017 di mana saat itu ada tiga pasangan calon, yakni Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Dari debat calon gubernur yang ada, pasangan Anies-Sandi bisa terangkat karena dia berhasil memukau penonton. Jadi, menurut Mardani, pengaruh debat cukup kuat, yakni nomer dua setelah pasangan calon melakukan kampanye, safari ke berbagai tempat. Bahkan bisa dikatakan pengaruh debat berada di atas media sosial. Untuk itulah maka debat calon Presiden harus dipersiapkan dengan baik bagi pasangan calon karena media ini sangat efektif.

Dalam debat harus mampu membuat pasangan yang ada bisa diajak untuk saling bertukar konsep dan gagasan, sehingga tidak berarti ada pasangan yang dipermalu-

kan. Meski demikian, pada debat yang substansif wajar jika publik menilai ada pasangan calon yang berkualitas dan ada pasangan yang tidak berkualitas.

Mardani menjelaskan, dalam debat yang perlu dilakukan adalah memaparkan tiga hal, yakni arah yang akan dituju dalam visi, peta jalan atau misi, dan kendaran atau sarana yang hendak digunakan atau dipakai dalam program dan aksi. Ketiga hal ini harus terukur dan mempunyai landasan data yang kuat.

Ia menambahkan, ada hal-hal yang bisa menambah daya tarik bagi pasangan calon. Seperti kemampuan membaca Alquran dan menguasai bahasa Inggris. Meski hal ini bisa menambah daya Tarik, namun alumni Universitas Teknologi Malaysia itu mengakui, kemampuan membaca Alquran dan penguasaan bahasa Inggris tidak diatur atau tidak disyaratkan dalam undang-undang dan Peraturan KPU.

Dari debat yang ada, jika KPU memberi

kebebasan pada moderator dan panelis untuk melakukan pendalaman, maka ada peluang bahwa debat calon Presiden menjadi substantif dan bersifat edukatif. Namun, jika terlalu banyak aturan dan pembatasan, Mardani mengkhawatir debat nanti cuma normatif dan seremonial. Kalau ini yang terjadi maka kita berkhianat pada rakyat yang ingin mendapat pemimpin berkualitas. □

AWG

I Gede Pasek Suardika Anggota MPR dari Kelompok DPD

Untuk Mengetahui Kemampuan Calon Presiden

DALAM debat calon Presiden-Wakil Presiden, pasangan calon akan memaparkan program-program yang akan diberikan kepada masyarakat dan dilaksanakan bila dirinya terpilih. Pastinya, program yang ada untuk membawa masyarakat sesuai dengan apa yang dicita-citakan Indonesia merdeka, sesuai Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea IV. Dari acara debat calon Presiden di mana pasangan yang maju menyampaikan visi dan misinya, maka acara itu menurut Anggota MPR dari Kelompok DPD, I Gede Pasek Suardika, menjadi penting. Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, itu mengatakan, debat calon Presiden merupakan salah satu media bagi rakyat, calon pemilih, untuk tahu kemampuan dan kapasitas tentang calon Presiden yang ada.

Dalam debat yang biasa dipandu oleh presenter yang mumpuni atau akademisi yang handal, serta disaksikan oleh jutaan rakyat Indonesia di manapun berada, menurut pria kelahiran Singaraja, Buleleng, Bali, itu mampu mendongkrak atau meningkatkan elektabilitas pasangan calon Presiden. Naiknya elektabilitas dari acara seperti ini, menurut pria yang akrab dipanggil *Bli Pasek*, itu bisa terjadi sepanjang pasangan calon yang ada dapat *men-drive personality* serta mampu mengangkat dan memberi solusi dari isu-isu yang berkembang di masyarakat, isu-isu yang memengaruhi pemilih dalam Pemilu Presiden.

Sebagai manusia yang tak sempurna, apa saja bisa terjadi. Dalam debat pasangan calon



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kepala daerah, ketua organisasi, dan pemilihan ketua ormas, kemampuan mereka bisa terbaca, berkualitas atau tidaknya. Hal demikianlah yang membuat perdebatan dalam debat calon Presiden 2019 perlu dilaksanakan atau tidak, sebab dikhawatirkan ada pasangan yang dipermalukan. Menanggapi pertanyaan, apakah debat calon Presiden bisa mempermalukan salah satu calon? Pasek mengatakan, dalam *terminology*, apapun dapat terjadi karena tidak ada satu pun hal yang tidak dapat terjadi atau tidak terjadi secara 100%.

Menjelang Pemilu Presiden, masyarakat ramai dan adanya tuntutan agar Presiden ataupun Wakil Presiden harus mampu menguasai bahasa Inggris, bisa membaca

Alquran, jadi imam Salat, atau kemampuan lainnya. Ikatan Da'i Aceh bahkan mengundang Prabowo Subianto dan Joko Widodo untuk mengikuti test Alquran. Menanggapi hal demikian, Pasek mengatakan, terkait kemampuan baca kitab suci, dirinya tidak mau menjawab, namun terkait kemampuan bahasa Inggris, ia mengatakan, tidak perlu.

Dari pasangan calon yang ada, yakni Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amien dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Pasek menyebut, mereka adalah putera terbaik Indonesia sehingga debat yang berlangsung beberapa putaran itu akan menarik. Sehingga debat calon Presiden mampu menjadi pembelajaran politik, bukan tontonan biasa. □

AWG

Mbah Sadiman

Pahlawan **Penghijauan** di Lereng *Gunung Lawu*

MBAH Sadiman memang luar biasa. Lelaki tua (70 tahun), warga Dusun Dali, Desa Geneng, Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, ini adalah salah satu dari sedikit orang yang mau berjuang dan berkorban untuk orang lain. Luar biasanya, di era serba digital sekarang ini, di mana kehidupan semakin individualis, justru di sebuah dusun di Wonogori masih ada orang yang mau berbuat dan memikirkan untuk kepentingan orang lain.

tergolong miskin dari ekonomi, tapi dia memiliki sifat dan sikap yang istimewa. Mbah Sadiman adalah petani yang mendarmabaktikan hidupnya untuk memperbaiki lingkungan di wilayahnya. Selama puluhan tahun, dengan kemauan sendiri, Mbah Sadiman menanam ribuan pohon di areal hutan milik negara.

Seiring berjalannya waktu, ternyata dia telah melakukan penghijauan seluas sekitar 100 hektar di wilayah perbukitan di lereng

merupakan sumber air yang tak pernah kering untuk keperluan warga masyarakat di sekitarnya.

Namun, kemudian secara perlahan-lahan produksi air dari lereng kedua bukit itu semakin berkurang, dan bahkan kering, terutama di saat musim kemarau tiba. Keadaan itu bukan saja membuat warga masyarakat di sana kesulitan air bersih, namun juga bukit yang gundul bisa berubah menjadi sumber bencana longsor di kala



Istimewanya pula dia bukan lagi tergolong generasi muda, namun gaek yang kulitnya mulai keriput dan giginya sudah banyak tanggal, ini punya semangat menyala-nyala. Bersama istrinya, Mbah Sadiman masih sanggup naik turun bukit, laiknya para pecinta alam. Mbah Sadiman adalah potret warga masyarakat kebanyakan di desanya. Sehari-hari hidup sebagai petani penggarap di lahan tumpang-sari pada areal Perhutani.

Hanya saja Mbah Sadiman memiliki kelebihan dibanding rekan-rekannya sesama petani. Sebagai petani yang

Gunung Lawu sisi tenggara, atau terletak sekitar 100 km dari Kota Solo. Atau meliputi wilayah bukit Gendol dan Ampyang yang berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bukan hanya menanam, tapi juga merawat, termasuk menyulami atau menanam lagi jika ada tanaman yang mati.

Sebetulnya, apa yang dilakukan oleh Mbah Sadiman ini tak lain ingin mengembalikan kondisi kedua bukit yang dihijaukan itu sebagai sumber air yang melimpah. Dahulu, ketika masih kecil, Mbah Sadiman tahu persis bahwa bukit Gendol dan Ampyang

musim penghujan.

Itulah yang menggerakkan hati Mbah Sadiman untuk berbuat sesuatu buat kepentingan masyarakat desanya. Meski ia tahu kerusakan hutan di kawasan bukit Gendol dan Ampyang itu akibat ulah masyarakat setempat. Dia juga menyadari masyarakat terpaksa menjarah kayu di hutan karena terdesak oleh kebutuhan hidup. Puncak kerusakan lingkungan di kawasan itu terjadi pada 1964 ketika terjadi kebakaran hutan yang melalap sisi kedua bukit tersebut.

Mbah Sadiman agaknya tak peduli dengan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

semua itu. Dia begitu gelisah hutan gundul kok dibiarkan selama bertahun-tahun. Akibat dari itu, mata air sebagai sumber kehidupan semakin kritis. Tanaman menjadi meranggas, manusia dan ternak kesulitan mendapatkan air bersih. Melihat kenyataan itu, hati Mbah Sadiman “berontak.” Lingkungan di kawasan bukit Gendol dan Ampyangan harus kembali seperti sedia kala.

Atas kemauan sendiri Mbah Sadiman pun melakukan penghijauan. Meski kemudian pemerintah mengambil sikap, melakukan penghijauan kembali dengan membuat kawasan bukit Gendol dan Ampyangan menjadi hutan produktif. Jenis pohon yang digunakan untuk penghijauan itu adalah pinus. Namun ternyata, hutan pinus tak cukup mampu untuk menanggulangi krisis

air bersih. Buktinya, saat musim hujan tiba terjadi banjir, dan begitu musim kemarau datang warga kekurangan air.

Pohon pinus ternyata tak bisa mencegah erosi, dan tak mampu menyimpan air dalam jumlah banyak. Mbah Sadiman pun putar otak. Dia kemudian berpaling ke pohon beringin. Dia tahu pohon beringinlah yang mampu mencegah erosi dan menyimpan air. Untuk mendapatkan pohon beringin, Mbah Sadiman harus merogoh koceknya sendiri. Dia menukarkan dua pohon cengkeh yang dia semai sendiri dengan sebatang pohon beringin.

Pohon-pohon beringin itu, oleh Mbah Sadiman ditanam di tanah yang tak ada tanamannya, di sela-sela pohon pinus. Selama lebih duapuluh tahun ia melakukan

pekerjaan itu dengan suka rela, tanpa bantuan dari siapa pun. Tidak kurang dari 11 ribu pohon beringin telah dia tanam. Tidak hanya menanam, melainkan juga merawat, menyulami kalau ada pohon yang mati, hingga akhir pohon-pohon beringin itu tumbuh menjadi besar.

Untuk melakukan itu semua Mbah Sadiman rela hidup seadanya. Dia tak memikirkan membeli baju baru, selama baju lama masih bisa dipakai. Tapi, perjuangannya yang begitu besar, kini hasilnya bisa dinikmati oleh penduduk yang bermukim di puluhan dusun dan ratusan warga di lereng Gunung Lawu. Mata air yang sebelumnya mati kini mengalir kembali air bersih. Sawah sudah berkecupan air, dan ternak tak lagi kehausan. □

MBO

Biografi Kaya Motivasi dan Testimoni

Sebuah buku berkisah wartawan menjadi politisi. Buku berjudul: “Bambang Soesatyo Dari Wartawan ke Senayang” ini membeberkan tentang success stories dari Bambang Soesatyo. Isinya, kaya akan motivasi dan penuh testimoni.

TIDAK sedikit wartawan yang menjadi wakil rakyat. Di antara mereka adalah Bambang Soesatyo. Bisa jadi tidak banyak yang tahu kalau pria yang saat ini menjadi Ketua DPR ini pernah menekuni profesi yang pada zaman dulu disebut *kuli tinta*. Namun, begitu ia menulis biografi dengan judul *Bambang Soesatyo Dari Wartawan Ke Senayan*, semua orang membuka mata dan bergumam: “o... pernah jadi wartawan ya Ketua DPR itu”.

Buku setebal 280 halaman dan diterbitkan oleh *Gramedia Pustaka Utama* itu dalam *prolog* ditulis bahwa biografi dari pria yang akrab disapa Bamsoet itu dirintis oleh Derek Manangka. Derek adalah rekan Bamsoet saat sama-sama di *Harian Prioritas* dan *Majalah Vista* (1986-1988). Karier Derek tak hanya di dua media cetak itu, namun juga di *Sinar Harapan*, *Media Indonesia*, *RCTI*, dan *RMOL*. Malang melintangnya di dunia kewartawanan itulah yang membuat Derek, pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara, disebut sebagai wartawan senior. Namun, dalam perjalanan penulisan, Derek mangkat sehingga untuk melanjutkan penulisan buku itu dibentuklah tim. Tim baru pengganti Derek adalah Wina Armada, Nano Bramono, Heru Subroto, dan Bobby Batara. Pria-pria dewasa itu selain rekan akrab Bamsoet, mereka juga berkecimpung dalam dunia pers. Bahkan Wina Armada pernah menjadi Pimred *Harian Merdeka*. Tim baru inilah yang akhirnya menyelesaikan kisah perjalanan dari pria yang pernah aktif di berbagai organisasi pemuda dan mahasiswa.

Buku bersampul wajah Bamsoet itu, di luar prolog ada 6 Episode (bab) yang mengupas dirinya. Pada halaman 27, *Episode Bamsoet & Media*, halaman 75 *Bamsoet & Hobi*, halaman 121 *Bamsoet & Organisasi*, halaman 165 *Bamsoet & Bisnis*, halaman 207 *Bamsoet & Politik*, dan halaman 249 *Episode Bamsoet & Posisi Ketua DPR*.

Dalam pengantar *Episode Bamsoet & Media*, ditulis bahwa pria ini sesungguhnya tidak bercita-cita menjadi dokter. Pria yang pernah menjadi Wasekjen PB HMI itu sejak SMP, SMP Negeri 49 Jakarta, ingin menjadi dokter. Untuk itulah saat SMA, SMA Negeri 14 Jakarta, ia memilih jurusan IPA. Namun, pikirannya berganti saat dirinya kuliah di Akademi Akuntansi Jayabaya. Dinamika kemahasiswaan di kampus yang beralamat di Pulomas, Jakarta, itu bisa jadi yang menggeser pikirannya dari ingin menjadi dokter beralih ke dunia yang lain.

Karier di dunia wartawan, pastinya diawali dengan mengikuti pelatihan jurnalistik di kampus, kemudian menjadi bagian pers kampus hingga akhirnya dipercaya menjadi Pimred *Majalah Jayabaya*.

Sebagai aktivis pers kampus, ia tak hanya sibuk meliput kegiatan dan peristiwa yang terjadi di tempat kuliahnya, namun juga bergaul, istilah yang sering digunakan dalam buku itu, dengan aktivis pers kampus dari perguruan tinggi lain. Bukti dari pergaulan, ia bersama dengan yang lain mengadakan kegiatan semacam seminar pers kampus nasional. Hadir dalam acara itu Ketua PWI Jakarta Nasruddin Hars, Panda Nababan, dan Derek Manangka. Ketiga wartawan inilah yang menjadi pintu masuk bagi Bamsoet dalam dunia pers yang sesungguhnya.

Selepas kuliah, akhirnya dia malang melintang, pindah dari satu media ke media lain. Tercatat pernah menjadi awak media, baik sebagai wartawan, sekretaris redaksi, dan pemred di *Harian Prioritas*, *Majalah Vista*, *Majalah Info Bisnis*, dan *Harian Suara Karya*. Sebagai bukti dirinya wartawan beneran, dalam buku berwarna putih itu disertakan foto bagaimana ia memburu Bob Hasan, Akbar Tanjung, Siswono Judohusodo, penata rambut Rudy Hadisuwarno, serta narasumber lain.

Sebagai manusia yang tidak berpijak pada satu titik, ia melakukan banyak hal sehingga dunia yang dirambah tak sekadar tulis-menulis. Dunia lain yang digeluti itulah yang juga meroketkan dirinya ke pentas politik nasional. Sisi-sisi lain pun terungkap dalam buku itu, episode hobi, organisasi, bisnis, dan politik.

Sebagai biografi yang membeberkan *success stories*, dalam buku yang menyelipkan ilmu kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada itu tak hanya mengalurkan cerita perjalanan Bamsoet. Di buku itu juga termuat kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh

besar yang kalimatnya memotivasi para pembaca. Seperti pada halaman 35 termuat kata mutiara dari Sun Tzu yang mengatakan, *jika yakin perang akan menghasilkan kemenangan, anda harus bertempur meskipun aturan melarangnya*. Demikian pula pada halaman 109, yang termuat ungkapan dari Albert Einstein berbunyi, *keberhasilan ditentukan 99% perbuatan dan hanya 1% pemikiran*.

Bamsoet tak hanya memotivasi pembaca dari bukunya, di buku itu, dia juga mendapat motivasi, pujian, dan dorongan dari rekan, masyarakat, tokoh pers, kaum profesional, politisi, dan pejabat negara. Di antara puluhan tokoh dan rakyat yang memberi testimoni adalah Surya Paloh, Don Bosco Selamun, Ponco Sutowo, Japto Soerjosoemarno, Budi Waseso, Agung Laksono, dan Aburizal Bakrie. Dalam testimoni, Aburizal Bakrie menulis, ... *Bamsoet selalu nakal. Cuma kenakalan Bamsoet setelah dewasa, berkeluarga, dan jadi Ketua DPR berbeda dengan ketika dia masih muda*. □

AWG



Peringatan Hari Pers Nasional



Pers Perjuangan dan Perjuangan Pers Indonesia

Hadirnya pers merupakan sarana efektif untuk mengabarkan semua hal. Berita yang disajikan bisa membawa perubahan, bahkan revolusi di sebuah negara. Dalam prinsip dasar pers ada dogma bahwa berita yang diturunkan harus berimbang tanpa memihak karena perbedaan politik, agama, dan etnis. Namun, praktik ketidakseimbangan berita sudah terjadi pada masa kolonialisme. Pembuangan Soekarno ke Bengkulu tidak disiarkan oleh kantor berita Belanda. Pada masa itu, pers yang digawangi oleh wartawan pejuang hadir untuk menentang kolonialisme dan membangun keseimbangan berita.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



Monumen Nasional (Monas)

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PADA 2 Desember 2018 kawasan Monumen Nasional (Monas) *memutih* oleh jutaan massa yang mengikuti Reuni 212. Ada menyebut jumlahnya mencapai 11 juta orang, mereka memadati kawasan yang bersebelahan dengan Stasiun Kereta Api Gambir. Bahkan, meluber hingga Jalan Sudirman, Thamrin, Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Timur, serta jalan lain yang mengarah ke lokasi yang dulu dikenal sebagai Lapangan Ikada Jakarta. Ini adalah acara untuk memperingati aksi bela Islam yang cukup fenomenal yang terjadi pada 2 Desember 2016, yang dikenal dengan aksi 212.

Dilihat dari segi *magnitude* atau besarnya peristiwa itu dari segi jumlah peserta, seharusnya menjadi berita besar di media massa. Setidaknya head line di halaman muka, namun ternyata sebagian besar media massa, termasuk media mainstrim, tidak menganggap itu berita penting. Atau, kalau toh peristiwa itu diberitakan hanya ditempatkan di halaman dalam, berupa berita kecil saja. Dari puluhan stasiun televisi, tercatat hanya dua stasiun televisi yang melakukan siaran langsung. Dari puluhan media cetak berkala nasional, hanya satu yang menjadikan sebagai *headlines*, dan satu, dua, media memberitakan namun berada di halaman belakang dalam skala

kecil, seperti tak penting.

Minimnya pemberitaan dan tak antusiasnya para pemburu peristiwa terhadap peristiwa yang memecahkan rekor dari jumlah peserta itu, tentu menjadi tanda tanya bagi sebagian kalangan. Kenapa peristiwa yang memiliki nilai berita yang demikian tinggi tidak ada liputan yang masif. Beda dengan peristiwa lain, misalnya OTT kepala daerah, semua media memburu kejadian dan berlomba untuk paling cepat menyajikan berita.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Sujarwanto Rahmat Arifin, dalam *nasional tempo.co*, 5 Desember 2018, mengatakan, lembaganya berhak mengingatkan atau

mengirim surat edaran yang menyadarkan kembali peran dan fungsi media. Menurut Sujarwanto, salah satu fungsi lembaga penyiaran adalah media informasi. Jadi, jika ada media yang tidak menginformasikan suatu peristiwa yang layak diketahui oleh masyarakat dan berdasarkan *news value*, skala peristiwa/magnitudenya layak, KPI patut menduga media tidak menjalankan fungsinya sebagai media massa. Tidak berjalannya fungsi sebagai media massa, menurut Sujarwanto, menjadi preseden buruk terhadap independensi media di Indonesia. Bila masalah ini tidak disikapi akan menjadi pertanyaan mengenai independensi



Sujarwanto Rahmat Arifin



dan kebebasan pers di negeri ini.

Bagi wartawan pemula, atau orang yang kali pertama mengikuti pendidikan dasar jurnalisme atau mahasiswa yang menempuh pendidikan di jurusan jurnalistik atau publisistik, pasti ia akan diberi dasar-dasar penulisan media massa. Banyak buku dan pakar yang mengurai soal dasar-dasar jurnalistik, namun semuanya memiliki tolok ukur yang sama, yakni mencari berita yang benar, independen, menyediakan ruang kritik dan komentar, dengan berita yang komprehensif dan proporsional.

Bila para wartawan tidak memberitakan produksi beritanya sesuai dengan dasar-dasar jurnalistik maka ia telah mengingkari

pertama. Sebutan surat kabar nasional pertama disematkan pada *Medan Prijaji* sebab ia menggunakan bahasa Melayu (bahasa Indonesia) sebagai pengantar. Alasan lain yang menyebabkan surat kabar itu dikatakan sebagai surat kabar nasional pertama, bisa jadi dilandasi faktor seluruh pekerja mulai dari pengasuh, percetakan, penerbitan, dan wartawannya adalah kaum pribumi, Indonesia asli.

Dalam edisi perdana, Tirta yang sebagai pemimpin redaksi, di halaman pertama atau cover, menurunkan delapan asas *Medan Prijaji*. Kedelapan asas itu adalah memberi informasi, menjadi penyuluh keadilan, memberikan bantuan hukum, tempat orang

pembaca dan masyarakat adalah *Konsultasi dan Penyuluhan Hukum*. Rubrik inilah yang mampu mendongkrak dan mempopulerkan surat kabar ini hingga mampu mengikat pelanggan mencapai 2.000 orang. Pelanggan sebanyak itu menunjukkan kondisi yang bagus bagi surat kabar pada masanya.

Medan Prijaji memosisikan sebagai penyuar keadilan. Kebijakan pemerintah kolonial yang dirasa memberatkan rakyat, apalagi tidak adil, akan dikupas dan diulas di sini dengan investigasi dan penulisan yang *blak-blakan*. Bukti dari tulisan memperjuangkan keadilan dan kebenaran dari surat kabar ini adalah perkara di Kawedanan



sesuatu yang hakiki. Sebagai para pelaku dan penggerak media massa seharusnya perlu belajar dari para pendahulu yang menjadikan pers sebagai alat perjuangan, serta berpihak pada rakyat.

Mulai Agustus tahun 1744, di Nusantara sudah ada surat kabar pertama yang bernama *Bataviaasche Nouvelles*. Bermula dari surat kabar ini, selanjutnya disusul oleh surat kabar terbitan lainnya, seperti *Bataviasche Courant* dan *Bataviasche Advertentieblad*. Dilatari berbagai masalah yang ada, koran pada masa itu pun timbul tenggelam. Ada yang tidak terbit lagi, namun ada pula yang muncul surat kabar baru.

Hingga akhirnya pada Januari 1907, di Bandung, terbitlah *Medan Prijaji*. Surat kabar yang didirikan oleh Tirta Adhi Soerjo ini disebut sebagai surat kabar nasional

tersia-sia mengadakan masalah, lowongan kerja, menggerakkan bangsanya untuk berorganisasi dan mengorganisasikan diri, membangun dan memajukan bangsanya, serta memperkuat bangsanya dengan usaha perdagangan.

Delapan asas yang berpihak pada rakyat itu bisa jadi karena latar belakang Tirta sebagai aktivis pers dan perjuangan. Sebelum mendirikan *Medan Prijaji*, ia telah menerbitkan surat kabar *Soenda Berita*. Sebagai aktivis kemasyarakatan, Tirta merupakan salah satu pendiri Sarekat Dagang Islam bersama Samanhudi. Organisasi ini selanjutnya menjadi Sarekat Islam yang merupakan organisasi pergerakan yang sangat masif di tahun 1900-an.

Sebagai surat kabar pada zamannya, salah satu rubrik yang paling disukai

Gangkrej, Purworejo. Berita berbunyi: "... ada persekongkolan melanggar hukum antara Aspirant Controleur Purworejo, A. Simon, dengan Wedana Tjorosentono mengenai pengangkatan lurah Desa Bapangan. Persengkongkolan melanggar hukum sebab lurah ini tak mendapat dukungan warga. Sedang calon lurah lain, yakni Soerodimedjo, yang memenangi Pilkades, selain tidak disahkan sebagai lurah, ia juga ditangkap dan dikenakan hukuman *krakal*, hukuman di bawah 3 bulan."

Ketidakadilan hukum dan demokrasi ini membuat *Medan Prijaji* terpanggil untuk memberitakan sembari membela yang benar. Di tulisan yang muncul, No. 19 tahun 1909, persekongkolan atau penyalahgunaan wewenang dua pejabat itu disebut sebagai *monyet penetek* atau ingusan. Sikap Tirta



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

itu dibela 236 warga Bapangan dengan siap pasang badan kalau ia dikenai hukuman.

Keberpihakan pers pada perjuangan bangsa, juga diperlihatkan para wartawan pada masa selepas Indonesia merdeka. Keinginan penjajah, Belanda, untuk kembali bercokol di Indonesia merupakan ancaman bagi seluruh komponen bangsa, termasuk para wartawan. Untuk ikut mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta, para wartawan ada yang ikut mengangkat senjata.

Sebagai salah satu alat untuk membangkitkan semangat perjuangan sambil memberitahukan kondisi tanah air di masa-masa genting, puluhan wartawan pada 9 hingga 10 Februari 1946 berkumpul di Balai Pertemuan Sono Suko, Surakarta (Solo).

Mereka yang hadir di kota budaya itu antara lain: Sjamsuddin Sutan Makmur dari *Harian Rakyat*, B.M. Diah dari *Harian Merdeka*, Abdul Rachmat Nasution dari *Antara*, Ronggodanukusumo dari *Suara Rakyat*, Mojokerto; Mohammad Kurdie dari *Suara Merdeka*, Tasikmalaya; Bambang Suprpto dari *Penghela Rakyat*, Magelang; Sudjono dari *Surat Kabar Berjuang*, Malang; dan Suprijo Djojopadmo dari *Surat Kabar Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta.

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan, membentuk organisasi yang menghimpun wartawan dengan nama *Persatuan Wartawan Indonesia* (PWI). Untuk mengemudikan organisasi itu maka dipilih Sumanang Surjowinoto sebagai ketua, dan Sudarjo

Tjokrosisworo sebagai sekretaris. Pada saat itu, organisasi didirikan guna ikut berjuang menentang kolonialisme lewat media, tulisan, dan berita.

Sebelum PWI terbentuk, menurut sejarah pers di Indonesia sudah ada berbagai macam organisasi yang menghimpun para wartawan. Tujuan mereka, satu dengan yang lain, adalah sama, yakni menentang kolonialisme, mengabarkan kejujuran, dan keseimbangan berita. Ketidakseimbangan berita sudah dirasakan oleh bangsa Indonesia, terutama oleh para wartawan pejuang, pada tahun 1930-an. Pada masa itu ada kantor berita Belanda yang bernama *Aneta* (*Algemeen Nieuws-en Telegraaf Agentschap*) berdiri April 1917. Namun, sangat disayangkan, berita-berita yang dikabarkan oleh *Aneta* berpihak kepada pemerintah kolonial. Akibatnya, berita yang

muncul menjadi tidak seimbang. Soebagijo menulis dalam sebuah buku: *bahwa segala sesuatu yang terjadi di kalangan bangsa Indonesia, terutama mengenai kegiatan gerakan kebangsaan, sama sekali tidak pernah mendapat tempat atau diberitakan Aneta.*

Melihat hal demikian, muncul keprihatinan dari para wartawan pejuang. Keprihatinan yang ada membuat para wartawan, seperti A.M. Sipahoetar, Soemanang, Adam Malik, dan Pandoe Kartawigoena, berdiskusi dan berembung bagaimana menghadapi *Aneta* yang sering dan suka membuat berita yang mengabaikan fakta sesungguhnya. Agar berita yang beredar di Hindia-Belanda dan Eropa tentang kondisi sosial, politik, dan ekonomi, mengabarkan dari sisi yang lain, tidak hanya versi *Aneta*, maka mereka membentuk kantor berita pada 13 Desember 1937. Kantor berita kemudian diberi nama *Antara*.

Hadirnya *Antara* membuat berita yang beredar di masyarakat menjadi seimbang. Sehingga ada yang menyebut *Antara* merupakan rival *Aneta*. Mungkin tidak ada kabar yang beredar tentang pembuangan Soekarno dari Ende Pulau Flores ke Bengkulu Pulau Sumatera, 1938 kalau saja tidak ada *Antara* yang menyiarkan berita itu hingga Hindia Belanda dan Eropa. Demikian pula perjuangan Husni Thamrin yang tidak diberitakan di *Aneta*, tapi muncul di *Antara*. □

AWG/dari berbagai sumber





Di Bawah Bayang-Bayang Pembunuhan dan Breidel

Bekerja di media massa, bila mengungkap fakta kebenaran akan menghadapi banyak risiko, berupa pembunuhan atau pembreidelan. Risiko itu dialami oleh Jamal Khashoggi. Di Indonesia, hal seperti itu sudah terjadi pada masa kolonialisme.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

HUBUNGAN antara Turki dan Arab Saudi beberapa bulan lalu memanas. Masalahnya, negara yang penduduknya sama-sama mayoritas Muslim itu terlibat cecok soal kematian wartawan, Kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi. Sebagaimana diberitakan, Jamal terbunuh saat mengunjungi Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, untuk mengurus sesuatu hal. Kematian yang tidak wajar itu membuat Turki berusaha mengungkap siapa dalang di balik pembunuhan yang dilakukan dengan cara mengerikan, korbannya dimutilasi. Awalnya,

Arab Saudi tidak mengakui kematian Jamal terjadi di konsulatnya. Namun, berkat tekanan dunia internasional, perlahan-lahan negeri kaya minyak itu mengaku bahwa peristiwa itu memang terjadi di wilayah hukumnya.

Pembunuhan dilakukan terhadap mantan Pemimpin Redaksi *Al Arab News Channel* itu, ditengarai karena ia selalu mengkritik kebijakan pemerintahan Kerajaan Arab Saudi, terutama tentang ulah Putera Mahkota. Kritik itu dinilai terlalu pedas, bisa jadi membuat pihak yang dikritik merasa tak nyaman dengan berita yang ditulis. Dari

sinilah, entah siapa dalang pembunuhan itu, akhirnya pria berjanggut putih itu meninggal secara tak wajar.

Nasib serupa dialami oleh Wa Lone dan Kyaw Soe Oo. Dua wartawan *Reuters* yang berada di Myanmar itu dijatuhi hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Myanmar. Mereka dijebloskan ke penjara karena dituduh membocorkan rahasia negara. Benarkah demikian? Dari pengakuan Pemimpin Redaksi *Reuters*, Stephen Adler, dua wartawannya diberlakukan seperti demikian karena negerinya Aung San Suu Kyi itu ingin membungkam kebenaran. Sebagaimana diketahui, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo dalam pemberitaannya menulis dan mengupas masalah pembantaian Muslim Rohingya. Terungkapnya pembantaian inilah yang membuat pemerintahan Myanmar merasa kesal. Akibat tulisan itu membuat dunia internasional mengisolasi Myanmar. Sebagai gantinya, penguasa di sana menjebak dua wartawan itu dengan tuduhan membocorkan rahasia negara.

Menurut laporan tahunan yang dikeluarkan *Committee to Protect Journalist*, sepanjang 2018, ada 53 wartawan meninggal dunia. Dari 53 wartawan yang terbunuh itu, 34 orang di antaranya terjadi di bulan Desember. Jumlah ini meningkat dibanding 2017 yang mencapai 47 wartawan. Kematian wartawan ini diduga terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka mengalami pembunuhan atau terbunuh saat melakukan tugas di daerah konflik yang tingkat kematiannya sangat tinggi, seperti di Afghanistan.

Peristiwa pembunuhan terhadap wartawan juga terjadi di Indonesia, di antaranya menimpa wartawan *Harian Bernas*, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin. Peristiwa yang terjadi pada Agustus 1996 itu diduga karena pria yang akrab dipanggil Udin itu melakukan tugas-tugas



sebagai jurnalis, atau seperti wartawan-wartawan di atas.

Membungkam kebenaran, meminjam istilah Adler, bila tidak dengan melakukan cara-cara keji, pembunuhan, pemerintah yang berkuasa juga menggunakan perangkat hukum yang ada. Pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia, tumbuh silih berganti organisasi wartawan, seperti *Inlandsche Journalisten Bond*, *Maleisch Journalisten Bond*, *Inlandsche-Chineesche Journalisten Bond*, *Indische Journalisten Bond*, *Journalisten Bond Asia*, dan *Persatoean Djoernalis Indonesia*.

Mereka mempunyai visi dan misi masing-masing. Ada yang hanya sebagai media

penerbitnya dengan ditandatangani.

Aturan ini 'dimajukan' pada 1906 lewat KB 19 Maret 106 Ind. Stb. No. 270. Aturan ini sangat represif, yakni pencetak atau penerbit diharuskan menyerahkan koran yang telah dicetak kepada pejabat setempat, maksimal 24 jam setelah terbit atau di-edarkan.

Aturan 'lebih dahsyat' muncul pada 7 September 1931 dengan menetapkan *Persbreidel-Ordonantie*. Aturan ini tertuang dalam Staatsblad 1931 Nomor 394 dan Staatsblad 1931 Nomor 44. 'Kebijakan' yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda itu menegaskan, pihak penguasa sewaktu-waktu dapat bertindak terhadap

Pada masa Presiden Soekarno, selepas Dekrit Presiden 5 Juli 1959, untuk mendapat surat izin terbit dan cetak dipersulit. Pada masa ini beberapa majalah, koran, dan tabloid dibreidel oleh penguasa. Majalah *Panji Masyarakat*, pada masa itu dibreidel dengan alasan karena memuat tulisan Mohammad Hatta yang berjudul *Demokrasi Kita*. Tulisan Wakil Presiden ke-2 itu dianggap terlalu tajam kepada pemerintahan Soekarno. Di situ pria asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat, itu menulis bahwa perjuangan demokrasi Indonesia jauh dari hakikat demokrasi yang sebenarnya. Tulisan itu oleh penguasa dinilai bersalah, sebab dianggap memperlemah asas-asas *Demokrasi Terpimpin*.

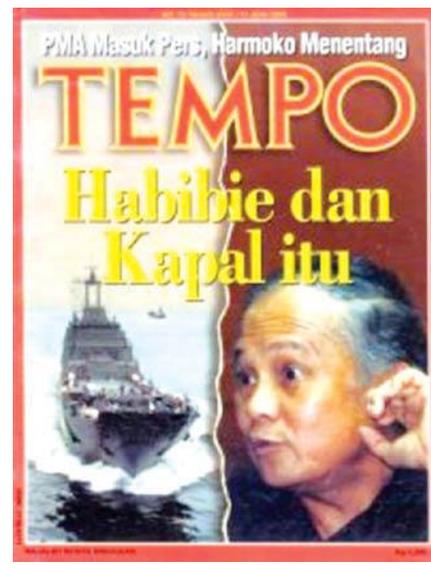
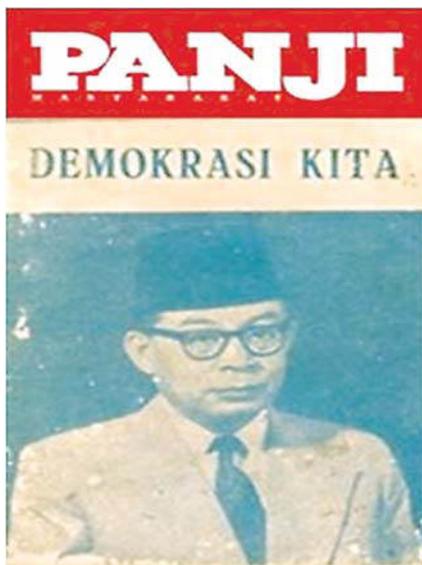


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

hiburan, iklan, dan ada pula sebagai alat untuk menentang kolonialisme penjajahan. Tercatat pada 1855 di wilayah Hindia-Belanda, ada 16 surat kabar berbahasa Belanda dan 12 surat kabar berbahasa Melayu.

Meski semua tidak fokus pada berita politik dan antikolonialisme, namun pemerintah Belanda mengeluarkan aturan yang sifatnya 'jaga-jaga' bila ada surat kabar yang kritis. Buktinya pada 1856, dikeluarkan aturan RR, KB 8 April 1856 Ind. Stb. No. 74. Aturan itu menyebut semua karya cetak sebelum diterbitkan dikirim terlebih dahulu kepada pemerintahan setempat, pejabat justisi dan *Algemene Secretarie* oleh pencetak atau

suratkabar dan majalah yang isinya dianggap mengganggu ketertiban umum. Pihak pencetak, penerbit, dan redaksinya tidak akan diberi kesempatan untuk membela diri atau banding ke pengadilan di tingkat yang lebih tinggi.

Aturan ini sepertinya menjadi 'roh' bagi penguasa selanjutnya bila mereka merasa terganggu oleh berita-berita yang dimuat media massa. Meski *Persbreidel-Ordonantie* dicabut pada 1954 dan diganti dengan UU. No. 23 Tahun 1954 Tentang Pencabutan *Persbreidel-Ordonantie*, namun pembreidelan terhadap surat kabar, majalah, dan tabloid, selalu terjadi dari masa ke masa.

Pembreidelan pun terjadi selepas Soekarno. Pada masa Presiden Soeharto, beberapa media massa ditutup, namun yang paling fenomenal dan menyita banyak perhatian masyarakat adalah pembreidelan *Majalah Tempo*. *Tempo* dua kali mengalami pemberedelan, yaitu pada 1982 dan 1994. Pada tahun 1982, ia dianggap terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru dan Golkar. Sedang pada 1994, majalah ini mengkritik pembelian 39 kapal perang bekas Jerman Timur. Kritik itu dianggap menyinggung Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie dan Presiden Soeharto. □

AWG/dari berbagai sumber

Pers Mahasiswa, Idealis dari Masa ke Masa

Sebagai generasi muda yang penuh idealis, mahasiswa juga mengungkapkan perasaannya lewat pers. Terbukti dari perjalanan sejarahnya, pers mahasiswa mengkritik pemerintah dan kekuasaan. Akibatnya, pers mahasiswa pun mengalami nasib serupa dengan media umum, dan dibreidel.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MAHASISWA Indonesia merupakan entitas yang unik dan berbeda dengan mahasiswa di negara lain. Sebagai generasi muda, mahasiswa Indonesia tak sekadar tekun belajar di kelas dan atau di tempat tinggal, rumah atau kos, namun mereka juga peduli dengan persoalan yang ada di masyarakat, bangsa, dan negara.

Kepedulian mereka terhadap persoalan yang ada, diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti menyampaikan gagasan,

membentuk organisasi, dan membuat surat kabar. Ketiga hal yang menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap bangsa dan negara itu menjadi monumental dan menjadi catatan tersendiri dalam sejarah perjalanan bangsa.

Ketika para pelajar Hindia-Belanda memperoleh beasiswa untuk kuliah di Belanda, pada 1900-an, di sana mereka tak sekadar tekun di kampus, namun juga membentuk organisasi yang dinamakan *Indische Vereniging*. Organisasi ini

selanjutnya menjadi *Perhimpunan Indonesia* (PI). Sebagai organisasi yang peduli akan nasib bangsanya, mereka menyerukan persatuan dengan tujuan untuk mengusir penjajahan yang ada di Hindia-Belanda. Suara keinginan untuk merdeka itu, selain disampaikan dalam forum-forum yang ada, juga dikabarkan lewat majalah yang mereka buat, *Hindia Poetra*.

Di majalah ini memberitakan berbagai hal, seperti kritiknya terhadap *Volksraad* agar parlemen buatan Belanda ini tak sekadar menjadi pendamping pemerintahan Belanda, hingga kritik terhadap sewa tanah industri gula yang menindas kaum tani. Dari waktu ke waktu, media yang dikelola oleh mahasiswa itu semakin berani. Dalam *Indonesia Merdeka*, pengganti *Hindia Poetera*, mereka menyeru agar seluruh bekas jajahan Belanda di Hindia-Belanda merdeka dan menjadi Indonesia.

Meski Indonesia sudah merdeka, sikap kritis mahasiswa terhadap masalah yang ada tetap muncul dan salah satu bentuknya disuarakan lewat terbitan yang dibuatnya. Aktivitas ini selanjutnya disebut dengan *pers kampus* atau *pers mahasiswa*. Setelah Belanda tidak lagi menguasai Indonesia, lewat Konferensi Meja Bundar 1949, maka suasana keamanan dan pertahanan Indonesia menjadi stabil. Kondisi yang demikian membuat situasi politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial berkembang. Perguruan tinggi pun didirikan oleh pemerintah. Pada 19 Desember 1949 lahirlah Universitas Gadjah Mada.

Meski baru berdiri dan masih kuliah di Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta, namun mahasiswa yang kuliah di kampus itu antusias membuat majalah. Dari hasil diskusi di antara mereka, majalah yang diterbitkan itu dinamakan *Majalah Gajah Mada*. Selama mereka hadir di tengah civitas





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

akademika dan masyarakat, banyak kabar yang disiarkan yang semuanya bermuara pada pemantapan masalah kebangsaan.

Gadiah Mada hadir tak sekadar meliput peristiwa dan kemudian mewartawakan, namun juga berupaya untuk mengembangkan sumber daya wartawan mahasiswa, sekaligus menyatukan mereka. Pada 6 hingga 10 Agustus 1955, mereka menjadi pelopor konferensi pers mahasiswa pertama di Indonesia. Lewat Konferensi I Pers Mahasiswa yang diselenggarakan di Kaliurang, Yogyakarta, lahirkan *Serikat Pers Mahasiswa Indonesia* (SPMI) dan *Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia* (IWMI). Pada Konferensi II Pers Mahasiswa yang digelar pada 16 hingga 19 Juli 1958, SPMI dan IWMI difusikan menjadi *Ikatan Press Mahasiswa Indonesia* (IPMI).

Sebagai organisasi mahasiswa yang penuh idealisme, IPMI berdinamika. Pada 1965 di tengah situasi memanasnya pro dan kontra komunis, IPMI mampu menerbitkan berbagai tabloid dan majalah, pada durasi 1965-1968, seperti *Mingguan Mahasiswa Indonesia* dan *Harian KAMI* yang beredar di Jakarta, *Mahasiswa Indonesia* edisi Bandung, dan *Mingguan Mimbar Demokrasi*, *Mahasiswa Indonesia* edisi Yogyakarta, dan *Muhibbah* Universitas Islam Indonesia (UII), *Mimbar Mahasiswa* edisi Banjarmasin, *Mingguan KAMI* di Kalimantan Barat, *Mingguan KAMI* edisi Jawa

Timur diluncurkan di Surabaya, dan *Gelora Mahasiswa Indonesia* di Malang. Dalam terbitan itu mereka mengabarkan berita-berita yang sifatnya mengkritik demokrasi terpimpin yang dijalankan Presiden Soekarno.

Sebagai mahasiswa, idealisme mereka tak tergadaikan. Meski kekuasaan berganti, sikap mereka tak berubah, tetap kritis. Pada era pemerintahan Soeharto, pers mahasiswa tetap menjalankan fungsi yang



sama, yakni mengkritik sesuatu yang dirasa sewenang-wenang dan tak adil. Akibat yang demikian mereka mengalami nasib serupa dengan media massa umum, yakni terkena breidel. Contohnya, selepas Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974, beberapa pers mahasiswa seperti *Mahasiswa Indonesia* dan *Harian KAMI*.

Selepas peristiwa itu ditambah dengan hadirnya kebijakan NKK/BKK membuat pers mahasiswa seolah-olah mati suri. Ada gerakan mahasiswa, namun sepertinya tidak menggunakan surat kabar, tabloid, dan majalah. Mereka beralih pada diskusi kelompok yang membahas sebuah buku atau tema. Pers kampus mulai bernafas kembali pada 1989 dan berpuncak pada Oktober 1992 dengan lahirnya *Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia* (PPMI).

Dibreidel dan ancaman serupa yang dilakukan oleh kekuasaan rupanya tidak membuat mahasiswa jera untuk mengkritik pemerintahan, sehingga di awal lahirnya organisasi baru yang menghimpun pers kampus itu terjadi pembreidelan lagi. Nasib ini dialami oleh *Vokal/IKIP PGRI Semarang*, *Dialogue FISIP Unair Surabaya*, *Arena IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, dan *Focus Equilibrium FE Universitas Udayana Bali*. Nasib serupa dialami oleh *MUHIBAH UII*, *Balairung UGM*, dan *Hayam Wuruk Sastra Undip Semarang*. Media itu diancam pihak rektorat atas berita yang disajikan. Mereka diancam tidak boleh muncul bila masih mengkritik pemerintah.

Pembreidelan yang dilakukan pada kurun waktu 1992-1997 itu tak menghentikan mahasiswa untuk kritis. Pemerintah pun tak menghentikan aksinya, yakni melakukan pembreidelan terhadap pers kampus. Untuk menghadapi perlakuan kekuasaan yang demikian, pers kampus menggunakan siasat menerbitkan media yang dikelola bersama. Siasat yang dilakukan oleh aktivis pers kampus antarperguruan tinggi di Yogyakarta berhasil menerbitkan majalah *Paradigma*, namun lagi-lagi mengalami nasib yang sama. *Paradigma* dibreidel karena kritis pada pemerintah. □

AWG/dari berbagai sumber



Drs. Suroso, M.Si.

Ketua Koordinator DMD MLKI Malang Raya

Dengan Kebudayaan Bisa Satukan Bangsa

INDONESIA kaya akan budaya dan sejak dulu budayalah yang menyatukan bangsa. Sebab, dalam nilai-nilai budaya ada kearifan salah satunya saling menghormati perbedaan. Budaya adalah nilai-nilai nasional yang mampu menyatukan bangsa.

Apalagi di tahun politik 2019 akan sangat gencar perbedaan-perbedaan yang berpotensi konflik. Implementasi budaya dan seni Indonesia sebenarnya bisa menyatukan bangsa, tapi memang harus konsisten dijalankan seluruh rakyat.

Peran pemerintah dan lembaga-lembaga negara juga sangat penting untuk mendukung beragam implementasi budaya dan seni di seluruh Indonesia. Dalam literasi budaya dan kisah-kisah pagelaran seni pasti menyiratkan ajakan untuk kebersamaan serta menghormati apa yang ada di sekeliling kita, antara lain perbedaan-perbedaan atau beragaman apapun itu selagi positif. □

DER

Ibu Sutinah

Penjual sayur pasar Kadipolo Solo

Pemimpin harus Lebih Sering Kunjungi Pasar Rakyat

SAYA rakyat biasa saja seorang ibu penjual sayur di pasar rakyat. Tidak tahu apa-apa tentang politik atau kampanye atau apa. Yang saya paham adalah bagaimana harga-harga kebutuhan pokok untuk rakyat terjangkau, murah, dan juga menguntungkan penjual juga.

Untuk itu, para pemimpin harus sering mengunjungi pasar rakyat. Jadi, para pemimpin tahu harga-harga dan tahu apa yang dikeluhkan oleh penjual kebutuhan rakyat, dan rakyat sebagai pembeli.

Kalau mereka para pemimpin tahu apa yang menjadi masalah, maka akan sangat mudah bagi mereka untuk segera menyelesaikan atau membuat aturan-aturan yang membuat rakyat senang.

Sebab, sebagian besar rakyat, terutama di pelosok-pelosok daerah dan desa masih mengandalkan pasar tradisional sebagai tempat jual beli, dan juga sebagai tempat penghidupan rakyat yang terjangkau. Kalau bisa pasar tradisional diperhatikan dirawat sehingga rakyat bisa nyaman.

Saya sendiri kalau ada pejabat atau siapa saja berkunjung ke pasar ini, saya selalu sampaikan apa saja yang dirasakan rakyat. Entah di dengar atau tidak yang penting sudah saya sampaikan uneg-uneg sebagai rakyat kecil. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Universitas Lampung

Empat Pilar Buah Perjuangan Reformasi Mahasiswa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan bahwa Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) sangat berhubungan erat dengan generasi muda mahasiswa Indonesia.

Kaitan tersebut berawal dari perjuangan fenomenal mahasiswa Indonesia pada 1998 yang membuka era reformasi yang mengantarkan Indonesia memasuki era perubahan dan pembaruan yang luar biasa. Termasuk perubahan elemen penting negara Indonesia, yakni UUD 1945.

Era reformasi juga menumbuhkan pembaruan bentuk pemahaman dan implementasi terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang tidak lagi indoktrinasi. Itu karena kesadaran akan pentingnya empat hal tersebut bagi negara dan rakyat Indonesia.

HNW memaparkan hal tersebut di hadapan seribu lebih generasi muda — yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan Universitas Lampung (Unilai), ditambah perwakilan mahasiswa berbagai perguruan tinggi dan para pelajar sekolah menengah atas dari seputar Lampung – sebagai peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR. Acara itu berlangsung Senin (17/12/2018) di Gedung Serbaguna Unilai, Banda Lampung.

“Untuk itu, menjadi sangat penting generasi muda mahasiswa Indonesia era kekinian untuk selalu semangat dan serius berupaya memahami dan mengimplementasikan Empat Pilar. Salah satunya melalui Sosialisasi Empat Pilar yang diselenggarakan secara masif oleh MPR RI sesuai amanah UU No.17 Tahun 2014,” katanya.

Generasi muda mahasiswa Indonesia era milenial saat ini, lanjut HNW, harus memahami betul-betul bahwa Empat Pilar merupakan hasil perjuangan mahasiswa juga. Dan, kini perjuangan tersebut bukannya berhenti, tapi berlanjut terus di sisi pemahaman dan implementasi.

Negara sendiri, menurut HNW, melihat betapa urgensinya rakyat memahami kembali nilai-nilai yang ada dalam Empat Pilar tersebut. Oleh karenanya, melalui UU MD3, Negara mengamanahkan pada MPR RI untuk melakukan sosialisasi Empat Pilar. Kemudian, MPR melaksanakan amanah itu dengan berbagai metode, ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pemahaman dan implementasi Empat Pilar yang baik oleh generasi muda, kata HNW, akan menjadi benteng dari dampak negative yang ditimbulkan oleh zaman modernisasi, serta perkembangan teknologi yang sangat maju. Serta bisa menjadi filter dalam menghadapi tahun politik, agar tidak terpengaruh untuk saling berkonflik karena beda pilihan.



Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertema 'Generasi Muda, Generasi Penjunjung Tinggi 4 Pilar' diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan BEM Unila. Selain HNW, acara ini juga dihadiri oleh anggota Badan Sosialisasi MPR RI Al Muzzamil Yusuf, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Prof. DR. Bujang Rahman, serta Pimpinan dan anggota BEM Unil

Manfaatkan Potensi Kaum Muda

Dalam paparannya HNW kembali menyinggung tentang sejarah perjuangan bangsa. Di mana, di era perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia, peran serta kaum muda terpelajar sudah teruji dan hasilnya dapat dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia hingga kini.

Semestinya, menurut HNW, kaum muda terpelajar era sekarang harus memiliki peran dan kiprah lebih besar dari para pendahulunya. "Selain berperan dan berkiprah menjaga

kemerdekaan yang telah diraih, kaum muda terpelajar juga harus mampu mengisi kemerdekaan itu untuk menuju Indonesia yang maju dan sejahtera," katanya.

Masih menurut HNW. Saat ini Indonesia akan menghadapi Pemilu 2019, pileg dan pilpres serentak. "Nah, mulai dari situ kaum muda terpelajar mesti berperan aktif menjaga, mengedukasi, serta melakukan sosialisasi bahwa pemilu tidak menghadirkan konflik, tapi menghadirkan anggota legislatif dan pemimpin nasional yang lebih baik," ujar HNW.

Peran kaum muda Indonesia dalam menghadirkan Indonesia yang lebih baik, menurut HNW, juga ditunjukkan secara nyata dengan memilih parpol, wakil rakyat, dan pemimpin nasional yang dinilai berkualitas, dan dirasakan mampu membawa bangsa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Melihat begitu pentingnya peran kaum

muda Indonesia untuk masa depan bangsa dan negara, HNW mengingatkan kaum muda agar jangan memubazirkan potensi kaum muda Indonesia di era modernisasi dan teknologi saat ini.

Kaum muda sekarang memang sangat berpotensi untuk lebih maju, karena didukung oleh situasi kemajuan zaman, mulai dari pendidikan, gadget, teknologi informasi, dunia digital. Jadi, pergunakan itu semua untuk meningkatkan kualitas diri yang kemudian menjadi manusia unggul.

"Jangan mubazirkan potensi yang diberikan Allah SWT sebab mubazir itu perilaku setan," ujar HNW mengingatkan. Untuk itu, dia berpesan, agar generasi muda memanfaatkan potensinya secara maksimal. "Allah SWT menciptakan kondisi dan potensi-potensi itu agar dimanfaatkan secara maksimal untuk meraih kesuksesan," tandasnya. □

DER

warga bangsa untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Sebelumnya, Keuangan Sekretariat Jenderal MPR, Maifrival, selaku panitia pelaksana pagelaran seni budaya ini melaporkan bahwa MPR sudah menyelenggarakan pagelaran seni budaya, terutama wayang kulit, sejak tahun 2015. "Selain untuk Sosialisasi Empat Pilar juga untuk memberi apresiasi dan ikut melestarikan seni budaya daerah, serta memperkuat rasa kebhinnekaan yang sudah terbangun selama ini," ungkap Maifrival.

Dengan pagelaran seni budaya, menurut pria yang biasa disapa Datuk ini, MPR telah melakukan dua hal, yakni Sosialisasi Empat

Pilar dan mendukung pelestarian seni budaya nusantara. "MPR ikut melestarikan dan menjaga budaya leluhur," paparnya.

Sementara Ketua Yayasan AD Centre Gorontalo, Adhan Damba, menyatakan, Empat Pilar ini harus dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya, lanjut Adhan, Empat Pilar erat kaitannya dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. "Artinya, dengan memahami Empat Pilar, kita mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara," katanya.

Selanjutnya acara sosialisasi dengan metode Festival Budaya Islam di Gorontalo ini dimulai, ditandai dengan memainkan alat musik polo palo oleh Elnino M. Husein Mohi

didampingi Adhan Damba, dan Maifrival.

Selain menampilkan beragam seni budaya Gorontalo, acara Festival Budaya Islam ini juga diselingi acara talkshow dengan narasumber Elnino M. Husein Mohi, Adhan Damba, dan Maifrival.

Salah seorang peserta dalam sesi tanya jawab menanyakan, menghadapi pemilu serentak 2019 ini mengapa banyak sekali peraturan baru dan siapa yang membuat? Menjawab pertanyaan itu, Elnino menyatakan, dalam pelaksanaan pemilu serentak nanti semua aturan diatur oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Komisi dan badan itu dibentuk oleh undang-undang. □

JAZ

PSB Malang Jawa Timur

Kisah Parikesit dan Dewi Kunti di Lereng Gunung Kawi

OLEH sebagian besar masyarakat Indonesia, Gunung Kawi dikenal sebagai lokasi wisata 'ritual'. Imaj seperti itu muncul karena sebagian pengunjung melakukan prosesi ritual berbau mistis di sana. Namun, kali ini beda. MPR berkunjung ke sana melakukan ritual lain, yakni memberi pemahaman tentang Empat Pilar MPR melalui suguhan seni budaya Wayang Kulit.

Bertempat di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu malam (24/12/2018), pagelaran wayang kulit dengan lakon 'Kisah Parikesit dan Dewi Kunti' digelar. Lakon yang dibawakan oleh dalang Ki Drs. Sugianto — yang juga menjabat Sekjen Purwo Ayu Mardi Utomo Malang—disambut meriah oleh masyarakat yang bermukim di sekitar lereng Gunung Kawi bagian selatan tersebut.

Pagelaran seni budaya wayang kulit ini adalah salah metode yang digunakan oleh MPR dalam menyosialisasikan Empat Pilar ke berbagai elemen masyarakat Indonesia. Dan, pagelaran wayang kulit di lereng Gunung Kawi ini diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Majelis Luhur



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Selaku panitia penyelenggara sekaligus juga mewakili pimpinan MPR, Kepala Biro Humas Setjen MPR RI, Siti Fauziah, mengungkapkan bahwa pentas seni budaya wayang kulit adalah salah satu metode

penyampaian Sosialisasi Empat Pilar MPR. "Metode ini unik dan sangat efektif, dan dilaku dengan sangat fleksibel disesuaikan dengan seni budaya di masing-masing daerah," ujar Siti Fauziah, yang akrab disapa Bu Titik.

Di Jawa Timur atau Jawa Tengah, lanjut

Kalimantan Timur

Mahyudin: Negara Ini Rusak Karena Korupsi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Mahyudin mengadakan *roadshow* sosialisasi Empat Pilar MPR di Balikpapan dan Samarinda pada 2 – 4 Desember 2018. Mahyudin menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR di sejumlah titik di dua kota di Kalimantan Timur itu. Pada Minggu (2/12/2018), Mahyudin menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR kepada “emak-emak” yang tergabung dalam Himpunan Wanita Karya (HWK) di Aula Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan.

Dalam sosialisasi ini Mahyudin meminta peserta untuk melihat bibit, bebet, dan bobot ketika memilih calon wakil rakyat pada Pemilu serentak 2019. “Menjelang Pemilu 2019, saya mengingatkan, sebelum memilih lihat calon yang mempunyai visi misi yang bagus. Lihat dulu bibit, bebet, dan bobot calon wakil rakyat,” katanya di depan sekitar 200 “emak-emak” HWK. Sosialisasi Empat Pilar ini menghadirkan narasumber Popong Otje Djundjungan (Fraksi Partai Golkar), dan Ketua HWK Ida Prihastuti, serta Camat Balikpapan Selatan.

Mahyudin menyinggung soal memilih

kepala daerah dan wakil rakyat berkaitan dengan salah satu tantangan internal yang dihadapi Indonesia. Tantangan internal itu adalah kurangnya keteladanan sikap dan perilaku sebagian tokoh bangsa.

Kurangnya keteladanan itu tercermin dalam perilaku korupsi. Banyak pemimpin

bangsa kita yang ditangkap karena korupsi. Mahyudin menyebutkan Ketua DPR, Ketua DPD, banyak kepala daerah, anggota DPR, anggota DPRD, yang terkena kasus korupsi. “Negara ini rusak karena korupsi,” ujarnya.

Karena itu, Mahyudin meminta para peserta untuk memilih wakil rakyat yang





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tidak melakukan politik uang atau *money politics*. Sebab, politik uang itulah penyebab terjadinya korupsi. Mahyudin menyebutkan, ketika calon kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dan calon wakil rakyat melakukan *money politics* maka ada dua akibatnya. Yaitu, *pertama*, calon yang melakukan *money politics* ketika kampanye maka jika terpilih dia akan mengembalikan uang yang telah dikeluarkan saat kampanye itu.

Kedua, calon yang melakukan *money politics* maka dia tidak memiliki integritas. "Ketika ingin dipilih dia menyogok rakyatnya maka jika terpilih dia akan mudah disogok," tuturnya. "Dia tidak punya integritas

membangun bangsa ini lebih baik. Dia hanya punya ego untuk kepentingan terpilih," imbuh Mahyudin.

Menurut Mahyudin, *money politics* ini membuat beceknya lapangan demokrasi di Indonesia. "Akibatnya mereka yang memiliki uang bisa terpilih. Maka kapitalisasi terjadi dalam kebijakan. Ini terjadi di pusat dan daerah," jelasnya.

"Demokrasi kita seharusnya mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Tapi, jujur, dalam pandangan saya, bangsa kita tidak siap 100 persen melaksanakan demokrasi pemilihan secara langsung," tambahnya. Beda dengan negara-negara yang

pendapatan per kapitanya di atas 11 ribu dolar maka demokrasi langsung efektif. Sedangkan pendapatan per kapita Indonesia baru 3.500 dolar.

Perumahan Atas Air

Masih di hari yang sama, pada Ahad petang, Mahyudin mengunjungi masyarakat perumahan atas air. Warga masyarakat yang tinggal di sini menempati rumah yang berada di atas permukaan air laut. Perumahan di atas air ini dibangun pemerintah setelah terjadi kebakaran besar perumahan di pesisir pantai itu.

Kepada warga masyarakat perumahan atas air, Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat itu, Mahyudin menyampaikan pesan persatuan menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak pada 2019. Dia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah diadu-domba karena perbedaan pilihan.

"Bapak ibu tidak perlu ribut-ribut dalam pemilihan presiden. Kalau tidak suka jangan dipilih, kalau suka ya dipilih lagi. Gitu aja kok repot," katanya ketika memberi pengantar Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada warga masyarakat peserta sosialisasi.

Mahyudin mengungkapkan, jelang pemilu serentak ini ada pihak-pihak yang mengail di air keruh dan mencoba mengadu-domba rakyat. "Karena itu, kami dari MPR ikut turun ke rakyat memberi pesan persatuan. Karena, saat ini, ada yang kurang di bangsa ini, yaitu rasa toleransi dan solidaritas. Kami turun ke daerah-daerah untuk mengimbau kita jaga persatuan dan kesatuan ini," ujarnya.

Menurut Mahyudin, jika rakyat Indonesia mudah diadu-domba dan bertikai maka akan mudah dijajah negara lain. Indonesia menjadi negara yang tidak damai. Dia memberi contoh apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Banyak rakyat Suriah yang mengungsi ke negara Eropa dan negara-negara lain, karena perang saudara. Pengungsi Suriah hidup susah dan menjadi pengemis di negara lain, seperti di Turki.

"Kita tidak mau ini (perang saudara seperti di Suriah) terjadi di negara kita. Saya punya kepentingan, saya ingin anak cucu nanti bisa hidup dengan damai di negeri ini. Kalau kita bertikai dan diadu domba maka kita dijajah negara asing lagi. Negeri ini tidak bisa





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

damai," papar Mahyudin.

Karena itu, Mahyudin meminta masyarakat untuk tidak mempertikaikan hal-hal yang tidak penting, terutama menjelang Pemilu ini. "Jangan jadikan Pemilu menjadi ajang untuk bertikai," pintanya.

"Jaga persatuan ini. Jangan sampai kita diadu-domba pihak lain. Kami (MPR) hanya mengingatkan dan mengantisipasi secara bersama-sama. Jangan sampai kita seperti Suriah," tambahnya.

Menurut Mahyudin, banyak negara gagal karena diadu-domba. "Karena itu kita jaga persatuan dan kesatuan. Empat Pilar inilah alat pemersatu kita. Kita ingin bangsa yang bhinneka ini tetapi tetap satu jua," pungkasnya.

Pada hari kedua, Senin (3/12/2018), Mahyudin memberikan pengantar sosialisasi Empat Pilar MPR kepada warga kelurahan Muara Rapak, Balikpapan. Sosialisasi ini merupakan kerjasama MPR dengan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPLB) Kota Balikpapan.

Kepada warga masyarakat, Mahyudin mengakui revolusi mental belum berjalan maksimal. Ini bisa dilihat dari mental kita yang mudah diadu-domba, ujaran kebencian serta hoax. "Mental-mental itu harus diubah dengan mental produktif," katanya.

Mahyudin mengingatkan, sasaran revolusi mental adalah perubahan menjadi mental-mental produktif, bukan mental malas, mudah diadu-domba, menyebar hoax dan ujaran

kebencian.

Salah satu kekhawatiran Mahyudin adalah mental generasi muda yang mudah dirusak dengan narkoba. Untuk merusak sebuah bangsa, kata Mahyudin, tidak perlu dengan serangan militer. "Cukup dengan cara merusak generasi muda. Kalau generasi muda rusak, hancurnya sebuah bangsa hanya menunggu waktu," ujarnya.

Bukan hanya dengan narkoba, mental generasi muda juga dirusak dengan budaya asing melalui teknologi semisal *game online*. *Content game online* yang berisi kekerasan bahkan pornografi tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa.

"Itulah perang asimetris atau *proxy war*. Perang yang diwakili. Perang modern ini bukan hanya perang dengan senjata, termasuk perang ideologi, perang dagang. Semua ingin dirusak oleh bangsa asing," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Mahyudin, MPR turun ke bawah sampai ke kelurahan menyosialisasikan Empat Pilar MPR. "Empat Pilar MPR inilah yang menjadi alat pemersatu bangsa untuk membentengi dari *proxy war* itu," ujarnya.

Disibukkan Urusan Politik

Usai menyampaikan sosialisasi di Balikpapan, Mahyudin dan rombongan bergerak ke Kota Samarinda. Setelah bermalam di Samarinda, pada Selasa (4/12/2018), Mahyudin kembali mengadakan sosialisasi Empat Pilar MPR di kota itu. Satu di antaranya adalah sosialisasi Empat Pilar MPR kepada wanita yang tergabung dalam Himpunan Wanita Karya (HWK) Samarinda.

Menurut Mahyudin, salah satu cita-cita dan tujuan Indonesia merdeka adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Alih-alih mewujudkan masyarakat adil dan makmur, Mahyudin mengungkapkan, masyarakat justru disibukkan dengan urusan politik saja. "Saat ini adalah tahap mengisi kemerdekaan. Tapi, selama 73 tahun Indonesia merdeka, masyarakat adil dan makmur belum tercipta. Inilah yang harus kita perjuangkan," katanya.

Mimpi Indonesia merdeka adalah ingin mengantarkan rakyat ke pintu gerbang kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. "Kita sudah berdaulat karena sudah merdeka dari penjajah. Kita sudah bersatu.



Tapi adil dan makmur belum tercipta sampai hari ini. (Masyarakat) adil dan makmur inilah yang kita perjuangkan,” ujarnya.

Mahyudin mengungkapkan masih banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati aliran listrik, belum mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Masih banyak rakyat yang hidup miskin dan tidak mempunyai pekerjaan.

“Tapi hari-hari ini kita disibukkan dengan urusan politik saja. Sehingga mengesampingkan urusan mensejahterakan rakyat, penciptaan lapangan kerja, memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik,” imbuhnya.

Mahyudin mengakui, banyak kendala untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur itu. Apalagi setelah reformasi ketika



keran kebebasan dibuka. “Demokrasi seakan-akan menjadi tujuan. Padahal, demokrasi hanyalah alat untuk mencapai tujuan,” tuturnya.

Akibatnya, lanjut Mahyudin, terjadi hiruk pikuk di atmosfer politik. “Apalagi memasuki tahun 2019, orang yang tidak terlibat dalam Pilpres pun ikut ribut di lapangan,” ucapnya.

“Kita terlalu mudah diadu-domba dan dipolitisasi. Karena itu, saya berpikir setelah 20 tahun reformasi, pemilihan langsung harus dievaluasi kembali. Ketika rakyat tidak siap menimbulkan potensi konflik horisontal, ini harus dievaluasi kembali,” ucapnya. □

BSC



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Mahyudin: Pemilihan Secara Langsung Perlu Dievaluasi

INDONESIA telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden secara langsung. Wakil Ketua MPR Mahyudin berpendapat, pemerintah dan DPR perlu mengevaluasi pelaksanaan pemilihan secara langsung ini.

“Evaluasi pemilihan secara langsung bukan berarti mengembalikan ke pemilihan kepala daerah dan presiden seperti pada masa lalu, melainkan evaluasi soal efektivitas, efisiensi, dan dampak negatif,” katanya usai sosialisasi Empat Pilar MPR kepada Himpunan Wanita Karya Samarinda.

Mahyudin menjelaskan, pemilihan kepala daerah diatur dalam UU. Sedangkan pemilihan presiden diatur dalam UUD. Dalam UUD disebutkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. “Ini memungkinkan bagi kita untuk mengevaluasi UU dan melakukan perubahan UU,” sebutnya.

Evaluasi pemilihan kepala daerah secara langsung itu, kata Mahyudin, meliputi bagaimana efektivitas dari pemilihan secara langsung, bagaimana efisiensi anggaran, dan konflik-konflik horisontal sebagai akses pemilihan secara langsung.

“Mungkin kita bisa melakukan pemilihan gubernur secara langsung, tapi bupati atau walikota cukup dipilih oleh DPRD dalam rangka efisiensi anggaran dan mengurangi efek negatif,” jelasnya.

Begitu juga dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. “Tidak ada salahnya dievaluasi juga. Apakah pemilihan presiden secara langsung ini sudah tepat,” ujar Mahyudin.

Dia melihat ada bibit dan potensi perpecahan secara horisontal di masyarakat. “Kalau Pilpres kita evaluasi bukan berarti harus kembali seperti dulu. Apakah sistem pemilihan ini sudah tepat atau perlu perbaikan. Apakah kita perlu mencontoh negara Amerika Serikat dengan sistem pemilihan negara bagian yang juga belum tentu pas dengan kita,” paparnya.

Mahyudin menyebutkan, masyarakat masih belum sepenuhnya siap dengan pemilihan secara langsung. Fakta di masyarakat menunjukkan maraknya politik uang yang membuat pemilu berbiaya mahal dan ujungnya banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi. “Ini bagian yang harus kita pikirkan dan evaluasi,” tuturnya.

Mahyudin menginginkan Indonesia memiliki demokrasi ala Indonesia. “Kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Evaluasi adalah hal yang wajar untuk kita kaji kembali sistem pemilihan langsung. Tapi tidak berarti kembali seperti yang dulu,” tutupnya. □

BSC

GSNI DI Yogyakarta

Ahmad Basarah: Budaya Demokrasi Tidak Bisa Dibentuk Instan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BUDAYA demokrasi tidak bisa dibentuk dengan instan, melainkan harus ditanamkan sejak dini di bangku sekolah. Caranya adalah dengan memasukkan kurikulum pendidikan demokrasi ke dalam mata pelajaran di sekolah, dan juga dengan mengoptimalkan peran organisasi ekstra sekolah sebagai wahana pendidikan penerapan budaya demokrasi substansial.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah saat memberikan materi Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bertajuk: "Membangun Watak dan Karakter Kebangsaan Indonesia" bekerjasama dengan Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) di Balai PMD Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin, 13 Januari 2019.

"Lewat organisasi ekstra sekolah, seperti GSNI, ini segenap siswa digembeleng untuk saling menghargai dan menghormati pusa ragam perbedaan. Kepada mereka diajari untuk mendengar dan menghormati pendapat orang lain, mengedepankan musyawarah-mufakat dalam mengambil keputusan, dan menerapkan kultur demokrasi substantif dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dengan demokrasi substansial

yang diajarkan sejak dini," jelas legislator asal daerah pemilihan Malang Raya tersebut.

Basarah menjelaskan bahwa internalisasi budaya demokrasi substansial dalam diri remaja demikian mendesak. Setidaknya ada dua hal yang menjadi latar belakangnya. *Pertama* adalah dalam faktanya penerapan demokrasi di Indonesia selama ini baru sebatas demokrasi prosedural saja. Akibatnya, demokrasi hanya dipahami sebatas saat berlangsungnya kontestasi elektoral dalam

memilih pemimpin saja.

Kedua, soal karakteristik remaja. Menurut pakar psikologi / kejiwaan Elisabeth Hurlock dalam bukunya *Development Psychology* bahwa salah satu ciri remaja yang paling menonjol adalah ketidakseimbangan emosional dan pencarian terhadap identitas diri.

"Jadi remaja ini punya rasa penasaran yang tinggi. Kondisi semacam inilah yang cukup rawan. Jika tidak memiliki bekal ilmu dan agama yang kuat bukan mustahil remaja



akan jatuh atau terjerat ideologi asing yang belum tentu cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan, tidak jarang dalam praktiknya penyebaran ideologi transnasional itu menggunakan kecanggihan teknologi informasi,” terang Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI tersebut.

Terakhir Basarah menegaskan bahwa remaja dan pemuda merupakan aset penting bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dirawat. Maka tidak mengherankan jika

banyak tokoh besar yang memberikan atensi besar kepada pemuda. Misalnya Ulama Mesir tersohor Syeikh Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan, “Jika ingin melihat suatu bangsa di masa depan maka lihatlah pemudanya di hari ini”. Bahkan Bung Karno pernah berpidato dengan nada yang sangat optimistis tentang pemuda dengan menyebut: “Beri Aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”.

Pemuda inilah, menurut Basarah, menjadi

ujung tombak sekaligus duta-duta yang aktif dalam mengampanyekan nilai-nilai toleransi, kerukunan sosial, dan persaudaran sebagai karakter bangsa Indonesia. Perbedaan dalam demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Lawan berkompetisi adalah teman berdemokrasi dan lawan berdebat adalah teman berfikir. “Ke depan harapan kita semua demokrasi substantif terus berkembang,” demikian Basarah. □

Minta GSNI Aktif Membumikan Pancasila di Kalangan Pelajar



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEMINGGU sebelumnya, tepatnya 7 Januari 2019, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Siswa Nasional Indonesia (DPP GSNI) di ruang kerjanya, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hadir dalam audiensi tersebut Abdul Gani dan Ika Indra Sanjaya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Sekjen DPP GSNI beserta pengurus lainnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengaku miris dengan kondisi dan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini. Sebab, banyak generasi muda bangsa sudah jatuh menjadi pengikut dua ideologi transnasional, seperti ekstrimisme agama dan liberalisme/individualisme.

“Generasi muda kini menjadi segmentasi yang diperebutkan oleh dua ideologi tersebut. Pelajar dan mahasiswa adalah kelompok strategis, namun sangat rentan terhadap pengaruh dari luar, termasuk penetrasi paham ekstrimisme agama dan liberalisme/individualisme,” kata Basarah pada delegasi DPP GSNI itu.

Lebih lanjut, Ketua Panitia Ad-Hoc (PAH) 1 Haluan Negara MPR RI ini memaparkan bahwa ancaman ideologi transnasional yang mengincar generasi muda bukanlah wacana, melainkan sudah benar-benar ada dan nyata. Sebagai contoh, pelaku aksi terorisme saat ini bukan lagi menjadi monopoli orang dewasa, bahkan pelajar dan anak-anak tercatat menjadi pelakunya. Bom bunuh diri satu keluarga di Surabaya adalah contoh konkret menggambarkan hal itu. Diawali dengan sikap intoleran, pintu gerbang menjadi pelaku terorisme semakin terbuka lebar.

“Menguatnya paham ekstrimisme agama ini jelas merupakan ancaman terhadap takdir Tuhan untuk bangsa Indonesia, yaitu berupa kemajemukan. Juga ancaman terhadap ideologi Pancasila yang Berbhinneka Tunggal Ika,” jelas pria yang biasa disapa Baskara itu.

Di sisi lain, fenomena yang juga harus menjadi perhatian serius adalah perihal ancaman ideologi liberalisme. Contoh nyatanya adalah perilaku seks bebas di kalangan remaja dan konsumsi narkoba di kalangan remaja. Contoh BNN pada 2018 lalu pernah merilis 24% pengguna narkoba berasal dari kalangan pelajar. Belum lagi perilaku seks bebas hingga perilaku menyimpang, seperti LGBT. Salah satu contohnya, belum lama terjadi di Garut, Jawa Barat. Lewat group facebook gay SMP/SMU yang beranggotakan ribuan orang di Garut, Jawa Barat, kalau kebebasan dilepas pada gilirannya akan mengampanyekan perkawinan sejenis dilegalkan di Indonesia.

“Perlahan namun pasti generasi muda digerogeti oleh dua ideologi transnasionalisme yang dalam praktiknya membonceng kemajuan teknologi. Hal ini bisa terjadi karena kedangkalan pemahaman terhadap ideologi Pancasila,” jelas Baskara lagi.

Terhadap menguatnya fenomena tersebut, Basarah mengajak segenap kader GSNI untuk bekerja keras dan ikhlas, berjiwaku menghadapi derasnya propaganda ideologi transnasional tersebut. Upaya membina dan menanamkan nasionalisme dan patriotisme harus ditanamkan sejak dini. Hal ini sebagai usaha dalam menciptakan pelajar cerdas, kreatif, cinta tanah air dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. □

Studi Banding Mahasiswa UPI

“MPR Tempat Belajar Sistem Tatanegara”

SEBANYAK 320 mahasiswa jurusan Pendidikan Ketatanegaraan (PKn) dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Senin (21/1/2019), memenuhi Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Para mahasiswa dari perguruan tinggi yang berdomisili di Kota Bandung, Jawa Barat, datang ke kompleks Parlemen itu untuk melakukan studi banding tentang tugas dan fungsi MPR. Kedatangan delegasi yang dipimpin oleh Ketua Departemen PKn UPI, Prof. Dr. Sapriya, Med., ini disambut oleh Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf Cahyono berharap, kedatangan para mahasiswa ini tidak hanya sekadar berkunjung, namun dengan melihat semua yang ada di kompleks ini, para mahasiswa akan teringat pada simbol-simbol tata negara. “Dengan melihat gedung bulat maka akan teringat tentang sejarah MPR, konstitusi, dan gerakan reformasi”, ujarnya.

Kunjungan mahasiswa berjaket biru ini, menurut Ma'ruf Cahyono, sangat relevan dengan studi yang ditempuhnya. Sehingga kehadirannya akan memberi nilai tambah pada studi yang didalamnya.

Kepada para mahasiswa dan dosen pendamping, Ma'ruf menyatakan, MPR mempunyai visi: “Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat.” Visi inilah yang membuat MPR mampu berdialog dan bertemu dengan segala lapisan masyarakat. “Semua di sini untuk belajar sistem tata negara”, tuturnya.

MPR, kata Ma'ruf Cahyono, merupakan salah satu lembaga negara dari beberapa lembaga negara yang keberadaannya ada di dalam konstitusi. “Selain MPR, ada DPR, DPD, MA, BPK, KY, MK, dan Kepresidenan”, ucapnya. Delapan lembaga negara itu mempunyai tugas dan fungsi yang diatur dalam UUD. Untuk di kawasan parlemen saja, pria asal Banyumas, Jawa Tengah, itu menyebut, ada 3 lembaga negara, yakni MPR, DPR, dan DPD. “Ketiga lembaga ini satu rumpun, namun memiliki tugas yang berbeda”, ungkapnya. “Masing-masing memiliki karakteristik”, tambahnya.

Selanjutnya Ma'ruf memaparkan, we-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



wenang MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD Tahun 1945 ada perbedaan, meski demikian tetap fundamental. Tugas yang diatur dalam UUD untuk MPR, antara lain adalah: Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan bisa memakzulkan Presiden bila melanggar hukum. Sebelum UUD diamandemen, menurut Ma'ruf Cahyono, MPR mempunyai tugas membuat Ketetapan MPR dan menetapkan GBHN. Sekarang kedua tugas ini tidak lagi dimiliki oleh MPR.

Terkait GBHN, sebut Ma'ruf, lembaga ini (MPR) tengah sibuk membahas masalah haluan negara. Masyarakat menyadari bahwa haluan negara ala GBHN merupakan hal yang penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Keinginan dari masyarakat untuk menghidupkan kembali haluan Negara seperti itu diserap dan dijangkit oleh MPR. “Dari sinilah maka kita sekarang membahas masalah itu”, ungkapnya.

Bukti dari keseriusan MPR untuk melahir-

kan haluan negara model GBHN ditunjukkan dengan menetapkan dan mengesahkan panitia khusus, yaitu Panitia Ad Hoc I yang membidangi GBHN. Panitia ini diputuskan saat Sidang Tahunan MPR, Agustus 2018.

Jadi, kata Ma'ruf, bila para mahasiswa ingin melihat tugas MPR maka perlu menyimak lembaga ini sebelum dan setelah amandemen. Menurut Ma'ruf Cahyono, tugas MPR tidak hanya diatur dalam UUD, tapi juga diatur dalam Undang-undang. Dia menyebut UU. No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau lebih populer UU MD3 yang memberi amanat kepada MPR untuk melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Serta melakukan pengkajian terhadap konstitusi, tata negara, dan pelaksanaannya.

Terkait masalah sosialisasi, Ma'ruf menjelaskan, upaya pemasyarakatan 4 Pilar MPR dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti lewat *training of trainers*, lomba

cerdas cermat, outbound, diskusi, seminar, lewat pertunjukan wayang kulit. “Kalau di Bandung lewat wayang Sunda”, tuturnya. Bahkan, juga lewat ceramah dengan menampilkan Ustad Abdul Somad. Dalam

melakukan sosialisasi, sebut Ma’ruf, MPR melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. “Kita sering bekerjasama dengan UPI”, ungkapnya.

Kehadiran mahasiswa UPI diapresiasi

oleh Ma’ruf Cahyono. Dia berharap, civitas akademika dari kampus itu mampu memberi kontribusi kepada MPR untuk melakukan penyempurnaan sistem tata negara. □

AWG

Tebet, Jakarta Selatan

HNW Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih Dalam Pemilu



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan amanah UU No. 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Sosialisasi dilakukan agar rakyat Indonesia tak hanya memahami keempat nilai luhur bangsa Indonesia, namun juga wajib mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bangsa ini tetap menjaga persatuan dan hidup saling menghormati.

Untuk itulah pria yang juga Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu mendorong masyarakat agar menjadi warga negara yang menjalankan Empat Pilar MPR, sehingga mampu berperan dan ikut andil dalam membangun Indonesia yang lebih baik. “Dengan sosialisasi, kita harapkan bisa menghadirkan Indonesia sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa, yakni Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, gemah ripah lohjinawi, serta baldatun thayyibatun wa

rabbun ghofur”, harapnya.

HNW menyampaikan hal itu ketika melakukan sosialisasi kepada warga Tebet, Jakarta Selatan, 20 Januari 2019. Dalam acara yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Tebet, pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu berharap, Demokrasi Pancasila yang kita anut hendaknya digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Dalam demokrasi ada Pemilu”, tuturnya. Untuk itu, dalam pesta demokrasi (Pemilu) pada 17 April 2019, HNW mengajak semua peserta untuk menggunakan hak pilihnya, baik untuk memilih Presiden/ Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. “Mari kita gunakan hak pilih kita, hak kedaulatan rakyat”, ucapnya.

Hak memilih, tegas HNW, perlu digunakan sebab suara yang kita miliki menentukan masa depan bangsa. Jadi, hak yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 itu jangan sampai ditukar dengan uang, sembako, atau jangan

sampai salah pilih karena tergoda oleh janji atau iming-iming dari para calon.

Selanjutnya, HNW mengingatkan, jangan sampai hak pilih kita tidak digunakan alias Golput”. Karena Golput tidak akan menyelesaikan masalah. “Golput bukan solusi”, ucapnya seraya menegaskan, selain tak bisa memberi solusi, bila Golput yang menang belum tentu sesuai dengan harapan bangsa Indonesia.

Menurut alumni Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, ini dalam Pemilu yang diukur tidak hanya kualitas calon pemimpin, namun juga banyaknya suara yang ikut berpartisipasi. “Sehingga siapapun mendapat suara yang banyak, dialah yang akan menang”, ujarnya.

Agar Pemilu yang digelar berkualitas maka, HNW berharap, masyarakat pemilih hendaknya memilih pemimpin yang cinta Indonesia, serta bisa membawa negara ini lebih baik dan maju. “Serta melindungi semua golongan”, tegasnya. □

AWG

Kabupaten Paser

Sosialisasi Empat Pilar, Mahyudin Singgung Papua



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Mahyudin kembali mengadakan roadshow sosialisasi Empat Pilar MPR di Kalimantan Timur. Senin (10/12/2018), Mahyudin mengunjungi Kabupaten Paser, dan acara dilakukan di dua tempat, yaitu: Batu Kajang dan Tanah Grogot. Untuk mencapai kedua lokasi itu harus melakukan perjalanan selama kurang lebih empat sampai lima jam. Dari Balikpapan lebih dulu naik kapal feri sekitar 45 menit menuju Paser, kemudian dilanjutkan perjalanan darat ke Batu Kajang. Perjalanan dari Batu Kajang ke Tanah Grogot sekitar 1,5 jam.

Mahyudin memberi pengantar Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada warga masyarakat Batu Kajang. Dia menjelaskan, salah satu alasan MPR menyosialisasikan Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) adalah karena bangsa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan itu adalah masih adanya pengabaian terhadap daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan.

"Kenapa Empat Pilar MPR harus disosialisasikan atau dimasyarakatkan? Karena kita

masih menghadapi tantangan kebangsaan. Salah satu tantangan adalah pengabaian terhadap daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan," jelas Mahyudin.

Dia mengungkapkan, tantangan itu terjadi di beberapa daerah. Sebab, pembangunan memang belum dilaksanakan secara merata. "Ini seperti terjadi di Papua. Indonesia sudah merdeka sejak lama, tapi pembangunan di Papua masih tertinggal. Masih ada kasus kurang gizi, dan sebagainya," kata Mahyudin memberi contoh.

Karena itu, lanjut Mahyudin, terjadi gerakan separatis di Papua. Namun, Mahyudin menegaskan bahwa kasus penembakan terhadap 31 pekerja yang sedang membangun jembatan di Nduga bukan dilakukan kelompok separatis. Penembakan itu dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk mengadu-domba masyarakat. "Kelompok kriminal ini mengatasnamakan rakyat Papua. Kita tidak bisa bilang bahwa mereka mewakili rakyat Papua. Mereka ingin mengadu-domba masyarakat," tuturnya.

Lebih lanjut, Mahyudin mengatakan, kelompok itu bukanlah orang yang ingin Papua merdeka dan memisahkan diri dari NKRI. "Mereka adalah kriminal bersenjata. Mereka tidak punya wilayah. Mereka tidak punya rakyat. Kelompok ini hanya pengacau," katanya.

"Dari mana mereka memperoleh senjata? Pasti ada yang menyuplai dan memprovokasi kelompok ini dengan tujuan mengadu-domba. TNI dan Polri harus menangkap KKB ini dan mengadili sesuai hukum," imbuhnya.

Dalam konteks kebangsaan (Empat Pilar), Mahyudin berharap, dengan otonomi khusus maka terjadi keadilan sosial di Papua. "Agar rakyat Papua juga harus merasakan kesejahteraan yang sama dengan masyarakat daerah lain di Indonesia dalam ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya," ucapnya.

Jiwa nasionalisme itu bisa lahir jika ada keadilan sosial. Ketika ada ketidakadilan maka muncul kecemburuan. "Perlu pembangunan yang merata di seluruh Indonesia," pungkasnya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Belajar Agama dengan Benar

Masih di hari yang sama, Mahyudin melanjutkan perjalanan ke Tanah Grogot. Di Tanah Grogot, dia menyampaikan sosialisasi kepada ibu-ibu yang tergabung dalam Badan Kontak Majelis Taklim Tanah Grogot. Sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber anggota Fraksi Partai Golkar MPR, M. Suryo Alam.

Kepada ibu-ibu Majelis Taklim, Mahyudin mengajak untuk mempelajari agama dengan benar. Sehingga bisa menangkal dan menghindari paham-paham radikal. Mahyudin membahas soal belajar agama terkait salah satu tantangan kebangsaan yang dihadapi Indonesia, yaitu masih adanya pemahaman keagamaan yang keliru dan sempit. Pemahaman agama yang keliru dan sempit ini bisa melahirkan radikalisme. "Ini sangat berbahaya," ujarnya.

Untuk meredam radikalisme itu pemerintah menjalankan program deradikalisasi. Namun program deradikalisasi belum berjalan optimal. "Orang yang sudah terpapar radikalisme akan sulit kembali normal," tuturnya.

Karena itu Mahyudin mengajak ibu-ibu untuk mempelajari agama melalui jalur yang benar. "Belajar agama melalui majelis taklim ini merupakan jalur yang benar," ujarnya.

"Jangan belajar dari internet," tegasnya. Sebab, informasi dari internet bukan tidak mungkin mengandung informasi yang salah dan hoax, serta menyesatkan. Bahkan, tidak sedikit orang menjadi radikal setelah belajar agama dari internet. "Jadi harus hati-hati jangan sampai masuk perangkap paham radikal," katanya.

Di bagian lain, Mahyudin mencontohkan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad.

Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad bukan dengan cara kekerasan. "Kalau dakwah dilakukan dengan cara kekerasan maka orang menjadi tidak senang dengan ajaran agama kita," jelas Mahyudin.

"Dakwah itu dengan memberi contoh. Dakwah sebenarnya harus mampu merangkul bukan memukul. Dakwah juga harus mampu mengajak bukan menjelek," imbuhnya.

Mahyudin juga mengingatkan ibu-ibu majelis taklim untuk memperkuat persaudaraan, yaitu ukhuwah bashariah, ukhuwah wathoniyah, ukhuwah Islamiyah. "Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama umat Islam, kemudian ada ukhuwah wathoniyah, yaitu persaudaraan antaranak bangsa, dan persaudaraan bashariah, yaitu sama-sama anak nabi Adam," katanya. □

BSC





B ERITA *Foto*



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani di Aula SMK Grafika Lebak Bulus, Jakarta 10/12/2018

Refleksi

Akhir Tahun MPR, DPR, DPD RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



Pimpinan MPR, DPR, DPD: di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta 18/12/2018

Penandatanganan

MoU Sosialisasi

Empat Pilar dengan BPHN Kemenkumham



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah: 17/12/2018

Audiensi

Dubes Australia

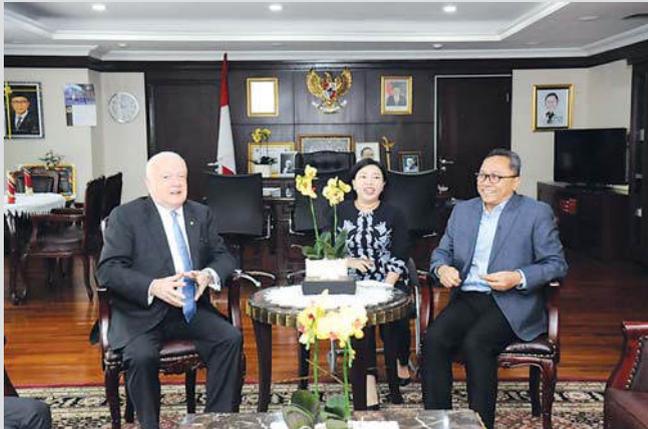
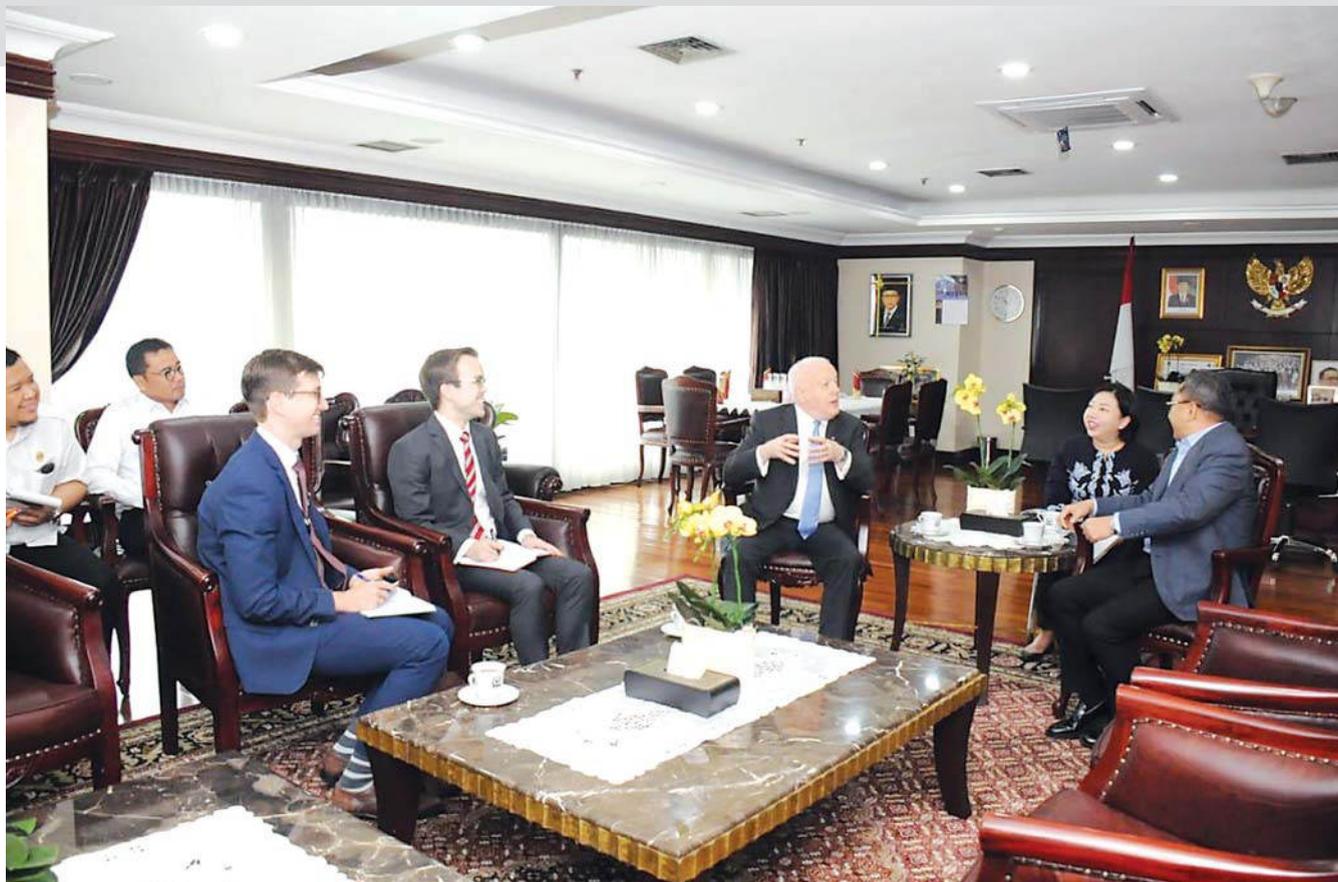


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



Ketua MPR Zulkifli Hasan di Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta 16/01/2019

Audiensi Parlemen Inggris



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



Ketua MPR Zulkifli Hasan di Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta 16/01/2019

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah di acara Jambore Nasional Kewirausahaan di Trawas, Mojokerto 14/12/2018



Kunjungan Guru dan Pelajar SMP Negeri 3 Cisauk, Kab. Tangerang ke MPR

SEKITAR 265 peserta—yang terdiri dari para siswa/ siswi dan guru – mengikuti program 'Outing Class' kelas 8 SMP Negeri 3 Cisauk, Kabupaten Tangerang, Selasa (15/01/2019), menyambangi Gedung MPR RI di Senayan, Jakarta. Di dampingi Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cisauk, H. Hipni, mereka diterima oleh Kepala Biro Humas Setjen MPR RI, Siti Fauziah, didampingi Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi Biro Humas Setjen MPR RI Muhammad Jaya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, itu Siti Fauziah memperkenalkan gedung-gedung yang terdapat di kompleks Parlemen, terutama Gedung Bulat atau Gedung Hijau yang menjadi ikon kompleks Parlemen.

Selain itu, Siti Fauziah yang akrab disapa Bu Titi itu juga menjelaskan seputar perubahan UUD 1945, serta memperkenalkan para Pimpinan MPR RI, dan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

“Saya berharap kalian, para siswa dan siswi, yang merupakan generasi penerus kepemimpinan bangsa bisa mengambil manfaat dan menambah pengetahuan, serta wawasan kalian tentang lembaga MPR RI dan tentang bangsa kalian sendiri,” katanya. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Rakor Biro Humas Setjen MPR RI 2019

Ma'ruf Cahyono: Pertahankan dan Tingkatkan Performa Serta Kinerja Setjen MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



MEMASUKI awal 2019, Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Biro Humas Setjen MPR RI, di The Forest Hotel Pamoyanan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/01/2019).

Hadir dalam Rakor tersebut Sekretaris Jenderal (Setjen) MPR RI Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah, serta para pejabat dan staf di lingkungan Biro Humas Setjen MPR RI.

Dalam sambutan pengarahannya, Ma'ruf Cahyono mengungkapkan bahwa sampai akhir 2018 performa dan kinerja, serta prestasi Setjen MPR RI telah banyak mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari berbagai pihak dalam berbagai bentuk. Antara lain, Reformasi Birokrasi MPR berjalan bagus, pengelolaan anggaran berjalan bagus dan nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) MPR sudah mencapai 3 dari awalnya 2,028 telah memenuhi tuntutan nasional dalam pencapaian tingkat maturitas. Presiden RI Joko Widodo

menargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, level maturitas SPIP Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah pada 2019 pada level 3 dari skala 1-5.

"Hal tersebut merupakan pencapaian luar biasa berkat kerja keras dan berat di lingkungan Setjen MPR RI," katanya saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) awal tahun 2019 Biro Humas Setjen MPR RI, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/01/2019).

Untuk itulah, lanjut Ma'ruf, ke depan perlu diperhatikan pentingnya saling mendukung dalam mempertahankan dan meningkatkan performa, serta kinerja Setjen MPR RI demi peningkatan layanan publik yang baik dengan tata laksana yang bagus.

"Jangan lantas berleha-leha dengan pencapaian tersebut. Sebab, masih banyak 'pekerjaan rumah' Setjen MPR untuk mewujudkan prioritas kerja di 2019 dan tahun-tahun selanjutnya," ujarnya..

Kepada jajaran Biro Humas MPR RI, Ma'ruf Cahyono mengingatkan beberapa hal yang perlu diperhatikan karena merupakan prioritas kinerja kehumasan Setjen MPR RI. Antara lain, seputar layanan informasi publik, serta berita kepada masyarakat Indonesia di berbagai daerah, dan kepada anggota MPR RI seputar implementasi teknologi informasi, arsip, dan perpustakaan. □

DER



Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR

Pers Harus Mendapatkan *Trust* dari Masyarakat

KONGRES Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Padang, Sumatera Barat, pada 1978 menghasilkan kesepakatan, salah satunya adalah perlu ditetapkan satu hari bersejarah untuk memperingati peran dan keberadaan pers nasional. Lalu Dewan Pers menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah. Lewat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tanggal 23 Januari 1985, pemerintah menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Tanggal 9 Februari adalah tanggal terbentuknya organisasi PWI pada 9 Februari 1946 di Surakarta.

Kehidupan pers mengalami dinamika dari masa ke masa. Bukan saja pada masa Orde Lama, tapi juga Orde Baru hingga era Reformasi yang memberi kebebasan pers seluas-luasnya. Bagaimana wajah pers kita saat ini? Untuk menjawab pertanyaan ini Majelis mewawancarai Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari. Berikut petikan wawancara dengan Abdul Kharis Almasyhari yang juga politisi dari PKS:

Bagaimana Bapak melihat pers khususnya media pers baik cetak,

online, maupun elektronika kita saat ini secara umum?

Saya melihat banyak media atau pers kita saat ini yang menjadi media partisan. Kita pernah mengadakan seminar dengan Dewan Pers. Dalam seminar itu saya mengatakan bahwa jika pers atau media sudah mulai partisan, maka orang akan mencari sumber informasi yang bisa memenuhi preferensinya. Akhirnya, kita rasakan sekarang ini, orang lebih suka dan lebih percaya pada media sosial (medsos). Padahal, kita tahu media sosial di dunia maya lebih tidak terkontrol dan liar. Tapi, masyarakat justru mempercayai informasi di medsos. Kenapa? Karena media *mainstream* sekarang ini tidak menghadirkan adanya independensi media atau pers yang independen. Hal ini juga disinggung dalam seminar yang kita adakan waktu itu.

Kita berharap, media *mainstream* yang telah diverifikasi Dewan Pers bisa lebih independen dan memberikan informasi yang benar-benar akurat. Sesungguhnya kita berharap, media *mainstream* ini menjadi rujukan bagi masyarakat. Sebab, masyarakat yang akan menilai media itu.

Apakah kondisi pers atau media kita

seperti itu karena menjelang Pemilu 2019?

Saya rasa kita sudah lama membicarakan kondisi pers atau media seperti itu. Saya menjadi pembicara waktu itu sekitar tahun 2017. Saat itu masih jauh dari tahun politik. Jika media *mainstream* tidak independen maka akan ditinggalkan oleh masyarakat. Saya berharap, pers dan media kita bisa menjaga independensi. Berkaitan dengan Hari Pers Nasional, saya berharap, pers dan media bisa menghadirkan informasi yang independen sehingga memenuhi dahaga masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan kredibel.

Kalau melihat kondisi pers dan media menjelang Pemilu ini, apakah Bapak juga melihat pers dan media kita terbelah?

Ini bukan hanya terbelah, tapi pers dan media kita sudah terpolarisasi.

Apakah Dewan Pers perlu turun tangan melihat kondisi pers dan media kita saat ini?

Dewan Pers bukan menangani soal keterbelahan dan polarisasi pers dan media saat ini. Dewan Pers hanya melihat informasi yang disajikan pers dan media apakah

masuk dalam kategori *hoax* atau tidak. Artinya, apakah informasi yang disajikan kepada masyarakat itu berdasarkan data atau tidak, dari lembaga resmi atau tidak, bisa dipercaya atau tidak. Sebab, media online banyak yang tidak resmi. Bahkan, alamatnya tidak jelas, siapa yang bertanggungjawab juga tidak jelas. Ini menjadi kewenangan Dewan Pers. Namun, secara etis Dewan Pers bisa mengingatkan pers dan media-media untuk tidak partisan.

Pers dan media kita saat ini juga dikuasai konglomerasi. Bahkan pengusaha yang menguasai media itu pun menjadi aktor politik. Apakah ini juga memengaruhi situasi pers dan media kita saat ini?

Saya kira jika media independen dan tidak

oleh masyarakat, misalnya tidak ada yang mau membaca media, atau mendengar dan menonton media elektronik. Kalau tidak ada yang membaca tentu tidak ada iklan yang masuk. Lalu, dari mana media itu bisa hidup?

Apakah Komisi I DPR pernah mendapatkan masukan dari Dewan Pers mengenai media yang benar-benar independen atau media yang tidak independen (partisan)?

Kami di Komisi I tidak bisa menilai media-media yang independen atau media-media mana yang tidak bisa menjaga independensi. Sebenarnya Dewan Pers yang bisa memberi penilaian. Komisi I juga tidak mendapat masukan dari Dewan Pers mengenai media-media yang independen dan media mana yang tidak independen. Kita juga belum

yang menimbulkan kontroversi?

Bicara media *mainstream* adalah media yang sudah jelas sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi, kalau media *mainstream* itu tidak bisa menjaga independensinya maka media *mainstream* itu tidak bisa menjaga kesehatannya. Sebaliknya, tabloid “Indonesia Barokah” adalah media yang tidak jelas. Kita tidak usah bicarakan, kita sudah pastikan “tidak sehat”. Sebab, alamatnya saja tidak jelas. Penanggungjawabnya tidak jelas. Siapa yang menerbitkan tidak jelas. Kita jangan mempercayai media yang tidak jelas seperti itu. Itulah soal *trust* tadi. Anggap saja tabloid “Indonesia Barokah” itu media sampah. Apalagi Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah memerintahkan untuk membakar saja tabloid



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dipengaruhi pemilik modal maka tidak akan mempengaruhi informasi yang disampaikan kepada publik. Jika tidak independen dan pengaruh pemilik modal terlalu dominan atas pemberitaan media maka masyarakat akan menilai dan meninggalkan media tersebut. Misalnya, sebuah peristiwa diberitakan oleh pers dan media namun tidak sesuai dengan kejadian sesungguhnya. Maka orang yang mengetahui persis peristiwa tersebut akan mencari media yang benar-benar memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan fakta. Maka orang itu pasti akan meninggalkan media yang menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta.

Pers atau media seharusnya bisa menimbulkan *trust* pada masyarakat. Pers atau media harus mendapatkan *trust* dari masyarakat. Jika tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat, pers dan media akan dihukum

bertanya kepada Dewan Pers. Saya kira Dewan Pers juga tidak berani menyebut media-media yang independen dan media yang partisan. Tolok ukurnya juga sulit untuk menentukan mana media yang benar-benar menjaga independensi dan mana yang tidak menjaga independensi. Saya kira semua diserahkan kepada penilaian masyarakat. Biar masyarakat yang menilai mana pers atau media yang benar-benar independen dan bisa dipercaya, dan mana media yang tidak mendapat *trust* dari masyarakat.

Kalau melihat dunia pers sekarang ini, apakah pers kita dalam kondisi sehat? Artinya, pers yang benar-benar memegang kode etik jurnalistik, akurat, bertanggungjawab, kredibel, bisa dipercaya dan independen serta untuk kepentingan publik? Apalagi setelah munculnya tabloid “Indonesia Barokah”

“Indonesia Barokah” itu.

Apakah masih perlu aturan lagi untuk pers atau media kita saat ini?

Aturan yang ada saja ditegakkan, saya kira sudah bagus. UU Pers, misalnya, sudah bagus. Laksanakan dan tegakkan saja dulu aturan yang ada, UU Pers itu. Kalau sudah dilaksanakan barangkali nanti ada catatan-catatan maka UU itu bisa direvisi. Kemungkinan revisi terbuka karena UU Pers itu juga sudah cukup lama sehingga perlu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Bukan dalam arti menghidupkan lagi rezim “pembredelan” atau pemberangusan pers. Itu adalah pembungkaman hak untuk mendapatkan informasi. Mungkin, aturan itu diarahkan agar pers dan media menjadi lebih profesional, yaitu bagaimana meningkatkan profesionalisme pers dan media. □

Mengaku Agak Galak *Soal Waktu*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ira Kusno

ACARA Debat Capres 2019 perdana yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis malam (17/1/2019), menyita perhatian seluruh rakyat seluruh Indonesia yang disiarkan live oleh TVRI dan beberapa stasiun televisi swasta nasional. Tapi, tak kalah menarik adalah penampilan Ira Kusno yang malam itu berperan sebagai moderator Debat Capres tersebut.

Usai acara Debat Capres, lini massa "netizen" memberikan beragam komentar, baik pro maupun kontra tentang debat capres tersebut. "Pro dan kontra tentu ada, tapi kami sebagai moderator, mewakili KPU, berupaya agar debat berjalan lancar, serta adil bagi

dua capres," tulis pemilik nama lengkap Dwi Noviratri Martoatmodjo di lini massa media sosial.

Ira berpendapat, format debat ini luar biasa, membuat para pendukung tidak terlalu ribut. "Ini penting, karena keributan para pendukung yang ada di belakang paslon akan mendistraksi apa-apa yang akan disampaikan paslonnya," ujarnya.

Ira mengaku agak 'galak', apalagi soal timing atau waktu. "Yang pasti bagi saya, siapapun kelak jadi pemimpin haruslah mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik," harap Ira Kusno. □

DER

Bangkitnya Film Indonesia Bertema Kekeluargaan

ARTIS penyanyi cantik Bunga Citra Lestari (BCL) menggebrak panggung musik Indonesia dengan lagu terbaru 'Harta Berharga'. Ditilik dari lirik dan musiknya, lagu 'Harta Berharga' ini merupakan ikon dari serial televisi jadul era 90-an berjudul 'Keluarga Cemara'. Anak usia SD hingga SMA era 1990-an pasti familiar dengan tokoh Abah, Emak, Euis, Cemara dan Agil.

"Betul, ini lagu *soundtrack* film produksi terbaru 'Keluarga Cemara'. Idenya dari film keluarga cemara versi era 90-an. Nah, lagu 'Harta Berharga' ini produksi ulangnya. Lagu yang selalu mengingatkan kita akan kehangatan keluarga ini spesial banget buat aku," ujar BCL di Jakarta.

Sejak dipublish di media sosial, Youtube, 10 Desember 2018, hingga rilis perdana film Keluarga Cemara di bioskop pada 3 Januari 2019, lagu ikonik aransemen baru tersebut sudah dinikmati 5 juta lebih *viewers*, suatu pencapaian yang sangat luar biasa.

"Ini bukti kalau film dan lagu Indonesia yang temanya, baik soal kekeluargaan maupun kebersamaan, masih sangat laku dan laris dinikmati masyarakat," ungkap artis penyanyi, pemeran mantan Ibu Negara RI, Ibu Ainun, dalam film "Habibie dan Anun" ini. □

DER



Bunga Citra Lestari



Agnes Monica

"Eh, Kesampaian Juga Ketemu Presiden..."

MANTAN penyanyi cilik era 90-an **Agnes Monica** tampak sumringah saat menuruni anak tangga Istana Negara, Jumat (11/1/2019). Artis yang *go international* dengan nama beken 'Agnes Mo' ini, Jumat siang, itu baru saja usai diterima Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

"*Exciting* banget ketemu Bapak Presiden, *finally*. Aku udah dari dulu pengen banget ketemu kalo bisa ngobrol. *Eh..* kesampaian juga," kata Agnes Mo kepada pers, didampingi manajernya dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Artis yang pernah menggebrak panggung American Music Award bersama penyanyi kelas dunia itu menyatakan, dengan Presiden, hanya obrolan 'santai' tapi seru. "Terutama ngomongin soal *hoax-hoax* yang sekarang sangat merajalela, apalagi tahun politik," jelas Agnes Mo. Presiden menyarankan, jangan terlalu gampang percaya kabar-kabar sebelum dicek dan ricek.

Artis kelahiran Jakarta, Juli 1986, ini juga mengungkapkan tentang rencana menggelar kegiatan bertemakan kepemudaan. "Presiden pada dasarnya setuju dengan kegiatan kepemudaan yang dalam tahap penggodokan. Entar ya, tunggu tanggal mainnya," ujarnya. □

DER



Wisata Sejarah di Arsip Nasional Republik Indonesia

BERADA di kawasan gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di jalan Ampera Raya No. 7 Jakarta Selatan terasa begitu nyaman. Dikelilingi berbagai jenis tanaman besar dan menjulang. Dedaunan hijau dan rimbun melindungi setiap pengunjung dari sengatan terik matahari di siang hari.

Suasana terasa semakin nyaman manakala angin sepoi-sepoi, berhembus pelan tak berkesudahan. Menariknya, meski dedaunan dari pohon-pohon itu gugur bergantian, namun kawasan gedung ANRI tetap tampak bersih. Tak ada seonggokpun sampah daun yang tak terurus di sana.

Suasana menyenangkan itu makin lengkap, karena seluruh pegawai dengan sigap memberikan pelayanan penuh keramahan kepada setiap pengunjung. Petugas pengamanan di pintu gerbang misalnya, dengan sopan menyapa seluruh tamu yang berkunjung. Dan, dengan bahasa santun menanyakan maksud dan tujuan kedatangan si tamu. Setelah tahu, mereka menunjukkan arah yang mesti dilalui agar tamunya tak tersesat.

Itulah suasana yang dirasakan oleh kami dari majalah *Majelis* saat menjejakkan kaki di kawasan Gedung ANRI beberapa waktu lalu. Saat itu, *Majelis* bertugas meliput kegiatan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang berkunjung ke ANRI untuk melihat dari dekat beberapa koleksi arsip yang ada di sana. Di gedung ANRI, antara lain tersimpan naskah Proklamasi dalam bentuk

tulisan tangan, foto-foto sejumlah perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Belanda, serta tokoh-tokoh nasional.

Saat ini ANRI menyimpan lebih dari dua juta foto, film, gambar, dan arsip nasional. Sayangnya, jumlah itu belum mencakup semua seluruh catatan sejarah Indonesia. Masih banyak catatan sejarah yang semestinya tersimpan di ANRI, tapi sampai saat





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

belum diketahui keberadaannya. Kesulitan dalam mengumpulkan buki-bukti sejarah itu terjadi karena ANRI hanya mau menyimpan catatan sejarah yang asli.

Semua dokumen bersejarah itu tersimpan dengan rapi di beberapa gedung yang ada di kompleks ANRI. Penyimpanan arsip di ANRI dilakukan dengan sangat hati-hati disertai perawatan yang ekstra pula. Selain kebersihan dan keamanannya harus terjaga, dokumen yang tersimpan di Gedung Arsip itu juga dirawat agar tidak rusak.

Agar arsip bersejarah itu memberi manfaat bagi siapa saja, ANRI memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melihat bukti-bukti otentik perjalanan bangsa Indonesia. Mereka yang ingin mendapat catatan dan buki-bukti sejarah bisa datang ke ANRI. Di sana Anda akan mendapat pelayanan dari petugas yang ada, dan pihak ANRI menyediakan ruang yang representatif bagi siapapun yang hendak melakukan penelitian.

Arsip Nasional Republik Indonesia tidak terbatas diperuntukkan bagi para peneliti saja. Bagi kaum remaja, anak-anak, serta keluarga bisa melihat dan belajar sejarah bangsa Indonesia dari diorama yang dipajang di ANRI. Di hall C Gedung Arsip misalnya, pengunjung bisa merasakan suasana kebatinan pergerakan tokoh-tokoh pemuda, sejak 1908 hingga 1928.

Sedangkan diorama di hall D menyajikan peristiwa sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di sini ditampilkan Ibu Fatmawati sedang menjahit Sang Saka Merah Putih. Selain itu, di bagian berikutnya terdapat patung Soekarno - Mohammad Hatta pada saat pembacaan Proklamasi di Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Tak ketinggalan pula beberapa foto peristiwa seputar Proklamasi.

Peristiwa lain menyangkut ancaman keutuhan NKRI ditampilkan di hall E. Di sini pengunjung bisa mengetahui konflik internal dan eksternal yang terjadi dalam kurun 1945-1965. Dengan menyaksikan peristiwa

bersejarah itu, diharapkan jiwa kepahlawanan yang ditunjukkan dalam peristiwa heroik sekitar 1945 dapat dijadikan teladan bagi generasi penerus.

Sedangkan di hall G terdapat beberapa peristiwa sepanjang 1998 – 2008, atau masa reformasi dan setelahnya. Selama periode tersebut terjadi empat kali pergantian Presiden RI, dan juga perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini bangsa Indonesia mengalami kemajuan atas tercapainya kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Begitu berharganya kekayaan yang tersimpan di ANRI ini. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menganjurkan agar warga masyarakat meluangkan waktunya berkunjung ke sana. Selain untuk mengetahui perjalanan sejarah bangsa, kunjungan ke Gedung Arsip bisa meningkatkan rasa nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara. □

MBO

H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH. MH.

“Politik Itu Pengabdian”



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BAGI H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH., MH., (52), anggota Fraksi Partai Nasdem MPR RI, kegaduhan menyaoal adanya calon legislatif (caleg) loncat pagar atau pindah partai politik bukan sesuatu yang istimewa. Pasalnya, jauh sebelum fenomena loncat pagar ramai diperbincangkan, Syarif sendiri sudah punya pengalaman mengenal hal itu. Bukan hanya sekali, tetapi aksi pindah partai politik itu sudah dua kali ia lakukan.

Dulu, sebelum menjadi politisi, Syarif dikenal sebagai aktivis organisasi kepemudaan, *underbow* Partai Golkar, yaitu: Kosgoro dan AMPI. Selain itu, ia juga aktif di organisasi Kepramukaan, sebelum akhirnya bergabung menjadi salah satu pengurus Golkar Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dari 1987 hingga 1997.

Saat reformasi bergulir, bersamaan dengan lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syarif yang berasal dari keluarga besar

Nahdlatul Ulama (NU) diminta bergabung dengan partai bentukan KH. Abdurrahman Wahid itu. Di PKB, Syarif dipercaya menjadi Ketua DPW PKB Kalimantan Barat. Melalui PKB, Syarif terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Kalbar selama dua periode (1999-2004 dan 2004-2009).

“Saya pendukung KH. Abdurrahman Wahid. Karena itu, saat Gus Dur dilengserkan dari PKB, saya pun memilih untuk meninggalkan PKB, dan kembali ke kampus dan menekuni usaha lama saya, sebagai kontraktor”, kata H. Syarif saat berdialog dengan Majalah *Majelis*, di sela kesibukannya sebagai anggota Komisi V DPR RI, beberapa waktu lalu.

Tetapi, kevacumannya dari kegiatan politik tak berlangsung lama. Tahun 2011, alumni SD Negeri Tanjung Saleh, Sungai Kakap, ini terlibat dalam pendirian ormas Nasional Demokrat (Nasdem). Bahkan,



dia ditunjuk menjadi Ketua DPW Ormas Nasional Demokrat, Kalbar.

Ketika ormas Nasional Demokrat berubah menjadi partai politik, pria kelahiran Kubu Raya, 14 Juni 1966, ini ditetapkan menjadi Ketua Umum DPW Partai Nasdem Kalbar. Melalui Nasdem, Syarif meneruskan kiprahnya di parpol dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari dapil Kalbar periode 2014-2019.

“Bagi saya politik itu pengabdian atau amaliah. Karena itu, saat ada panggilan dan kesempatan kembali ke politik, saya mengiyakan”, kata ayah tiga anak dari pernikahannya dengan Khatijah Fitriyah.

Prinsip seperti itu sudah menjadi pegangan Syarif sejak ia menjabat

sebagai anggota DPRD. Saat itu, ia memperjuangkan agar anggaran pesantren dan madrasah masuk ke dalam APBD. Meski tidak besar, dia berkeyakinan dengan memasukkan anggaran madrasah dan pesantren ke dalam APBD membuktikan bahwa negara hadir di pesantren dan madrasah.

Upaya yang sama dilakukannya saat duduk di Komisi V DPR RI. Anak ketiga dari lima bersaudara ini memperjuangkan aspirasi konsituennya, khususnya untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Beberapa proyek pembangunan bisa diwujudkan selama lima tahun keberadaannya di DPR RI. Antara lain,

pembangunan jembatan Landak, pembangunan Tol Pontianak-Singawang, jembatan penyeberangan Sambas, hingga upaya penambahan landasan (*runway*) Bandara Supadio agar ke depan Kalimantan Barat bisa memiliki embarkasi sendiri, tidak ikut ke Batam.

Ingin Jadi Jaksa

Sudah tiga periode menjadi anggota legislatif, Syarif mengaku tak pernah terpikirkan hal itu terjadi, apalagi bercita-cita menjadi politisi. Salah satu cita-citanya saat masih di bangku sekolah adalah menjadi jaksa. Tetapi, keinginan itu luntur setelah sadar untuk menjadi jaksa tidak cukup hanya berbekal sarjana hukum. Dia juga menyadari bahwa untuk mewujudkan cita-citanya menjadi jaksa maka orang tuanya harus menjual beberapa bidang tanah, dan Syarif keberatan kalau hal itu terjadi.

“Apalagi orangtua saya pernah bercerita tentang Abunawas batal menjadi kadi (hakim) karena orang tuanya yang menjabat sebagai hakim meninggal, dan Abunawas diminta mencium kupingnya. Ternyata begitu dicium telinga kanannya berbau harum, sementara telinga kiri busuk. Artinya, kalau kau jahat akan masuk neraka, tapi kalau baik masuk surga. Sejak itu, Abunawas membatalkan diri menjadi kadi”, cerita Syarif.

Sedangkan profesi sebagai politisi menurun dari Syarif Ahmad — yang tak lain adalah bapaknya sendiri. Bapaknya (Syarif Ahmad) adalah seorang kepala desa di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dia bukanlah penduduk asli desa itu, dan selalu mendapat ancaman dari penjajah Jepang. Nah, untuk menghindari kejaran oleh pemerintah Jepang yang hendak menangkap dan memenjarakannya, dia pun pergi dari Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam suasana itulah Syarif terus berjuang untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Sampai kemudian dia berhasil menjamah dunia legislatif, DPR RI. Ini terhitung sukses sangat besar untuk seorang Syarif. Terlebih jika mengingat, masa kecilnya hidup di daerah terpencil, di Desa Tanjung Sale,



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Saat Syarif masih berusia belia, di Desa Tanjung Sale belum memiliki sekolah. Prihatin akan masa depan pendidikan anaknya, kedua orang tuanya (Syarif Ahmad dan Sahra) mewakafkan sebidang tanah untuk didirikan sekolah. Dan, sekolah pun berdiri. Maka, di sekolah inilah Syarif belajar, dengan kondisi seadanya, tanpa sepatu dan baju seragam. Bahkan, saat duduk di bangku kelas enam, siswanya hanya dua orang, yaitu Syarif dan seorang temannya.

Sebagai anak keturunan Ahlul Bait, Syarif kecil sudah banyak





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

mendapat pelajaran agama. Pagi dia sekolah, sore dan malam hari mengaji. Bahkan, sejak kecil, beberapa kitab yang lazim dipelajari di pesantren pun sudah dipelajari. Antara lain, Nahwo Shorof, Imriti, Safina, hingga Sulam.

“Desa kami sangat terpencil. Untuk pergi ke kota butuh waktu 3 jam perjalanan dengan kendaraan air. Kalau pergi ke kota minimal membutuhkan waktu dua hari. Karena kalau langsung pulang berarti tidak bisa ke mana-mana”, tutur Syarif.

Karena itu, lulusan Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura ini sangat bersyukur apa yang sudah didapatnya selama ini. Ia tidak memiliki target dan obsesi apapun di dunia politik, selain mengalir serta mengikuti nasib yang akan membawanya. Ia tidak bernafsu menjadi gubernur, atau tak tergiur dengan jabatan politis lainnya.

Saat ini, satu dari sedikit obsesi yang ingin dicapainya adalah penyematan gelar Pahlawan Nasional untuk Sultan Abdul Hamid, pencetus lambang Burung Garuda, yang tak lain adalah sepupunya sendiri. Bagi Syarif, Sultan Hamid layak mendapatkan gelar kehormatan itu. Karena jasa dan pengabdianya dalam menemukan

lambang Burung Garuda tak terbantahkan. Saat ini, jasa-jasanya itu diakui secara formal, baik dalam buku-buku sejarah maupun dari Kementerian Pendidikan Nasional.

Bahkan, sebagai anggota keluarga dari Sultan Abdul Hamid, Syarif sudah menginisiasi adanya seminar untuk menggali kebenaran sejarah bahwa Sultan Hamid memang sebagai pembuat simbol Burung Garuda, “Secara moril saya merasa bertanggung jawab untuk mewujudkan impian gelar kehormatan itu. Paling tidak kalau pencipta lagu Indonesia Raya sudah diakui, mestinya penemu lambang Burung Garuda juga mendapat kehormatan yang sama,” harap Syarif.

Tetapi, Syarif juga sadar bahwa ia tidak akan memaksakan keinginannya tersebut dalam waktu dekat. Apalagi Sultan Hamid juga sempat memiliki sedikit persoalan yang harus diluruskan, seputar persoalan politik dengan Bung Karno. “Mudah-mudahan suatu saat pemerintah bisa memenuhi harapan masyarakat Kalbar, yang secara ilmiah sudah dibuktikan bahwa Sultan Hamid adalah pencipta lambang Garuda”, katanya. □

MBO



Cinta Perdamaian Tapi Lebih Cinta Kemerdekaan

SEJAK negara ini diproklamkan, 17 Agustus 1945, Indonesia telah memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dunia, yakni perdamaian. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi bangsa telah menyebutkan bahwa salah satu tujuan bangsa ini didirikan adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Para *founding fathers* atau pendiri bangsa menyakini bahwa Indonesia tidak perlu condong terhadap salah satu dari dua blok atau ideologi yang sedang berseteru pada saat itu, kapitalisme dan sosialisme, Blok Barat dan Blok Timur. Bersikap non-blok atau tidak memilih ideologi dari ideologi yang ada, bukan berarti Indonesia tidak mempunyai ide dan gagasan untuk diperjuangkan sebagai ideologi alternatif.

Para pendiri bangsa justru memandang bahwa perlu ada alternatif (dan bahkan sintesa) dari perseteruan dunia yang terjadi saat itu. Para pemimpin negara Indonesia telah sepakat bahwa kemajemukan adalah kekayaan. Para pendahulu bangsa menyakini bahwa kolaborasi dan sinergi adalah kata kunci dalam membangun peradaban dunia yang lebih baik.

Hal tersebut bisa kita lacak dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang menyepakati Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan membaca pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 di hadapan anggota BPUPKI, kita semua bisa memahami bagaimana nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam dasar didirikannya negara Indonesia.

Sebagai bangsa yang bertuhan, kita dapat beragama dengan tetap saling hormat-menghormati. Sebagai negara yang majemuk,

kita selalu berusaha bermusyawarah dengan tanpa meninggalkan persatuan. Dan, dalam mewujudkan keadilan sosial, Indonesia dibangun dengan prinsip kemanusiaan yang merupakan nilai universal masyarakat dunia.

Untuk itu menjadi sesuatu yang wajar jika dalam masa penjajahan bangsa ini selalu mengumandangkan: "Kami cinta perdamaian tapi kami lebih cinta kemerdekaan". Mengapa demikian? Karena kami menyakini bahwa perdamaian hanya dapat terwujud jika kemerdekaan telah dimiliki oleh setiap bangsa. Tanpa kemerdekaan tidak akan terwujud perdamaian. Dan, tanpa perdamaian tidak akan sempurna yang namanya peradaban.

Mengenai sinergi, kolaborasi, ataupun kerja sama antarbangsa yang saya kemukakan sebagai kuncipun juga telah selesai kami perdebatkan. Gotong royong sebagai 'kata' yang lebih progresif dibanding dengan kerja sama adalah jalan utama kami dalam membangun negeri ini. Kami menyakini bahwa tidak ada manusia di dunia yang mampu untuk hidup sendiri. Dalam menjalankan kehidupan setiap manusia membutuhkan manusia yang lain.

Setiap bangsa yang ada di dunia, dalam membangun bangsanya juga akan selalu membutuhkan bangsa yang lain. Semaju apapun sebuah negara dan bangsa pasti akan membutuhkan negara yang lain. Paling tidak sebuah negara yang maju akan membutuhkan kerja sama dengan negara yang lain untuk mencari tenaga kerja ataupun pasar dari hasil produksinya. Itulah kodrat kita. Baik kodrat sebagai manusia maupun kodrat sebagai sebuah bangsa dan negara.

Dari paparan ini, saya berharap dapat menjadi inspirasi bagi dunia dan parlemen internasional. Sebagai negara yang terus belajar dan terus berusaha mewujudkan cita-cita, kita juga berharap dunia dan parlemen internasional juga bisa menjadi inspirasi perdamaian bagi bangsa Indonesia. Parlemen di Indonesia mendukung setiap upaya yang bertujuan membangun perdamaian dunia. □